

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet di Provinsi Sumatera Selatan telah selesai disusun. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No 50/2012, tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, dan Kepmentan No 46/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Nasional.

Sesuai dengan Permentan No 50/2012 tersebut, Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Master Plan pengembangan kawasan perkebunan untuk komoditas karet, dan sesuai dengan Kepmentan No 46/2015 setiap daerah yang ditetapkan sebagai lokasi kawasan pertanian wajib menyusun Rencana Akasi Pengembangan Kawasan berbasis komoditas karet.

Kami harapkan masukan dan saran sangatlah diperlukan agar dapat lebih menyempurnakan kembali laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Palembang, Januari 2016  
Kepala Dinas Perkebunan  
Provinsi Sumatera Selatan

Ir. H. FAKHRURROZI  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 1963 0313 1990 031007

## **DAFTAR ISI**

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
 BAB I. Pendahuluan	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Maksud dan Tujuan	I - 2
1.3 Output	I - 3
1.4 Sasaran	I - 4
1.5 Ruang Lingkup	I - 5
 BAB II. Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Pembangunan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet Provinsi Sumatera Selatan	II - 1
2.1 Lokasi Kawasan	II - 1
2.2 Visi dan Misi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet	II - 2
2.3 Tujuan dan sasaran Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	II - 3
 BAB III. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pikir Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	III - 1
3.1 Landasan Teori Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	III-1
3.2 Kerangka Pemikiran Penyusunan Masterplan, Road Map dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet	III - 8
 BAB IV. Metodologi/Metode Kajian	IV - 1
4.1 Jenis Data dan Sumbernya	IV - 1
4.2 Metode Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data	IV - 2
4.3 Metode Pendekatan dan Pelaksanaan Kajian	IV - 4
4.4 Metode Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet	IV - 4
 BAB V. Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet	V - 1
5.1 Kondisi Umum Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	V - 1
5.2 Kondisi Agroekologis dan Lingkungan Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	V - 2.1

---

5.3	Kondisi Wilayah Dari Sisi Gangguan Produksi Yang Dapat Menghambat Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	V – 3.1
5.4	Kondisi Kependudukan dan Sosial Budaya	V – 4.1
5.5	Kondisi Kelembagaan Pendukung Pada Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	V – 5.1
5.6	Kondisi Prasarana dan Sarana Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	V – 6.1
5.7	Kondisi Ekonomi dan Perekonomian Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	V – 7.1
5.8	Kondisi Konsumsi dan Perdagangan Komoditas Karet Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	V – 8.1
5.9	Kondisi Teknis dan Teknologis Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	V – 9.1
5.10	Kondisi Sumber Daya Manusia Pendukung Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	V – 10.1
5.11	Kondisi dan Implementasi Kebijakan Pendukung Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	V – 11.1
5.12	Gambaran Umum Perkebunan Komoditas Karet Pada Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet	V – 12.1
<b>BAB VI.</b>	<b>Analisis Perencanaan Pengembangan Kawasan Berbasis komoditas Karet</b>	<b>VI – 1</b>
6.1	Kesesuaian Lahan dan Agroklimat dan Ketersediaan Areal Untuk Perluasan Areal dan Pengembangan Kawasan	VI – 3
6.2	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	VI – 10
6.3	Struktur Organisasi dan Kelembagaan Pengembangan Kawasan	VI – 13
6.4	Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengembangan Kawasan	VI – 16
6.5	Konsumsi, Pengolahan dan Perdagangan Hasil Pengembangan Kawasan	VI – 17
6.6	Ekonomi dan Perekonomian Pengembangan Kawasan	VI – 19
6.7	Analisis Kebutuhan Teknis dan Teknologi Pengembangan Kawasan Pertanian	VI – 22
6.8	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pendukung Pengembangan Kawasan	VI – 23
6.9	Kebijakan Dan Kebutuhan Dukungan Peraturan Pendukung Pengembangan Kawasan	VI – 23
6.10	Manajemen Budidaya dan Pengembangan	VI – 24
6.11	Pelaku dan Peran Pemangku Kepentingan	VI – 25
6.12	Analisis Model dan Detil Desain Rencana Pengembangan Kawasan	VI – 27
<b>BAB VII.</b>	<b>Roadmap dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan</b>	<b>VII – 1</b>
7.1	Strategi Pengembangan	VII – 1
7.2	Program Pengembangan	VII – 2
7.3	Rencana Aksi Pengembangan	VII – 6

---

BAB VIII.	Kesimpulan dan Saran	VIII – 1
8.1	Kesimpulan	VIII – 1
8.2	Saran	VIII – 4

LAMPIRAN  
DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR GAMBAR**

		Hal
Gambar 1.	Konsep Implementasi Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Pada Lingkup Satu Kabupaten/Kota (Setiyanto, et al., 2012)	III – 3
Gambar 2.	Konsep Implementasi Keterkaitan dan Kerjasama Lintas Kawasan Dalam Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Lingkup Provinsi dan Nasional (Setiyanto, et al., 2012)	III – 5
Gambar 3.	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Selatan	V – 1
Gambar 4.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Rawas	V – 4
Gambar 5.	Persentase Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014	V – 2.2
Gambar 6.	Persentase Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014	V – 2.3
Gambar 7.	Persentase Sebaran Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2014 (dalam %)	V – 4.2
Gambar 8.	Perkembangan Rata-rata Harga Produsen Karet di Sumatera Selatan Tahun 2009 – 2014 (Rp/Kg)	V – 4.2
Gambar 9.	Perkembangan Rata-rata Harga Ekspor Karet di Sumatera Selatan Tahun 2000 – 2014 (Rp/Kg)	V – 7.12
Gambar 10.	Perkembangan Harga Karet Alam dan Minyak Bumi Internasional Tahun 2000 – 2014	V – 7.22
Gambar 11.	Perkembangan Harga Karet Alam dan Minyak Bumi Internasional Bulan Januari 2000 – Oktober 2015	V – 7.23
Gambar 12.	Peta Sebaran Perusahaan Crumb Rubber di Sumatera Selatan	V – 8.1
Gambar 13.	Pohon Industri Karet	V – 8.10
Gambar 14.	Peta Kabupaten/Kota Konsentrasi Pengembangan Kawasan Karet di Sumatera Selatan	V – 12.2
Gambar 15.	Organisasi dan Kelembagaan Pengembangan Kawasan	VI – 14

Gambar 16.	Peran Pemangku Kepentingan Berdasarkan Pelaku dan Pemangku Kepentingan Gambar 15 dan Tabel 56	VI – 26
Gambar 17.	Kerangka Model Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet Provinsi Sumatera Selatan	VI – 28
Gambar 18.	Keterkaitan Antar Program dan Antar Kawasan Dalam Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet	VI - 31

## **DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel 1. Jenis Data dan Sumbernya	IV – 1
Tabel 2. Metode Analisis Data dan Informasi	IV – 3
Tabel 3. Pembagian Administrasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014	V – 2
Tabel 4. Pembagian Administrasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015	V – 2
Tabel 5. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Luas wilayah di Kab. Musi Rawas Tahun 2014	V – 3
Tabel 6. Luas dan Penggunaan Lahan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Ha)	V – 2.2
Tabel 7. Luas Penggunaan Lahan di Wilayah Kabupaten Musi Rawas Menurut Kecamatan Tahun 2014 (Ha)	V – 2.3
Tabel 8. Luas Kabupaten/Kota Berdasarkan Kemiringan Lereng	V – 2.4
Tabel 9. Sebaran dan Luas Kawasan Gambut Menurut Kedalaman	V – 2.8
Tabel 10. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status	V – 2.8
Tabel 11. Arahan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Karakteristik dan Unggulan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	V – 2.9
Tabel 12. Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Sebaran Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2013	V – 3.4
Tabel 13. Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2010 – 2013	V – 3.5
Tabel 14. Batas Wilayah Yang Masih Harus Diselesaikan	V – 3.6
Tabel 15. Luas Penutupan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan 2006-2010 (Ribu Ha)	V – 3.9

---

Tabel 16.	Perubahan Luas Penutupan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan 2006-2010 (Ribu Ha)	V – 3.10
Tabel 17.	Rangkuman Perubahan Luas Penutupan Lahan T di Provinsi Sumatera Selatan 2006-2010 (Ribu Ha)	V – 3.10
Tabel 18.	Indikator Kependudukan Sumatera Selatan 1980 – 2014	V – 4.1
Tabel 19.	Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota 2011 – 2013	V – 4.1
Tabel 20.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota, di Provinsi Sumatera Selatan, 1990-2014 (%)	V – 4.3
Tabel 21.	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan di Provinsi Sumatera Selatan, 2014 (%)	V – 4.4
Tabel 22.	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan 2012 – 2014	V – 4.8
Tabel 23.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 – 2014	V – 4.9
Tabel 24.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan	V – 4.12
Tabel 25.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2012 (%)	V – 4.13
Tabel 26.	Daftar Klon Karet Unggul anjuran Komersial dari Balai Penelitian Karet Sembawa	V – 6.2
Tabel 27.	Perkembangan Rumah Tangga Penggunaan Terlekomunkasi di Sumatera Selatan tahun 2008 – 2012	V – 6.8
Tabel 28.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Sektor (persen), 2010-2014	V – 7.2
Tabel 29.	Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Sumatera Selatan 2010-2013	V – 7.4
Tabel 30.	PDRB Per Kapita Menurut Sektor (Juta Rp), 2010-2014	V – 7.23

---

Tabel 31.	PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2010 - 2013 (Juta Rupiah)	V – 7.24
Tabel 32.	PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha 2010 - 2013 (Juta Rupiah)	V – 7.25
Tabel 33.	Kapasitas Terpasang dan Produksi Riil Pengolahan Crumb Rubber Sumatera Selatan	V – 8.2
Tabel 34.	Perkembangan dan Kontribusi Volume dan Nilai Ekspor Karet Sumatera Selatan Terhadap Indonesia Tahun 2007 - 2013	V – 8.3
Tabel 35.	Produksi dan konsumsi karet sintetis dan karet alam	V – 8.3
Tabel 36.	Perkembangan Neraca Produksi dan Konsumsi Karet Dunia Tahun 2000 – 2014 (Ribu Ton)	V – 8.4
Tabel 37.	Perkembangan Persentase Perubahan Harga, Produksi dan Konsumsi Karet Dunia Tahun 2001 – 2014 (%)	V – 8.4
Tabel 38.	Perkembangan Produksi Karet pada Negara-negara Produsen Karet Dunia tahun 2009 – 2013 (juta Ton)	V – 8.5
Tabel 39.	Perkembangan Produksi Karet pada Negara-negara Produsen Karet Dunia tahun 2009 – 2013 (juta Ton)	V – 8.6
Tabel 40.	Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Data SPP 2013 (Rp. Juta)	V – 8.7
Tabel 41.	Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Sub Sektor dan Sumbernya di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Data SPP 2013 (Rp. Juta)	V – 8.8
Tabel 42.	Lokasi Industri Produk Hilir Karet	V – 8.9
Tabel 43.	Luas Tanaman Karet di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014	V – 12.1
Tabel 44.	Luas Tanaman Menghasilkan, Produktivitas dan Produksi Karet di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014	V – 12.3
Tabel 45.	Potensi Peningkatan Produktivitas Karet Di Sumatera Selatan (Ton/Ha)	V – 12.4

---

Tabel 46.	Potensi Peningkatan Produksi Karet Di Sumatera Selatan Dari Upaya Mengatasi 50 persen Senjang Produktivitas (Ton/Ha)	V – 12.4
Tabel 47.	Luas Lahan Sesuai Untuk Karet dan Potensi Perluasan Areal Tanaman Karet di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015	VI – 3
Tabel 48.	Luas Tutupan Lahan Karet dan Luas Kebun Karet Rumah Tangga Petani di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014	VI – 4
Tabel 49.	Luas Perkebunan Karet Rakyat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 (Ha)	VI – 6
Tabel 50.	Populasi Tanaman dan Rata-rata Jumlah Tegakan Karet Per Ha Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014	VI – 7
Tabel 51.	Luas Areal Perkebunan Karet Rakyat di Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 (Ha)	VI – 7
Tabel 52.	Jumlah Tegakan dan Populasi Tanaman Per Ha di Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 (Pohon)	VI – 8
Tabel 53.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Karet dan Rata-rata Penggunaan Lahan Karet di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014	VI – 10
Tabel 54.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Karet dan Rata-rata Penggunaan Lahan Karet di Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014	VI – 11
Tabel 55.	Perkiraan Pertambahan Serapan Tenaga Kerja Sebagai Akibat Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet (Orang)	VI – 13
Tabel 56.	Lembaga-lembaga Yang Akan Bertindak Sebagai Tim Pembina, Tim Teknis dan Pelaksana Operasional di Lokasi Kawasan	VI – 15
Tabel 57.	Peluang Peningkatan Produktivitas dari Program Intensifikasi di Kecamatan Tuah Negeri	VI – 18
Tabel 58.	Peluang Peningkatan Produksi dari Program Intensifikasi di Kecamatan Tuah Negeri	VI – 19

Tabel 59. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2020.

VII - 7

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan penting dan telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas unggulan pertanian nasional. Peranan karet terhadap perekonomian Indonesia selama ini sangat besar diantara sebagai sumber pendapatan masyarakat terutama petani, kesempatan kerja, bahan baku industri dan sumber devisa negara. Dari sisi pembangunan wilayah, karet memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diwilayah produksi dan juga wilayah-wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati.

Di Indonesia pengusahaan karet menyebar di 24 Provinsi di Indonesia, dan berdasarkan data rata-rata produksi karet di Indonesia periode 2010-2014 terdapat 6 (enam) provinsi yang meyumbang produksi dengan kumulatif mencapai 75,75%, yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sumatera Selatan memberikan kontribusi terbesar yaitu 706.61 ribu ton (23,22 %), Sumatera Utara sebesar 458.26 ribu ton (15,14 %), diikuti Riau 360.04 ton (11,90 %), Jambi 295.87 ribu ton (9,76%), Kalimantan Barat 262.816 ton (8,68%), Kalimantan Tengah 212.79 ribu ton (7,03 %) dan provisi lainnya sebesar 733.78 ton (24,25%) dari rata-rata total produksi produksi Indonesia.

Sebagai produsen terbesar, dinamika produksi karet nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika produksi karet Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka pencapaian target pembangunan pertanian khususnya subsektor perkebunan pada periode 2015 - 2019, Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu lokasi prioritas lokasi pengembangan komoditas karet. Kementerian Pertanian telah menetapkan salah satu kebijakan operasional pembangunan pertanian melalui pendekatan kawasan sebagaimana dituangkan dalam Permentan 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, dan Kepmentan No 46/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Nasional, dimana Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet Nasional.

Penyusunan masterplan dan rencana aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet di Provinsi Sumatera Selatan merupakan

---

suatu kebutuhan penting dan mendesak untuk dilakukan. Penyusunan dokumen masterplan dan rencana aksi ini bernilai sangat strategis karena akan dipakai sebagai landasan operasional dan memandu dalam pentahapan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam rangka mencapai keberhasilan pengembangan ekonomi wilayah dan nasional pada subsektor perkebunan dan khususnya dalam komoditas karet.

Berdasarkan arahan dari program pembangunan Kabupaten Musi Rawas, Pusat Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Karet memiliki pusat pengembangannya di Kecamatan Tuah Negeri dan kecamatan lainnya sebagai pendukung. Dari seluruh kecamatan yang ada, kawasan pendukung berada di empat kecamatan yaitu Kecamatan Muarabeliti, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Sukakarya Dan Kecamatan Muara Kelangi. Berdasarkan hal ini berdasarkan hasil program utama pengembangan kawasan karet setelah kecamatan Tuah Negeri adalah Kecamatan Muarabeliti, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Muara Kelangi.

Program pengembangan kawasan agropolitan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, Pusat Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Karet Berbasis komoditas karet di Kecamatan Tuah Negeri adalah di Desa Lubuk Rumbai. Desa-desa lainnya di Kecamatan Tuah Negeri sebagai wilayah penduduk. Selain Lubuk Rumbai, desa-desa yang memiliki tanaman karet luas adalah Banpres, Bamasko, Petunang, Jaya Bakti dan Air Beliti desa-desa ini merupakan program pengembangan lanjutan dari desa Lubuk Rumbai.

Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet Provinsi Sumatera Selatan merupakan model kawasan terintegrasi secara vertikal dan horisontal. Model integrasi vertikal ditunjukkan dengan upaya untuk mengembangkan produksi BOKAR berkualitas dimana penanganan panen dan pasca panen dilakukan di level petani dengan program peremajaan dan rehabilitasi kebun karet menggunakan benih bermutu tinggi. Petani yang dberdayakan melalui kelompok di mitrakan dengan perusahaan-perusahaan karet yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Pengembangan karet dilakukan dalam rangka mendukung program hilirisasi industri karet dan pengembangan Kawasan Ekonomi

---

Terpadu Tanjung Api-API. Integrasi vertikal juga ditunjukkan dengan upaya pemanfaatan kayu karet dimana dalam skala besar dimitrakan dengan perusahaan pengolah kayu karet dan dalam skala industri kecil di lakukan pembinaan pengolahan kayu karet di lokasi kawasan. Integrasi horisontal diupayakan melalui pengembangan tanaman sela dan budidaya ternak. Integrasi juga mengarahkan upaya untuk mengembangkan keterpaduan antar pelaku dan pemangku kepentingan.

Produk akhir kawasan adalah BOKAR berkualitas tinggi dan kayu karet. Dalam rangka mencapai sasaran produksi tersebut Strategi yang ditempuh dalam pengembangan kawasan perkebunan berbasis karet adalah pengutuhan dan penguatan sistem agribisnis karet. Pengutuhan dimaksudkan agar seluruh komponen subsistem dalam sistem agribisnis ketersediaannya lengkap di lokasi kawasan. Penguatan dimaksudkan agar komponen-komponen dalam subsistem agribisnis diperkuat atau ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu mendorong pertumbuhan kawasan agribisnis. Melalui pengutuhan dan penguatan ini, maka secara keseluruhan sistem agribisnis dapat berjalan dengan terpadu dalam pengembangan kawasan. Pengutuhan dan penguatan dilakukan dalam rangka : (1) Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas karet yang dikembangkan; (2) Meningkatkan aktivitas pasca panen dan kualitas produk karet; (3) Meningkatkan aktivitas pengolahan dan nilai tambah produk karet dan kayu karet; (4) Meningkatkan jaringan pemasaran komoditas karet dan kayu karet; (5) Meningkatkan pendapatan pelaku usaha komoditas karet; (6) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha dibidang agribisnis dan agroindustri karet; (7) Meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan, pasar input dan *output*, teknologi dan informasi agribisnis karet.

Pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet diarahkan pada upaya untuk menciptakan model rehabilitasi dan peremajaan karet rakyat yang diterapkan adalah Model Rehabilitas dan Peremajaan Partisipatif. Berdasarkan rekomendasi program Pusat Penelitian Karet dan Balai Penelitian Sembawa, landasan utama pendekatan partisipatif dalam program rehabilitas dan peremajaan

---

karet rakyat adalah adanya kebutuhan untuk mengubah paradigma pembangunan karet rakyat yang semula menggunakan pendekatan “proyek berbantuan” menjadi “gerakan swadaya masyarakat” (*self-help community development*) atau “pendekatan dari bawah” (*bottom-up approach*). Prinsip dasar pendekatan self-help development adalah mendorong masyarakat untuk belajar mengatasi masalah mereka sendiri dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan.

Landasan dari Model Rehabilitasi dan Peremajaan Karet Rakyat yang dikembangkan adalah Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan pendekatan penerapan: (1) Pendekatan Wilayah meliputi: perbedaan akses informasi, kesiapan kelembagaan dan ketersediaan sarana pendukung; (2) Pendekatan Individu meliputi: perbedaan pengetahuan, ketrampilan, motivasi dan kemampuan finansial. Pendekatan ini sangat tergantung pada karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi petani. Model ini pernah diterapkan pada peremajaan karet rakyat di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, sehingga penerapannya memungkinkan untuk dilakukan dengan berbagai penyesuaian kondisi dan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang ditemukan pada program sebelumnya.

Secara umum rangkuman roadmap dan rencana aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan Masterplan dan Penyusunan Rencana Aksi, yang dilakukan bersamaan dengan penyelesaian Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Peraturan Gubernur dan Bupati atau Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet berikut rencana penganggaran APBD Provinsi dan Kabupaten Kota; dan Surat Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai Tim Teknis Pengembangan Kawasan dan pengalokasi kantor kesekretariatan dan pengalokasian dan pengelolaan asetnya yang terkait dengannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak, kebijakan dan peraturan pendukung yang dibutuhkan diantaranya adalah upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investasi, pemberian sertifikasi lahan, bibit mutu, kebun dan hasil olahan

- dengan biaya ringan dan prosedur mudah, jaminan kemudahan dalam peroleh kredit dan kemudahan dalam ekspor dan pemasaran hasil (2016-2017)
2. Persiapan Operasional Perkantoran, Kesekretariatan dan Perekutan Kebutuhan SDM Pendukung Kawasan (2016 – 2019)
  3. Pelaksanaan Model Integrasi Tanaman dan Ternak dan Persiapan Pelatihan Industri Kayu Karet dan Peningkatan Mutu Hasil Panen (2016)
  4. Operasional Kegiatan Pengembangan Kawasan Tahun 1 dan Penyusunan Masterplan dan Rencana Aksi Kabupaten Berikutnya (2017)
  5. Pengembangan Kawasan Tahun 2, Perluasan kawasan di Kecamatan Tuah Negeri dan Persiapan Pengembangan Kawasan Kabupaten Lainnya (2018)
  6. Pengembangan Kawasan Tahun 3, dan Perluasan Pengembangan di Kecamatan Lain di Kabupaten Musi Rawas dan Pengembangan Kawasan Kabupaten lainnya Tahun 1 (2019)
  7. Finalisasi Pengembangan Kawasan Kabupaten Musi Rawas dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Kabupaten Lain Tahun 2 (2020)

Rancangan model rehabilitasi dan peremajaan karet rakyat secara partisipatif yang merupakan program inti dari pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet melibatkan banyak pihak, yaitu petani/koperasi, investor, instansi terkait, lembaga penelitian, perbankan dan Pemda. Agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, maka untuk pelaksanaan di daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Project Management Unit (PMU) yang beranggotakan semua pihak yang terkait. Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, maka pihak-pihak yang terlibat serta tugas dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Lokasi Operasional Kawasan. Sumber pendanaan untuk peremajaan karet rakyat dapat berasal dari : (1) Dana pemerintah baik APBN maupun APBD; (2) Kredit perbankan; (3) Hasil penjualan kayu karet; (4) Swasta dan GAPKINDO; dan (5) Swadaya petani.

Seluruh lembaga yang berada dalam organisasi dan kelembagaan pengembangan perlu mengarahkan dukungan penuh dalam upaya pemberdayaan

---

petani dan lembaga petani (Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani) dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuannya untuk memproduksi BOKAR dan Kayu Karet secara yang memiliki kuantitas dan kualitas kontinyu dan bernilai tambah tinggi. Keberhasilan pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet memerlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kepentingan. Diperlukan koordinasi dan konsolidasi bersama-sama antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan peningkatkan pasokan karet untuk industri dan ekspor, mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah baik pusat maupun daerah, peranan swasta juga sangat diperlukan. Jika masing-masing pihak ini dapat saling mendukung dan selaras dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka pengembangan kawasan karet dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan dokumen ini selanjutnya Dinas Perkebunan Kabupaten dan instansi terkait menyusun rencana aksi kegiatan operasional level Kabupaten dan Dinas Perkebunan Provinsi berserta instansi terkait menyusun rencana aksi untuk landasan kegiatan operasional level provinsi. Volume kegiatan mengikuti formulasi hasil analisis pada analisis perencanaan pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet dengan nilai kebutuhan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan penting dan telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas unggulan pertanian nasional. Peranan karet terhadap perekonomian Indonesia selama ini sangat besar diantara sebagai sumber pendapatan masyarakat terutama petani, kesempatan kerja, bahan baku industri dan sumber devisa negara. Dari sisi pembangunan wilayah, karet memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diwilayah produksi dan juga wilayah-wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati.

Dari sisi ekspor komoditas perkebunan ekspor karet menempati urutan kedua setelah kelapa sawit. Data statistik perdagangan luar negeri ekspor BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa volume ekspor karet Indonesia tahun 2014 sebesar 2.62 juta ton dengan nilai sebesar 4.74 juta US\$. Di Indonesia pengusahaan karet menyebar di 24 Provinsi di Indonesia, dan berdasarkan data rata-rata produksi karet di Indonesia periode 2010-2014 terdapat 6 (enam) provinsi yang meyumbang produksi dengan kumulatif mencapai 75,75%, yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sumatera Selatan memberikan kontribusi terbesar yaitu 706.61 ribu ton (23,22 %), Sumatera Utara sebesar 458.26 ribu ton (15,14 %), diikuti Riau 360.04 ton (11,90 %), Jambi 295.87 ribu ton (9,76%), Kalimantan Barat 262.816 ton (8,68%), Kalimantan Tengah 212.79 ribu ton (7,03 %) dan provisi lainnya sebesar 733.78 ton (24,25%) dari rata-rata total produksi produksi Indonesia.

Sebagai produsen terbesar, dinamika produksi karet nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika produksi karet Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka pencapaian target pembangunan pertanian khususnya subsektor perkebunan pada periode 2015 - 2019, Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu lokasi prioritas lokasi pengembangan komoditas karet. Kementerian Pertanian telah menetapkan salah satu kebijakan operasional pembangunan pertanian melalui pendekatan

kawasan sebagaimana dituangkan dalam Permentan 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, dan Kepmentan No 46/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Nasional.

Berdasarkan Permentan No 50/2012, secara garis besar implementasi pengembangan kawasan pertanian dapat dibagi ke dalam tahap: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan urutan tahapan sebagai berikut: (1) pembentukan organisasi pelaksana, (2) penentuan komoditas, (3) penentuan lokasi kawasan kabupaten/kota, (4) penyusunan *Master Plan* pengembangan kawasan, (5) penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan, (6) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup provinsi, (7) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup Eselon I Kementerian Pertanian, (8) pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan, (9) monev dan pelaporan dan (10) penyusunan database pengembangan kawasan. Berdasarkan Kepmentan No 46/2015 setiap daerah yang ditetapkan sebagai lokasi kawasan pertanian wajib menyusun Masterplan dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian.

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan masterplan dan rencana aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet di Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu kebutuhan penting dan mendesak untuk dilakukan. Penyusunan dokumen masterplan dan rencana aksi ini bernilai sangat strategis karena akan dipakai sebagai landasan operasional dan memandu dalam pentahapan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam rangka mencapai keberhasilan pengembangan ekonomi wilayah dan nasional pada subsektor perkebunan dan khususnya dalam komoditas karet.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Kegiatan ini adalah untuk menyusun dokumen perencanaan berupa Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk :

1. Melakukan inventarisasi data dan informasi potensi sumberdaya dan peluang pengembangan agribisnis dalam pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan
2. Menganalisis potensi sumberdaya dan peluang pengembangan agribisnis dalam pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan
3. Menyusun peta potensi sumberdaya, peluang dan wilayah pengembangan kawasan kawasan perkebunan berbasis karet di Provinsi Sumatera Selatan
4. Menyusun perencanaan pengembangan kawasan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan
5. Menyusun dokumen masterplan, road map dan rencana aksi pengembangan kawasan perkebunan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan

### **1.3. Output**

Output atau hasil yang diharapkan dari kegiatan kajian Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet di Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Hasil inventarisasi data dan informasi potensi sumberdaya dan peluang pengembangan agribisnis dalam pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan
2. Hasil analisis potensi sumberdaya dan peluang pengembangan agribisnis dalam pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan
3. Peta potensi sumberdaya, peluang dan wilayah pengembangan kawasan kawasan perkebunan berbasis karet di Provinsi Sumatera Selatan
4. Rencana pengembangan kawasan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan

5. Dokumen masterplan, road map dan rencana aksi pengembangan kawasan perkebunan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan

#### **1.4. Sasaran**

Sasaran kegiatan terdiri dari:

1. Tersedianya landasan operasional dan panduan dalam pentahapan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mencapai keberhasilan pengembangan ekonomi wilayah dan nasional umumnya pada subsektor perkebunan dan khususnya komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Terdesediaanya dukungan perencanaan wilayah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang terkait dengan pencapaian target dan perlindungan lahan berkelanjutan bagi komoditas strategis nasional guna mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani berbasis komoditas karet khususnya di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Terumuskannya instrumen untuk mendukung perencanaan wilayah bagi Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan operasional dalam merencanakan dan mengimplementasikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah pengembangan komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Terumuskannya bahan koordinasi lintas sektoral dan lintas jenjang pemerintahan dalam meningkatkan daya saing wilayah dan komoditas unggulan pertanian nasional
5. Ditetapkannya lokasi-lokasi pengembangan kawasan berbasis komoditas karet baik pada level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan

6. Tercapainya MOU antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.5. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan terdiri dari ruang lingkup kegiatan dan ruang lingkup atau cakupan obyek survey.

### **1.5.1. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan terdiri dari:

1. Survey pengumpulan dan pemetaan data dan informasi;
2. Kegiatan wawancara pelaku usaha, stakeholder dan kelompoktani dan *Focus Group Discussion* (FGD)
3. Penetapan wilayah kawasan perkebunan berbasis komoditas karet yang dikembangkan
4. Pengolahan dan analisis data dan informasi: (a) potensi sumberdaya dan peluang pengembangan agribisnis dalam pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan; (b) pemetaan dan sistem informasi geografis potensi sumberdaya, peluang dan wilayah pengembangan kawasan kawasan perkebunan berbasis komoditas di Provinsi Maluku Utara; dan (c) analisis perencanaan pengembangan kawasan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan; dan
5. Penyusunan dokumen masterplan, road map dan rencana aksi pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.5.2. Ruang Lingkup Obyek Survey**

Ruang lingkup obyek survey terdiri dari :

1. Obyek wilayah yaitu wilayah yang telah ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan perkebunan berbasis komoditas karet berdasarkan Kepmenan no 46/2015 yaitu Kabupaten Musi Rawas.
2. Obyek pelaku usaha dan stakeholder; diantaranya petani, kelompok tani, perusahaan, asosiasi, dan instansi terkait.

## **BAB II      VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN BERBASIS KOMODITAS KARET PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **2.1. Lokasi Kawasan**

Di Sumatera Selatan terdapat 7 Kabupaten memiliki kontribusi besar terhadap produksi Sumatera Selatan mencapai yaitu Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Musi Banyu Asin, Banyu Asin dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kabupaten tersebut memiliki kontribusi 85,57 persen terhadap luas areal dan 88.77 persen terhadap produksi karet Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013. Berdasarkan Kepmenan No 46/2015, Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebagai salah satu kawasan perkebunan nasional berbasis komoditas karet. Hasil kajian terhadap RTRW Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya perkebunan dengan komoditas unggulan karet. Kajian ini secara umum akan memuat informasi wilayah kabupaten yang merupakan wilayah produksi terbesar karet di Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian fokus analisis hanya akan dilakukan pada Kabupaten Musi Rawas, karena Kabupaten ini merupakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan nasional berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Musi Rawas memiliki 7 dari 14 kecamatan yang merupakan produsen utama karet. Tujuh kecamatan tersebut memiliki kontribusi sebesar 84.04 persen terhadap total luas areal karet di Kabupaten Musi Rawas, yaitu kecamatan BTS Ulu, Muara Lakitan, STL Ulu, TPK, Tuah Negeri, Megang Sakti dan Jaya Loka. Pengembangan Karet dipusatkan di wilayah Kecamatan Tuah Negeri dan didukung oleh 6 kecamatan produsen utama dan 7 kecamatan non produsen utama atau 13 kecamatan lainnya.

## **2.2. Visi dan Misi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet**

Pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet memiliki Provinsi Sumatera Selatan memiliki visi : **Mewujudkan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet Di Provinsi Sumatera Selatan yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing Internasional dan Berkelanjutan** . Secara rinci visi tersebut memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Maju mengandung makna bahwa pengembangan kawasan perkebunan karet Sumatera Selatan diarahkan untuk mengalami kemajuan dalam penggunaan teknologi dan inovasi.
2. Mandiri mengandung makna bahwa pengembangan kawasan perkebunan perkebunan karet Sumatera Selatan memiliki perhatian peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat kemadirian tinggi.
3. Berdaya Saing Internasional mengandung makna bahwa hasil produksi kawasan perkebunan karet dapat bersaing dengan produk perkebunan karet dari negara penghasil karet lain.
4. Sejahtera mengandung makna bahwa pengembangan kawasan perkebunan karet Sumatera Selatan diarahkan untuk dapat meningkatkan kehidupan masyarakat lebih bermartabat.
5. Berkelanjutan mengandung makna pembangunan perkebunan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kaidah berwawasan lingkungan dan kelestarian alam.

Berdasarkan visi tersebut, pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet Provinsi Sumatera Selatan memiliki misi sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan informasi, dan peningkatan peran kelembagaan perkebunan karet.
  2. Memfasilitasi Penyediaan bahan Baku Industri karet yang Berdaya Saing Internasional.
  3. Mendorong Pengoptimalan Pemanfaatan Lahan dan Pelestarian Lingkungan, serta
  4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan karet.
-

## **2.3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet**

Pengembangan kawasan berbasis komoditas karet memiliki tujuan sekaligus sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola perkebunan karet dan kapasitas kelembagaan perkebunan karet;
2. Mengembangkan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi dan inovasi perkebunan karet yang handal;
3. Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil perkebunan karet;
4. Meningkatkan investasi pembangunan perkebunan karet yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan perkebunan karet yang unggul dan berdaya saing

Sesuai dengan tujuan dan sasaran di atas, pengembangan kawasan berbasis komoditas karet memiliki arah kebijakan pengembangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perkebunan yang unggul dan memiliki daya saing;
2. Membangun kelembagaan keuangan mikro agribisnis pedesaan berbasis penguatan modal usaha kelompok dan kemitraan usaha;
3. Meningkatkan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Perlindungan Usaha Perkebunan Karet yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan jejaring pasar hasil / produk perkebunan karet tingkat lokal, domestik dan internasional;
5. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung diwilayah pengembangan kawasan perkebunan Karet;
6. Mengembangkan tingkat adopsi dan diseminasi teknologi dan inovasi dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha agribisnis kawasan perkebunan karet;
7. Mengembangkan perbenihan dan fasilitasi sertifikasi benih/bibit untuk menjamin kualitas benih/bibit yang beredar dimasyarakat;
8. Meningkatkan mutu hasil panen dan mengembangkan sertifikasi dan standarisasi mutu produksi perkebunan karet.

9. Mengembangkan diversifikasi usaha perkebunan karet secara vertikal dan horisontal dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani
10. Meningkatkan kualitas kebijakan sehingga kondusif bagi iklim investasi dan kemitraan usaha bagi para pelaku usaha agribisnis karet.

---

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN BERBASIS KOMODITAS KARET**

#### **3.1. Landasan Teori Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas**

Sesungguhnya pendekatan kawasan pembangunan pertanian bukanlah suatu pendekatan yang sama sekali baru. Pendekatan kawasan dalam pembangunan pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan sebelum penjajahan, masa penjajahan kolonial Belanda, masa kemerdekaan dan pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu pendekatan kawasan lebih merupakan upaya reorientasi manajemen pembangunan pertanian yang merubah cara pandang pembangunan pertanian dari sudut pandang sentra produksi yang segregatif menjadi cara pandang kawasan yang memiliki ciri kerja sama jaringan kelembagaan antar wilayah dengan komoditas unggulan sebagai perekat utamanya. Melalui pendekatan kawasan ini daya saing wilayah dan komoditas akan dapat dirancang secara optimal, karena dirumuskan sesuai dengan potensi dan prospek daya dukung sumberdaya wilayah hingga mencapai titik optimumnya.

Kawasan komoditas unggulan yang dikembangkan pada masing-masing kabupaten/kota harus terintegrasi dengan kawasan-kawasan lain yang ada didalamnya dan komoditas unggulan yang dikembangkan merupakan komoditas yang terpilih pada sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota, khususnya untuk komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Oleh karenanya terdapat prinsip-prinsip tertentu dalam pengembangan kawasan pertanian yang mencakup diantaranya: (1) setiap kawasan harus memiliki spesialisasi dan kompetensi inti dalam pengembangan komoditas unggulan masing-masing; (2) terdapat kegiatan subsektor hulu dan hilir yang dapat menjadi pendorong pengembangan komoditas unggulan yang memiliki kemampuan daya saing; (3) mempunyai keterkaitan antara pengembangan subsistem usahatanikomoditas dengan subsistem agribisnis hulu dan hilir, serta penunjangnya; (4) memiliki fokus pengembangan kepada produk yang memiliki nilai tambah dan kontribusi yang tinggi

---

---

dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah; (5) memiliki fokus pengembangan kepada produk yang berdaya saing dan berorientasi pada pasar regional, nasional dan ekspor dalam rangka swasembada, swasembada berkelanjutan maupun ekspor; (6) memiliki sinergitas antar program, antar kawasan dan antar wilayah; (7) perlunya peran pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator; (8) perlunya dukungan penempatan kawasan komoditas unggulan dalam tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

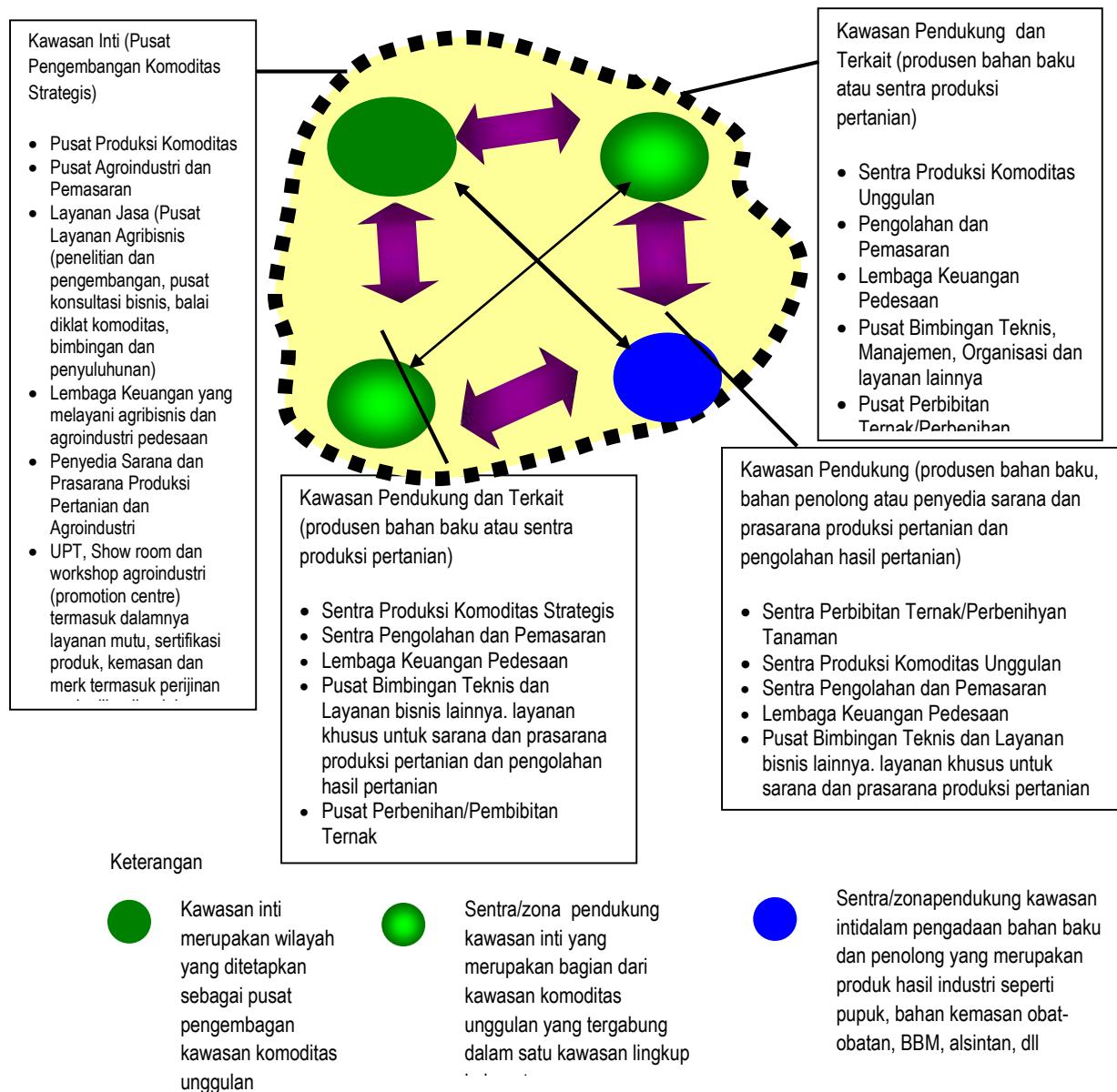
Pengembangan kawasan komoditas unggulan yang memiliki keterkaitan erat dengan kawasan-kawasan yang telah dibentuk sebelumnya, mengarahkan sektor non pertanian khususnya sektor industri, perdagangan dan pariwisata dapat ditempatkan sebagai faktor pendorong sekaligus penarik pengembangan kawasan pertanian dalam pengembangan komoditas unggulan. Keterkaitan ini akan mendorong terjadinya spesialisasi dan kompetensi inti dari kawasan komoditas unggulan, dimana pengembangan komoditas dapat diarahkan mulai dari hulu hingga hilir mengikuti pohon industri dari masing-masing komoditas unggulan. Pengembangan produk dari masing-masing komoditas perlu diarahkan pada produksi yang paling tinggi nilai tambahnya.

Upaya untuk menciptakan suatu kawasan pengembangan komoditas unggulan tertentu sebagai kompetensi inti dari suatu wilayah memerlukan keterkaitan erat antar kawasan sebagai penyedia sarana produksi, penyedia bahan baku utama agroindustri, pusat-pusat yang ditetapkan sebagai pusat promosi dan pemasaran serta layanan bisnis sebagai kawasan inti atau pusat pengembangan dan wilayah-wilayah sumber bahan baku dan penolong dari produk-produk hasil industri seperti benih/bibit, pupuk, kemasan, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan alat dan mesin pertanian dan pengolahan hasil pertanian serta layanan usaha lainnya. Kerangka konsep pendekatan implementasi pengembangan kawasan pertanian dalam pengembangan komoditas unggulan disajikan pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1, arah implementasi pengembangan kawasan komoditas unggulan adalah *pertama*, mendorong konsep pengembangan satu kawasan satu komoditas unggulan utama (satu kawasan satu kompetensi inti/komoditas unggulan). Dalam hal ini bukan berarti hanya satu komoditas saja yang dapat dikembangkan

---

namun demikian perlu ditetapkan satu komoditas utama tanpa harus meninggalkan komoditas lainnya. *Kedua*, penetapan pusat pengembangan kawasan yang dijadikan pusat layanan pengembangan, selanjutnya sentra-sentra disekitarnya digabungkan menjadi bagian sebuah satuan kesatuan kawasan yang utuh sehingga mencakup wilayah yang lebih luas dan mencapai skala efisiensi kawasan.



**Gambar 1. Konsep Implementasi Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Pada Lingkup Satu Kabupaten/Kota (Setiyanto, et al., 2012)**

*Ketiga*, mendorong keterkaitan usaha pengembangan komoditas unggulan pada setiap sentra dalam kawasan dengan pusat distribusi bahan baku dan penolong

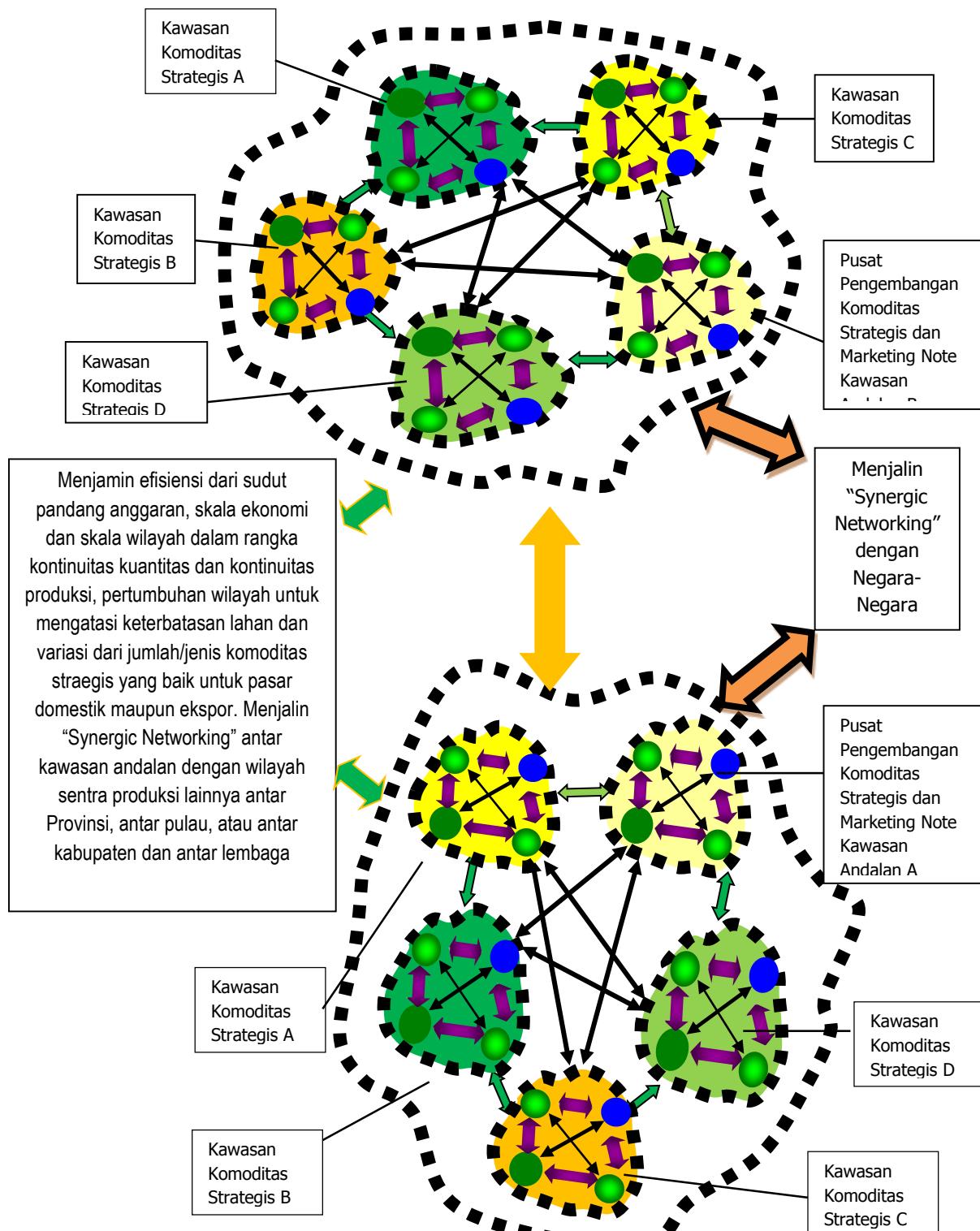
---

serta kebutuhan sarana lainnya yang umumnya terletak pada kawasan lain yang telah terbentuk sebelumnya dan menggerakkan pusat-pusat tersebut mampu melayani hingga lokasi terdekat petani. *Keempat*, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di setiap kawasan inti dalam pola klaster pengembangan yang akan diposisikan sebagai simpul pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan. *Kelima*, meningkatkan aksesibilitas dan jaringan interaksi: informasi, transportasi, telekomunikasi dan jaringan kemitraan dan aliran produk antara pusat penyebarluasan dengan sentra atau zona kawasan pendukung. *Keenam*, disamping dilakukan upaya perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, terminal, pusat promosi dan pasar serta infrasatruktur lainnya seperti jaringan air dan listrik, diperlukan infrasatruktur lainnya yaitu Pusat Layanan Agribisnis yang memberikan bantuan teknis budidaya, layanan mutu, sertifikasi produk, kemasan dan merk termasuk perijinan usaha jika diperlukan. *Ketujuh*, pengembangan infrastruktur dalam rangka pengembangan kawasan harus dilakukan secara terpadu sehingga mampu mengurangi disparitas pertumbuhan antar kawasan inti perlu dilakukan upaya untuk mendorong pola perkembangan yang lebih seimbang dan serasi antar sentra. Hal ini berarti bahwa dalam upaya peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan melalui pengembangan spesialisasi dan kompetensi inti dapat dilakukan melalui sistem agribisnis terpadu dengan pendorong utama atau lokomotif pengembangan adalah pengembangan agroindustri dan pemasaran hasil yang didukung oleh subsistem hulu dan penunjangnya.

Dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani, daya saing dan ekspor diperlukan suatu penataan secara nasional tanpa meninggalkan semangat otonomi daerah, sehingga pusat pengembangan kawasan dilakukan dalam lingkup satu kabupaten atau beberapa kecamatan dalam kabupaten. Sementara itu dalam menjaga jaringan kerjasama antar wilayah kabupaten dan sesuai dengan penetapan kawasan andalan, Peraturan Menteri Pertanian No 50 Tahun 2012, Balai Penelitian Komoditas, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) atau UPT di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Eselon I serta instansi lainnya maka keterkaitan antar kawasan sentra kabupaten satu dengan lainnya dengan dalam satu kawasan andalan atau antara

---

kawasan andalan dengan lainnya perlu dibangun. Kerangka konsep implementasi pengembangannya seperti dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Konsep Implementasi Keterkaitan dan Kerjasama Lintas Kawasan Dalam Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Lingkup Provinsi dan Nasional (Setiyanto, et al., 2012)**

---

Berdasarkan Gambar 2, konsep implementasi pengembangan kawasan komoditas unggulan, selain harus memperhatikan hubungan pusat dan daerah, upaya pengembangan kawasan komoditas unggulan perlu dilakukan dalam kerangka kerjasama antar pusat pengembangan kawasan (Kawasan Inti) dan antara kawasan andalan dalam upaya menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah dan upaya untuk mengembangkan jaringan pasar, lokal, regional dan nasional hingga internasional. Pengembangan kawasan unggulan tidak semata-mata mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan tetapi seluruh empat target sukses Kementerian dengan menempatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor menjadi urutan pertama, baru selanjutnya diikuti oleh target yang lainnya.

Secara umum implementasi pengembangan kawasan komoditas unggulan adalah sebagai berikut: *pertama*, pengembangan kegiatan ekonomi dan produk dari komoditas unggulan pada kawasan dilakukan dengan pendekatan pengembangan ekonomi yang terkait dengan permintaan komoditas utama dalam rangka memenuhi permintaan lokal, regional, nasional dan ekspor (*market based oriented*).

*Kedua*, upaya peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing dan pendapatan petani dilakukan dengan mendorong pengembangan kompetensi inti dan komoditas unggulan yang unik dan spesifik sebagai sumber kekuatan daya saing wilayah dalam konteks regional dan global/international.

*Ketiga*, upaya peningkatan produksi, nilai tambah, daya saing dan pendapatan petani yang dikaitkan dengan kerjasama antar kawasan dalam upaya menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah dan upaya untuk mengembangkan jaringan pasar hingga internasional memerlukan penetapan salah satu kawasan sebagai pusat yang diposisikan sebagai 'strategic marketing node' atau "*pusat pemasaran yang strategis*" dalam upaya untuk menembus pasar luar daerah, domestik dan internasional.

*Keempat*, upaya peningkatan produksi, nilai tambah dan pendapatan petani pada kawasan satu perlu didukung oleh upaya peningkatan aksesibilitas dan jaringan interaksi, pemasaran, distribusi, informasi, transportasi, telekomunikasi antara kawasan satu dengan kawasan lainnya dan satu kawasan dengan lokasi "*pusat*

---

---

*pemasaran yang strategis*" dalam satu kawasan. Konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa tidak setiap kabupaten kota harus memiliki pusat pengolahan dan pemasaran. Sebagai contohnya adalah kabupaten Blitar yang memiliki perkebunan Karet cukup luas tidak memerlukan pendirian pabrik gula karena pabrik gula dan pusat pemasarannya ada di Malang.

*Kelima*, fasilitasi, mediasi dan advokasi dalam kaitannya dengan teknologi, informasi, mutu produk, pasar dan permodalan serta sarana dan prasarana produksi untuk mendorong kerjasama yang saling menguntungkan antar kasawan inti untuk mendorong terbentuknya "*synergic networking*" antara kawasan dengan wilayah lainnya terutama di tingkat kabupaten, Provinsi, antar pulau, nasional, maupun internasional serta antara pelaku usaha dengan jaringan eksportir dalam negeri dan importir luar negeri perlu dilakukan.

*Keenam*, berdasarkan kerangka implementasi ini dapat ditemukan suatu benang merah dimana disamping pentingnya kerjasama antar kawasan, kapasitas dan kemampuan lembaga yang berperan sebagai fasilitator, mediator dan advokasi serta bimbingan teknis dan teknologi secara kontinyu. Upaya memperkenalkan ciri khas produk dan citarasa yang spesifik dapat dilakukan melalui pengembangan produk (*product development*) dan promosi produk (*product promotion*).

*Ketujuh*, dalam rangka meningkatkan kinerja pengembangan kawasan komoditas unggulan diusulkan agar pemerintah dapat membantu para petani, pengusaha dan pelaku agribisnis didaerah untuk mempercepat keberhasilan usaha komoditas unggulan. Usulan ini merupakan konsekuensi logis dari implementasi pengembangan usaha dalam format klaster agribisnis. Klaster agribisnis yang berpijak pada pengelompokan sejumlah usaha yang mempunyai misi dan tujuan yang sama ini saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan yang lebih tinggi. Untuk keperluan tersebut, suatu organisasi antar instansi perlu dibentuk dengan satu tujuan, yaitu mengawal berbagai instrumen kebijakan pengembangan komoditas unggulan. Dalam usaha komoditas unggulan terdapat sejumlah pihak yang berkaitan dan berkepentingan (*stakeholders*) yang kontribusinya sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan.

---

---

### **3.2. Kerangka Pemikiran Penyusunan Masterplan, Road Map dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet**

*Master Plan* pengembangan kawasan pertanian adalah rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian nasional di tingkat provinsi. Penyusunan *Master Plan* pengembangan kawasan pertanian berpedoman, mengacu dan memperhatikan:(1) dokumen perencanaan jangka menengah nasional di bidang pertanian (Rencana Strategis Kementerian Pertanian/Renstra K/L dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian); (2) dokumen perencanaan jangka menengah daerah di bidang pertanian (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Renstra-SKPD di bidang pertanian). Ruang lingkup komponen isi dari *Master Plan* pengembangan kawasan pertanian adalah: (1) isu-isu strategis; (2) skenario arah kebijakan; (3) strategi pengembangan; dan (4) tujuan dan sasaran pengembangan jangka menengah (5 tahun).

Rencana Aksi (*action plan*) adalah rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan secara lebih operasional *Master Plan* yang telah disusun. Rencana Aksi merupakan rencana detail kawasan pertanian di kabupaten/kota yang disusun setiap tahun dan kemudian direkap untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disusun dalam bentuk matriks rencana program yang komponen isinya mencakup: (1) jenis kegiatan dan volume; (2) lokasi (kecamatan/desa); (3) jadwal pelaksanaan; (4) satuan kerja pelaksana; (5) proyeksi kebutuhan dan sumber pendanaan; (6) Indikator *output* dan *outcome*. Jenis kegiatan dalam matriks rencana aksi disusun menurut nomenklatur kegiatan yang ada di Kementerian Pertanian berdasarkan aspek subsystem agribisnis yang ada. Selanjutnya jadwal pelaksanaan dapat diartikan suatu agenda tentatif mulai dari pengajuan proposal kegiatan dan anggaran yang akan dibahas pada forum perencanaan, hingga ke tahap implementasi kegiatan di lapangan.

## BAB IV. METODOLOGI/METODE KAJIAN

### 4.1. Jenis Data dan Sumbernya

Data dan informasi penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui survei dan wawancara terhadap responden baik petani, kelompok tani, peneliti, penyuluh, pemandu lapangan, pedagang, kelompok tani, perusahaan pengolahan karet dan asosiasi. Jenis data dan informasi yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Data dan Sumbernya

No	Aspek	Jenis Data dan Informasi	Sumber Data
1	Kondisi Umum Wilayah	Letak geografis, batas wilayah, cakupan administrasi pemerintahan, luas wilayah menurut jenis tanah, dan lain-lain	BPS Provinsi dan Kabupaten, BBSDLP, Hasil Survey
2	Agroekologis dan Lingkungan	Potensi sumberdaya lahan (tata guna lahan) dan agroklimat (suhu, iklim, angin, curah hujan, penyinaran, dan lain-lain) dan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukkan pertanian dalam RTRW (Buku RTRW Provinsi dan Kabupaten /Kota)	BMG, BPS, BAPPEDA dan Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, Hasil Pemetaan
3	Gangguan Produksi	Gangguan produksi pertanian selama ini seperti bencana alam, resiko serangan OPT, banjir, kekeringan dan lain-lain, termasuk kerawakan konflik, gangguan kemanan, dan sengketa lahan	BPS, dan Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, hasil survey, wawancara dan FGD
4	Kependudukan dan Sosial Budaya	Perkembangan jumlah penduduk, jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan, jumlah penduduk miskin, dan rata-rata penguasaan lahan pertanian dan lain-lain	BPS, dan Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten
5	Kelembagaan	Kelembagaan pertanian dari sisi pemerintahan (SKPD terkait pertanian), Kelompok Tani, Gapoktan, Perusahaan, Koperasi, dan kemitraan usaha, jumlah penangkar, jumlah lembaga distribusi dan pengadaan input, pemasar, asosiasi komoditas dan lain-lain	BPS, dan Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, Hasil surveywawancara dan FGD
6	Sarana Prasarana Penunjang	Jaringan irigasi, potensi pengairan, lahan, modal, benih, pupuk, jaringan jalan, transportasi, ketersedian alsin, kapasitas terpasang dan riil pengolahan hasil, dan sarana penunjang lainnya seperti diklat perguruan tinggi, litbang, telekomunikasi dan informasi, pasar komoditas, dan lain-lain	BPS, dan Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten , Hasil survey, wawancara dan FGD

No	Aspek	Jenis Data dan Informasi	Sumber Data
7	Ekonomi dan Perekonomian	Kontribusi sektor pertanian, subsektor perkebunan dan komoditas unggulan dalam perekonomian wilayah, perkembangan harga, perkembangan kredit, suku bunga, pendapatan petani, analisis usahatani, satuan biaya dan kebutuhan investasi dan lain-lain	BPS, dan Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, hasil survey dan wawancara dan FGD
8	Konsumsi dan Perdagangan Hasil Pertanian	Perkembangan produksi dan penggunaanya untuk pemenuhan dalam wilayah, pemasaran luar wilayah dan ekspor; bagaimana jalur perdagangan, siapa pelakunya, besaran nilai tambah, sebaran industri pengolahan dan industri pengolahan potensial	BPS, Dinas Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten, Hasil Survey dan wawancara dan FGD
9	Teknis Teknologis	Mutu, standarisasi, tingkat aplikasi teknologi saat ini dan potensinya ke depan, ketersediaan lembaga penyedia teknologi, akses informasi dan lain-lain	BPS, BPTP, Dinas Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten, Hasil Survey dan wawancara dan FGD
10	Sumber Daya Manusia	Jumlah SDM yang Menangani Pelayanan Pertanian dan kuantitas dan kualitasnya (Pegawai Pertanian, Penyuluh, Pendamping dan Lain-lain) dalam rangka pengembangan kawasan	BPS, BPTP, Bappeluh, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, hasil survey dan wawancara dan FGD
11	Kebijakan	Kebijakan dari pusat hingga kabupaten/kota terkait agribisnis (Keputusan Gubernur, Bupati, Peraturan Daerah Terkait Pengembangan Kawasan) dan lain-lain	BAPPEDA, SEKDA, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten dan hasil survey, wawancara dan FGD
12	Perkembangan Pertanian	Luas areal eksisting, Produksi dan Produkitas dan Potensi peningkatannya, serta posisi pertanian diantara subsektor lainnya arahnya apakah kawasan pertanian saja atau harus dikembangkan dengan agrowisata, dan lainnya	BPS, dan Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, dan hasil survey, wawancara dan FGD

## **4.2. Metode Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data;**

### **4.2.1. Pengumpulan data dan Informasi**

Pengumpulan data dan informasi dilakukan survey atau kunjungan instansi dan lapangan, Wawancara, FGD dan internet browsing.

### **4.2.2. Pengolahan dan Analisis**

Data dan informasi diolah dan dianalisis dengan berbagai metode analisis kuantitatif dan kualitatif dengan rincian pada Tabel 4-2.

**Tabel 2. Metode Analisis Data dan Informasi**

No	Cakupan Analisis	Metoda Pengolahan dan Analisis data dan Informasi
1	Kesesuaian Lahan dan Agroklimat dan Ketersediaan untuk pengembangan Kawasan dan Perluasan Areal	Analisis Kesesuaian Lahan dan Agroklimat dan Ketersediaan untuk pengembangan Kawasan dan Perluasan Areal; Upaya Intensifikasi, Peremajaan, Rehabilitasi, dll; Pengendalian OPT dan Gangguan Produksi; Rekomendasi : Besaran Peluang Pengembangan; Program dan Kegiatan;
2	Kependudukan, Ketenaga Kerjaan dan Sosial Budaya	Analisis Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial Budaya untuk meningkatkan Kualitas SDM dan menghitung Kebutuhan Dukungan Tenaga Kerja dan Kontribusi Kawasan Dalam Menyerap Tenaga Kerja (dari Potensi Yang tersedia berapa besaran yang diperlukan untuk ditingkatkan); Rekomendasi Program dan Kegiatan
3	Kelembagaan	Aalysis penyusunan Format/Model pengembangan kelembagaan usaha petani dan pelaku agribisnis dan kebutuhan pengembangan dan pembinaannya; Rekomendasi Program dan Kegiatan
4	Sarana dan Prasarana Penunjang	Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan pengembangan serta dukungan sektor non pertanian; Rekomendasi Program dan Kegiatan
5	Ekonomi dan Perekonomian	Analisis potensi dan peluang kawasan dalam meningkatkan produksi, nilai tambah, ekspor, pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah dan Kebutuhan investasi alokasi sumber pembiayaan; Rekomendasi Program dan Kegiatan
6	Konsumsi, Pengolahan, Pemasaran dan Perdagangan Hasil Pertanian	Analisis peningkatan kapasitas pengolahan hasil dan peningkatan pemasaran dan perdagangan antara wilayah dan ekspor; Rekomendasi Program dan Kegiatan
7	Teknis dan Teknologis	Analisis evaluasi dan penyediaan kebutuhan teknologi, standarisasi, mutu, laboratorium dan peningkatan kapasitas adopsi teknologi; Rekomendasi Program dan Kegiatan
8	Sumber Daya Manusia Pendukung Pengembangan	Analisis kebutuhan dan ketersediaan pendamping, penyuluhan, pengembang dan sebagainya; Rekomendasi Program dan Kegiatan
9	Kebijakan dan kebutuhan dukungan peraturan dan kebijakan	analisis Kebutuhan Dukungan Kebijakan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, peraturan pusat dan daerah; Rekomendasi Program dan Kegiatan
10	Pengembangan Pertanian untuk implementasi sistem budidaya cakupan wilayah pengembangan baru atau lama	Analisis implementasi sistem budidaya cakupan wilayah pengembangan baru atau lama (Intensifikasi, Peremajaan, Rehabilitasi, dll); Pengendalian OPT dan Gangguan Produksi; Pengembangan Pasca Panen, Pemasaran, dan lain-lain; Rekomendasi Program dan Kegiatan
11	Peran Pelaku dan Pemangku Kepentingan	Analisis kebutuhan dan Keterkaitan Antar Progam, Antar danAntar Kawasan Analisis Apakah Single atau terpadu dan terintegrasi kawasan lain sehingga peran dari instansi lain harus berpartisipasi; Rekomendasi
12	Model dan Detil Desain Pengembangan	Analisis penetapan detil desain dan tahap pengembangan pengembangan Kawasan : Pilihan dan Penetapan Model Pilihan Komoditas dan Produk Akhir Pengembangan Sumberdaya Prasarana (Infrastruktur) Keterkaitan Antar Progam, Antar dan Antar Kawasan Analisis Pengembangan Pasar (Pengolahan dan Pemasaran) dan Perdagangan (Ekspor) Pengembangan dan Penyediaan Input (Sarana Produksi), Bahan Baku dan Bahan Penolong Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (Termasuk Struktur Organisasi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pertanian) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengembangan Pembiayaan (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Swasta, Swadaya Petani dan Masyarakat)

### **4.3. Metode Pendekatan dan Pelaksanaan Kajian**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui mekanisme swakelola dan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada APBN Tahun 2015.

### **4.4. Metode Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet**

Pengembangan kawasan pertanian, memerlukan suatu upaya untuk menyusun perencanaan pembangunan wilayah sebagai kawasan pertanian. Perencanaan ini bernilai strategis karena dapat memberikan landasan operasional dan memandu dalam pentahapan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mencapai keberhasilan pengembangan ekonomi wilayah. Dalam melakukan analisis perencanaan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai harus ditentukan terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh analisis situasi dan kondisi saat ini secara mendalam. Metode analisis yang terbaik dalam situasi saat ini untuk sebuah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan harus terlebih dahulu diseleksi dari beberapa alternatif pilihan yang ada atau tersedia. Kesalahan dalam mengkaji hal ini akan mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan pembangunan. dalam perencanaan pembangunan kawasan pertanian yang ditetapkan, diperlukan pemahaman secara mendalam mengenai metode-metode analisis yang sesuai untuk menganalisis perencanaan pembangunan wilayah secara umum dan kawasan pertanian secara khusus. Kesalahan dalam perencanaan pembangunan akan berakibat pada tujuan dan sasaran pembangunan tidak berhasil dicapai, pemborosan waktu dan sumberdaya.

Dalam perumusan kebijakan, strategi dan kegiatan operasional pengembangan komoditas unggulan dan kawasannya membutuhkan suatu metode analisis yang memadai agar tujuan yang ingin dicapai tersebut memiliki kerangka atau rancangan bangun yang mudah diterapkan. Perumusan strategi yang mengarahkan rencana aksi dilakukan berdasarkan hasil analisis data dan informasi dan dipertajam melalui proses wawancara, seminar/workshop/FGD dengan

---

melibatkan berbagai pemangku kepentingan daerah atau stakeholder. Salah satu metode analisis yang dapat dipakai dalam menyusun strategi kebijakan, program dan kegiatan, dimana selama ini belum banyak digunakan adalah metode **Mean End Analysis.**

**Mean End Analysis** (MEA) atau analisis tujuan akhir memiliki pengertian merupakan suatu metode analisis untuk mencapai tujuan akhir dari sasaran atau target-target yang telah ditetapkan. Metode analisis ini memiliki tujuan untuk mendapatkan status kondisi yang ingin dicapai pada masa depan dan selanjutnya ditarik mundur kebelakang sesuai kondisi situasi pada saat ini (eksisting) untuk menentukan strategi kebijakan, program dan kegiatan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada masa yang akan datang tersebut sebagai tujuan akhir dari analisis.

Metode MEA juga merupakan strategi pemecahan masalah dengan cara membagi masalah ke dalam masalah yang lebih sederhana, atau dari masalah yang khusus ke masalah yang lebih umum. Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan akhir yang ingin dicapai MEA adalah menganalisis suatu masalah dengan bermacam cara sehingga mendapatkan hasil sesuai tujuan akhir yang ingin dicapai.

Metode MEA adalah suatu teknik pemecahan masalah di mana keadaan sekarang dibandingkan dengan tujuan, dan perbedaan di antaranya dibagi ke dalam sub-subtujuan untuk memperoleh tujuan dengan menggunakan berbagai metode dan cara yang sesuai. Metode analisis ini memuat dua langkah utama yaitu(1) Mengidentifikasi perbedaan antara kondisi atau keadaan sekarang dan tujuan yang ditentukan; dan (2) Menggunakan suatu tindakan untuk mengurangi perbedaan antara tujuan dengan keadaan sekarang. Berdasarkan dua langkah utama ini selanjutnya dirinci langkah-langkah dan tahapan yang harus dilakukan dalam menggunakan metode ini.

Langkah-langkah dalam menerapkan metode MEA adalah: (1)menguraikan keadaan atau kondisi dan situasi tujuan akhir yang ingin dicapai secara detail; (2)Menguraikan kondisi dan situasi sekarang secara detail; (3)mengidentifikasi perbedaan dari berbagai sudut pandang secara detail dan menguraikannya secara sistematis; (4) menganalisis perbedaan itu dari sudut pandang permasalahan dan

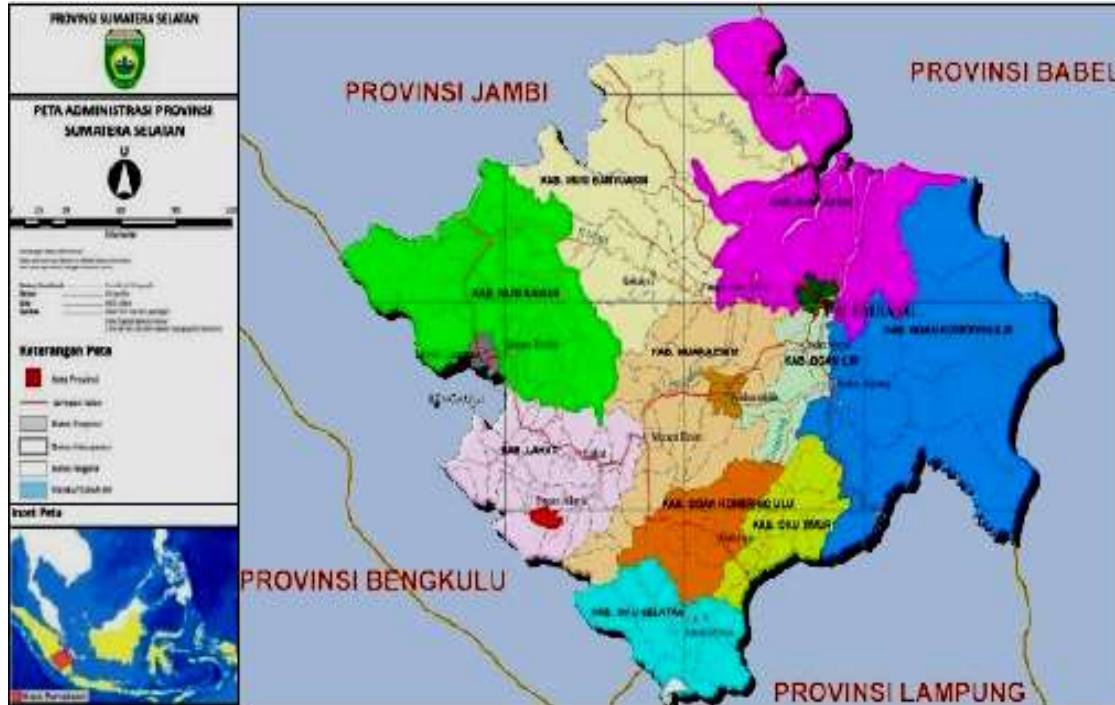
---

pencapaian tujuan dengan berbagai macam metoda dan cara yang paling tepat dan cepat untuk mengurangi perbedaan itu; (5) memformulasikan hasil analisis sesuai kerangka format perencanaan.

## BAB V POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN BERBASIS KOMODITAS KARET

### 5.1. Kondisi Umum Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet

Secara geografis, wilayah Provinsi Sumatera Selatan terletak di sebelah Selatan garis khatulistiwa pada  $1^{\circ} - 4^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $102^{\circ} - 108^{\circ}$  Bujur Timur dengan luas daratan 87.02 Ribu Km<sup>2</sup>. Sumatera Selatan sering pula disebut sebagai Daerah Batang Hari Sembilan, karena kawasan ini terdapat sembilan sungai besar yang dapat dilayari sampai jauh ke hulu yaitu Sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Lakitan, Kelingi, Rawas, Batanghari Leko dan Lalan. Batas wilayahnya sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Lampung, Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Gambar 5-1.



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (2012)

Gambar 3. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah kabupaten di Sumatera Selatan mencapai tiga belas kabupaten dan empat kota pada tahun 2014 (Tabel 5-1), dan secara total, jumlah wilayah administrasi di Sumatera Selatan sampai bulan Juni tahun 2015 mencapai 2.872 desa, 385 kelurahan dan 231 kecamatan (Tabel 5-2). Sedangkan Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan dan 186 Desa atau Kelurahan (Tabel 5-3).

Tabel 3. Pembagian Administrasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014

Administrasi	2011	2012	2013	2014
Kabupaten	11	11	13	13
Kota	4	4	4	4
Kecamatan	223	231	233	233
Kelurahan	384	385	387	387
Desa	2812	2827	2844	2844

Sumber : Sumatera Selatan Dalam Angka 2015, BPS

Tabel 4. Pembagian Administrasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah Desa+Kelurahan
1	Ogan Komering Ulu	12	143	14	157
2	Ogan Komering Ilir	18	314	13	327
3	Muara Enim	20	245	10	255
4	Lahat	22	359	17	376
5	Musi Rawas	14	186	13	199
6	Musi Banyuasin	14	227	13	240
7	Banyuasin	19	288	16	304
8	OKU Selatan	19	252	7	259
9	OKU Timur	20	325	7	332
10	Ogan Ilir	16	227	14	241
11	Empat Lawang	10	147	9	156
12	PALI	5	65	6	71
13	Musi Rawas Utara	7	82	7	89
14	Palembang	16	0	107	107
15	Prabumulih	6	12	25	37
16	Pagar Alam	5	0	35	35
17	Lubuk Linggau	8	0	72	72
	Jumlah	231	2872	385	3257

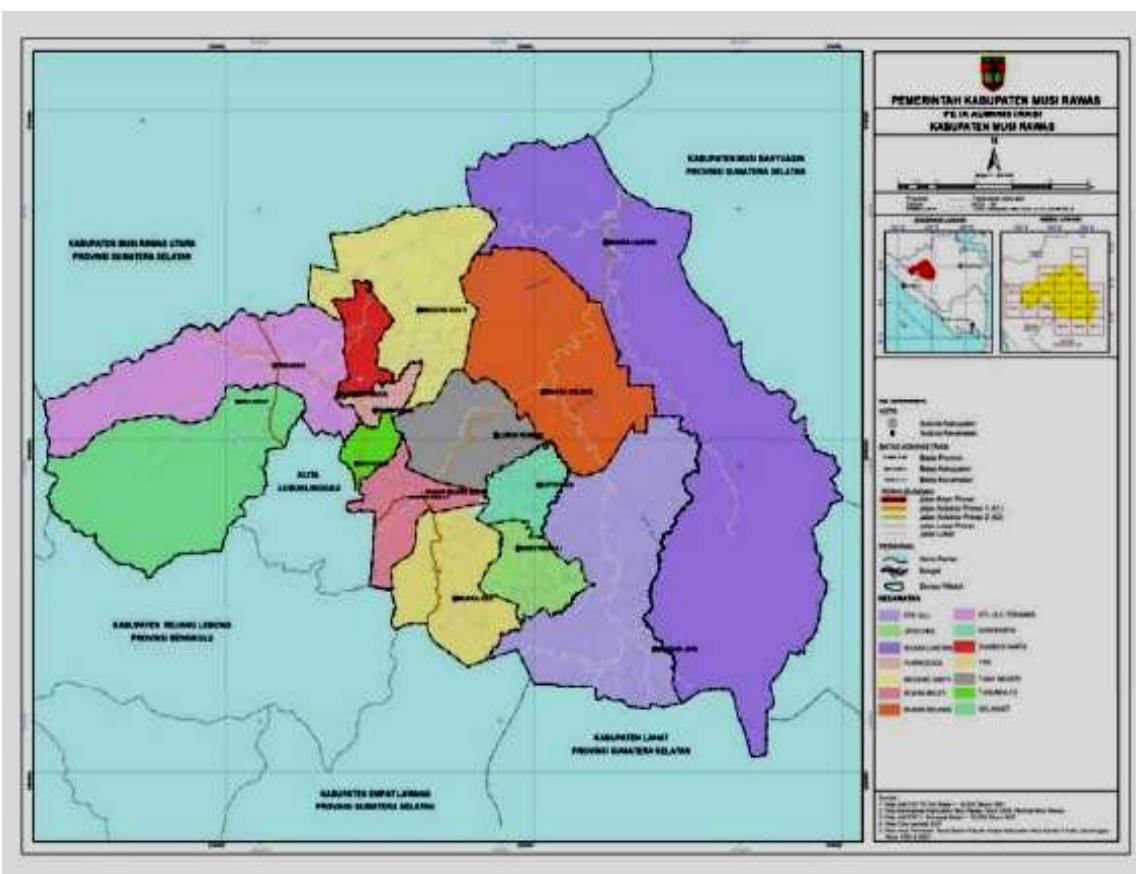
Sumber : Sumatera Selatan Dalam Angka 2015, BPS

Tabel 5. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Luas wilayah di Kab. Musi Rawas Tahun 2014

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (KM2)
1	STL Ulu Terawas	1	12	596.92
2	Muara Beliti	1	11	175.63
3	Tugumulyo	1	17	67.71
4	Jaya Loka	1	12	160.46
5	Muara Kelingi	1	20	645.82
6	Muara Lakitan	1	19	1,963.54
7	Megang Sakti	2	19	399.78
8	Purwodadi	2	9	63.26
9	BTS. Ulu	1	18	751.54
10	Selangit	1	11	717.34
11	Sukakarya	0	8	121.53
12	Tuah Negeri	0	11	263.45
13	Sumber Harta	1	9	103.78
14	Tiang Pumpung Kepungut	0	10	326.42
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>186</b>	<b>6,357.18</b>

Sumber : Mura Dalam Angka 2014, BPS

Berdasarkan Keppmenan No 46/2015, Kabupaten Musi Rawas terpilih sebagai lokasi pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet. Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis terletak pada posisi  $102^{\circ} 07' 00'' - 103^{\circ} 40' 00''$  Bujur Timur dan  $20^{\circ} 20' 00'' - 30^{\circ} 38' 40''$  Lintang Selatan. Sebelum adanya pemekaran dengan dibentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, luas wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah 1.24 juta ha (12.37 ribu Km<sup>2</sup>). Setelah terjadi pemisahan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara, luas wilayah Kabupaten Musi Rawas menjadi 6357.18 Km<sup>2</sup> atau 635.72 ribu Ha. Kabupaten Musi Rawas berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan, tempat pertemuan hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian Utara, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang, di bagian Barat berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu dan di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Musin Rawas disajikan pada Gambar 5-2.



Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031

Gambar 4. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Rawas

## **5.10. Kondisi Sumber Daya Manusia Pendukung Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet**

Pengembangan kawasan berbasis komoditas karet membutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang memadai. Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan sub sektor perkebunan di Sumatera Selatan. Dalam pembangunan perkebunan ada 2 (dua) sisi sumber daya manusia yang berperan yaitu jumlah tenaga / petugas yang tersedia sebagai pendamping, pembina maupun sebagai penyuluhan petani perkebun dan kualitas SDM petani pekebun sebagai pengelola lahan usaha.

Data tahun 2013 menunjukkan bahwa karet melibatkan lebih dari 735 ribu KK petani pekebun. Sedangkan jumlah SDM petugas yang tercatat di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembina, pendamping maupun penyuluhan adalah sebanyak 152 orang yang terdata di Dinas Perkebunan Provinsi. Sumber daya manusia ( petugas ) ini belum termasuk petugas – petugas yang ada di daerah Kabupaten / kota yang membidangi perkebunan, dan BP4K. Bila dilihat dari jumlah petugas dan SDM petani pekebun secara kuantitas, maka hal ini merupakan suatu kekuatan yang potensial dalam kegiatan pembangunan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah petugas lapangan dalam mendampingi masih kurang. Pembinaan petani mencakup berbagai aspek budidaya tanaman seperti sekolah lapang, penangkar, pembinaan pemasaran dan lain-lain. Selain dibutuhkan tambahan tenaga yang handal, pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet juga membutuhkan penggerahan tenaga-tenaga dari instansi terkait di Provinsi Sumatera Selatan.

## **5.11. Kondisi dan Implementasi Kebijakan Pendukung Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet**

Dalam rangka pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet berbasis komoditas karet telah ada payung hukum undang-undang dan peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); (Jika terintegrasi dengan ternak)
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170) (Jika terintegrasi dengan hortikultura);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
  14. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260); (Jika terintegrasi dengan ternak)
  15. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5296); (Jika terintegrasi dengan ternak)
  16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014;
  17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian
  21. Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
  22. Surat Keputusan Menteri Nomor 94/M-IN/PER/8/2010 tahun 2010 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan
  23. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.828/kpts/balitbangda/2010 tahun 2010 tentang Tim Sistem Inovasi Daerah Sumatera Selatan
  24. Peraturan Daerah Kab. Banyuasin Nomor 8 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
  25. Peraturan Daerah Kab. Banyuasin Nomor 29 tahun 2005 tentang Penetapan Pemanfaatan Kawasan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin
  26. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 611 tahun 2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Gasing di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
-

27. Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 2007 tentang Rencana Tapak Kawasan Industri Gasing Kabupaten Banyuasin

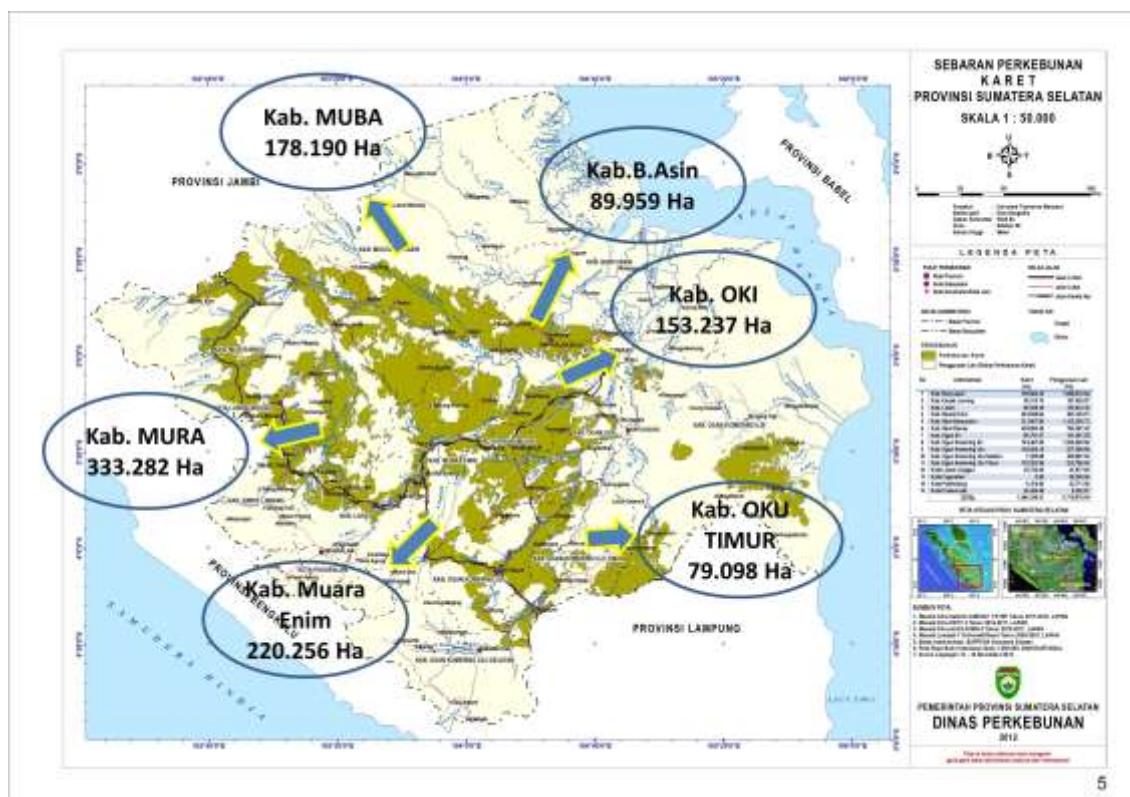
## **5.12.Gambaran Umum Perkebunan Komoditas Karet Pada Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet**

### **5.12.1. Luas Areal Tanaman Karet Rakyat**

Tabel 43. menunjukkan bahwa luas areal karet di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 mencapai 1.26 juta Ha, yang terdiri dari luas tanaman belum menghasilkan 351 ribu Ha, tanaman menghasil 765 ribu Ha dan tanaman tua atau rusak 143 ribu Ha. Luas areal tanaman karet meningkat pesat dari tahun ke tahun dan jika dibandingkan dengan sasaran Renstra Dinas Perkebunan tahun 2013 – 2018, luas areal pada tahun 2014 telah mencapai target yang ingin dicapai pada tahun 2018. Berdasarkan Tabel 43. dan Gambar 14 terdapat 7 kabupaten /kota (Musi Rawas termasuk didalamnya Musi Rawas Utara atau Muratara) yang memiliki lahan karet luas di Provinsi Sumatera Selatan. Pengembangan karet direncanakan akan dikonsentrasi di 7 kabupaten kota tersebut.

Tabel 43. Luas Tanaman Karet di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014.

<b>No</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Luas (Ha)</b>			
		<b>TBM</b>	<b>TM</b>	<b>TTM/TR</b>	<b>Jumlah</b>
1	LAHAT	9,642	22,428	2,576	34,646
2	EMPAT LAWANG	1,681	2,475	523	4,679
3	PAGAR ALAM	905	775	-	1,680
4	MUSI BANYUASIN	55,097	129,750	25,050	209,897
5	BANYUASIN	26,604	54,673	9,174	90,451
6	MUSI RAWAS	26,162	95,048	26,243	147,454
7	MURATARA	42,432	98,296	35,546	176,273
	<i>Total 6 + 7</i>	<i>68,594</i>	<i>193,344</i>	<i>61,789</i>	<i>323,727</i>
8	LUBUK LINGGAU	2,331	9,883	1,708	13,921
9	OKU	24,012	38,131	9,665	71,808
10	OKU Timur	37,321	41,750	76	79,147
11	OKU Selatan	3,350	1,792	55	5,197
12	OKI	34,033	103,795	16,009	153,837
13	OGAN ILIR	7,300	22,438	473	30,211
14	MUARA ENIM	49,945	90,125	9,205	149,275
15	PALI	21,516	44,700	4,869	71,085
	<i>Total 14+ 15</i>	<i>71,461</i>	<i>134,825</i>	<i>14,074</i>	<i>220,360</i>
16	PRABUMULIH	8,285	8,805	2,007	19,097
17	PALEMBANG	49	428	14	491
	<b>Sumatera Selatan</b>	<b>350,665</b>	<b>765,292</b>	<b>143,192</b>	<b>1,259,149</b>



Gambar 14. Peta Kabupaten/Kota Konsentrasi Pengembangan Kawasan Karet di Sumatera Selatan.

### **5.12.2. Produktivitas dan Produksi**

Pada tahun 2014, produksi karet di Provinsi Sumatera Selatan hampir mencapai 1.1 juta ton. Rata-rata produktivitas karet Sumatera Selatan mencapai 1.43 ton per Ha. Capaian rata-rata produktivitas tertinggi adalah di Kabupaten Muara Enim yaitu 1.80 ton per Ha dan terendah adalah di Pagar Alam dan Lubuk Linggau yang hanya mencapai 0.45 dan 0.50 ton per Ha. Capai produktivitas di Kabupaten Musi Rawas 1.35 ton per Ha di bawah rata-rata produktivitas Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan jenis klon karet yang ditanam diantara beberapa jenis PB dan IRR, produktivitas produktivitas karet di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas dapat ditingkatkan hingga mendekati 2.00 ton per Ha.

Tabel 44. Luas Tanaman Menghasilkan, Produktivitas dan Produksi Karet di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014.

Kabupaten/Kota	TM (Ha)	Produktivitas (ton/Ha)	Produksi (Ton)
[01] OGAN KOMERING ULU	38131	1.38	52447
[02] OGAN KOMERING ILIR	103795	1.78	184369
[03] MUARA ENIM (Termasuk Pali)	134825	1.80	242685
[04] LAHAT	22428	1.09	24463
[05] MUSI RAWAS (Termasuk Muratara)	193344	1.35	260108
[06] MUSI BANYUASIN	129750	1.17	152338
[07] BANYU ASIN	54673	1.74	95200
[08] OGAN KOMERING ULU SELATAN	1792	1.65	2957
[09] OGAN KOMERING ULU TIMUR	41750	0.90	37724
[10] OGAN ILIR	22438	1.01	22591
[11] EMPAT LAWANG	2475	1.18	2930
[71] PALEMBANG	428	1.41	602
[72] PRABUMULIH	8805	1.34	11798
[73] PAGAR ALAM	775	0.45	349
[74] LUBUKLINGGAU	9883	0.50	4931
[16] SUMATERA SELATAN	765292	1.43	1095492

### **5.12.3. Potensi Peningkatan Produksi**

Dalam jangka peningkatan produktivitas dapat diraih melalui perbaikan budidaya tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan. Dalam jangka menengah dan panjang peningkatan produksi dapat dilakukan melalui peremajaan tanaman dan perluasan areal. Saat ini produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui perbaikan budidaya maupun menekan kehilangan hasil dari pengendalian OPT dan banjir atau kekeringan maupun penanganan panen dan pasca panen. Tabel 45. menunjukkan jika dari potensi peningkatan produktivitas diasumsikan dapat diraih 50 persen maka terdapat penambahan produksi lebih rata-rata 0.16 ton per Ha di Provinsi Sumatera Selatan. Di Kabupaten Musi Rawas akan terdapat penambahan sekitar 0.29 ton per Ha.

**Tabel 45. Potensi Peningkatan Produktivitas Karet Di Sumatera Selatan (Ton/Ha)**

Kabupaten/Kota	Produktivitas Aktual	Produktivitas Potensial	Senjang Produktivitas	50% Senjang
[01] OGAN KOMERING ULU	1.38	1.89	0.51	0.26
[02] OGAN KOMERING ILIR	1.78	1.97	0.19	0.10
[03] MUARA ENIM (Termasuk PALI)	1.80	1.97	0.17	0.08
[04] LAHAT	1.09	1.64	0.55	0.27
[05] MUSI RAWAS (Termasuk Muratara)	1.35	1.93	0.59	0.29
[06] MUSI BANYUASIN	1.17	1.83	0.65	0.33
[07] BANYU ASIN	1.74	1.92	0.18	0.09
[08] OGAN KOMERING ULU SELATAN	1.65	1.80	0.15	0.07
[09] OGAN KOMERING ULU TIMUR	0.90	1.52	0.62	0.31
[10] OGAN ILIR	1.01	1.60	0.59	0.30
[11] EMPAT LAWANG	1.18	1.73	0.55	0.28
[71] PALEMBANG	1.41	1.90	0.49	0.25
[72] PRABUMULIH	1.34	1.85	0.51	0.26
[73] PAGAR ALAM	0.45	1.30	0.85	0.42
[74] LUBUKLINGGAU	0.50	1.35	0.85	0.42
[16] SUMATERA SELATAN	1.43	1.76	0.33	0.16

Produksi yang dihasilkan dari upaya mengatasi senjang hasil ini adalah sekitar 125 ribu ton per tahun atau lebih dari 10 persen dari produksi yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 (Tabel 46.)

**Tabel 46. Potensi Peningkatan Produksi Karet Di Sumatera Selatan Dari Upaya Mengatasi 50 persen Senjang Produktivitas (Ton/Ha)**

Kabupaten/Kota	TM (Ha)	Produktivitas (ton/Ha)	Produksi (Ton)	Peluang Peningkatan Produksi 50 % Senjang (Ton)	Produksi + Peningkatan Produktivitas 50 % Senjang (Ton)
[01] OGAN KOMERING ULU	38131	1.38	52447	9793	62240
[02] OGAN KOMERING ILIR	103795	1.78	184369	9952	194321
[03] MUARA ENIM (Termasuk PALI)	134825	1.80	242685	11456	254141
[04] LAHAT	22428	1.09	24463	6165	30628
[05] MUSI RAWAS (Termasuk Muratara)	193344	1.35	260108	56915	317022
[06] MUSI BANYUASIN	129750	1.17	152338	42459	194797
[07] BANYU ASIN	54673	1.74	95200	4823	100023
[08] OGAN KOMERING ULU SELATAN	1792	1.65	2957	130	3087
[09] OGAN KOMERING ULU TIMUR	41750	0.90	37724	12952	50676
[10] OGAN ILIR	22438	1.01	22591	6671	29262
[11] EMPAT LAWANG	2475	1.18	2930	681	3611
[71] PALEMBANG	428	1.41	602	106	708
[72] PRABUMULIH	8805	1.34	11798	2251	14049
[73] PAGAR ALAM	775	0.45	349	328	677
[74] LUBUKLINGGAU	9883	0.50	4931	4182	9113
[16] SUMATERA SELATAN	765292	1.43	1095492	124768	1220260

Upaya peningkatan produksi yang dapat diraih dari replanting diperoleh setelah tanaman berumur 4 atau 5 tahun setelah tanam. Berdasarkan siklus umur tanaman dan adanya kerusakan tanaman akibat serangan OPT, banjir, kekeringan maupun lainnya mencapai rata-rata 32 ribu ha per tahun atau sekitar 159 ribu ha dalam lima tahun ke depan. Tanaman yang berumur tua sekitar 84 ribu ribu ha dan tanaman yang rusak akibat berbagai penyebab sekitar 75 ribu Ha (Tabel 47)

Tabel 47 Luas Areal Yang Perlu Peremajaan dan Rehabilitasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2020 (Ha)

Kabupaten/Kota	Tanaman Tua	Tanaman Rusak	Total
[01] OGAN KOMERING ULU	6,763	2,902	9,665
[02] OGAN KOMERING ILIR	9,894	6,115	16,009
[03] MUARA ENIM (Termasuk PALI)	14,047	27	14,074
[04] LAHAT	2,494	82	2,576
[05] MUSI RAWAS (Termasuk Muratara)	13,124	48,664	61,789
[06] MUSI BANYUASIN	13,003	12,047	25,050
[07] BANYU ASIN	7,650	1,524	9,174
[08] OGAN KOMERING ULU SELATAN	942	55	997
[09] OGAN KOMERING ULU TIMUR	8,064	76	8,140
[10] OGAN ILIR	2,672	473	3,145
[11] EMPAT LAWANG	1,018	523	1,541
[71] PALEMBANG	516	14	530
[72] PRABUMULIH	1,501	506	2,007
[73] PAGAR ALAM	30	-	30
[74] LUBUKLINGGAU	1,902	1,708	3,610
[16] SUMATERA SELATAN	83,961	74,716	158,677

#### **5.12.4. Potensi Integrasi**

Disamping upaya koordinasi antar lintas sektoral dan upaya mengembangkan kemitraan dengan pabrik karet, pengembangan industri hilir dan keterkaitannya dengan Kawasan ekonomi Khusus Tanjung Api Api, pengembangan peremajaan dan rehabilitasi tanaman karet berpotensi untuk integrasi dengan tanaman dan ternak. Pemanfaatan gawangan karet sampai umur 3 tahun atau menjelang menutupnya tajuk tanaman karet dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan pekebun. Beberapa

jenis tanaman sela yang terbukti memberikan keuntungan tanpa merugikan pertumbuhan tanaman karet diantaranya adalah nenas, pisang, jagung, kapulaga, dan padi gogo. Tumpang sari nenas di kebun karet adalah alternatif terbaik dan dinilai layak untuk dikembangkan secara komersial. Demikian juga pe-nanaman pisang barang, di samping mempunyai nilai ekonomi yang tinggi juga dapat sebagai makanan tambahan bagi petani dan sekaligus memperbaiki gizi rakyat karena banyak me-ngandung vitamin dan mineral. Tanaman sela toleran naungan seperti kapulaga dapat tumbuh dan memberikan hasil yang cukup menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan petani. Disamping itu, upaya pemanfaatan kayu karet akan memberikan peluang peningkatan pendapatan petani. Tabel 5 memuat rincian perkiraan produksi kayu karet dari luas areal yang perlu diremajakan atau direhabilitasi. Apabila 1 hektar kebun karet replanting menghasilkan kayu karet sekitar 100 m<sup>3</sup>, pada lima tahun ke depan produksi kayu karet yang dapat dihasilkan dapat mencapai 8.36 juta m<sup>3</sup> atau rata-rata 1.67 m<sup>3</sup> per tahun. Kabupaten Musi Rawas Termasuk Muratara berpotensi menghasilkan 1.31 juta m<sup>3</sup> kayu karet periode 2016 - 2020

Tabel 48 Potensi Kayu Tebangan Peremajaan Karet Sumatera Selatan Periode 2016 - 2020

<b>Kabupaten/Kota</b>	Produksi Kayu Total (m <sup>3</sup> )	Produksi Kayu Per tahun (M3)
[01] OGAN KOMERING ULU	676,263.01	135,252.60
[02] OGAN KOMERING ILIR	989,389.76	197,877.95
[03] MUARA ENIM (Termasuk PALI)	1,404,698.01	280,939.60
[04] LAHAT	249,369.99	49,874.00
[05] MUSI RAWAS (Temasuk Muratara)	1,312,415.54	262,483.11
[06] MUSI BANYUASIN	1,300,325.45	260,065.09
[07] BANYU ASIN	765,022.20	153,004.44
[08] OGAN KOMERING ULU SELATAN	94,228.76	18,845.75
[09] OGAN KOMERING ULU TIMUR	806,372.44	161,274.49
[10] OGAN ILIR	267,232.53	53,446.51
[11] EMPAT LAWANG	101,848.54	20,369.71
[71] PALEMBANG	51,609.84	10,321.97
[72] PRABUMULIH	150,149.44	30,029.89
[73] PAGAR ALAM	3,025.54	605.11
[74] LUBUKLINGGAU	190,184.32	38,036.86
[16] SUMATERA SELATAN	8,362,135.35	1,672,427.07

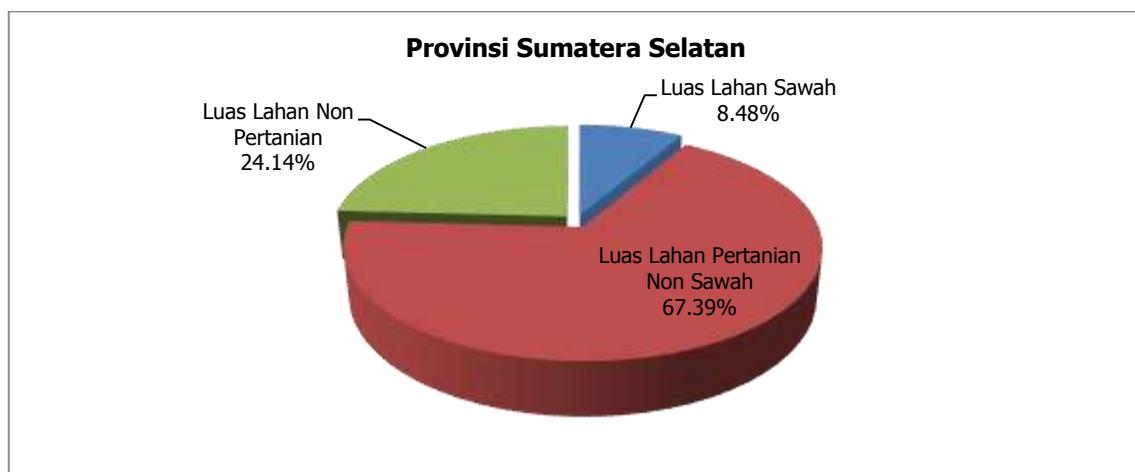
## **5.2. Kondisi Agroekologis dan Lingkungan Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet**

### **5.2.1. Kondisi Penggunaan Lahan**

Data penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa penggunaan lahan pertanian non sawah yang sebagian besar merupakan lahan perkebunan dan kehutanan sangat dominan. Menurut Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (2014), penggunaan lahan di Sumatera Selatan merupakan bagian dari usaha mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan untuk menunjang kehidupan manusia; menjaga keragaman habitat bilogi; menyediakan sumber bahan mentah, energi dan mineral; mengatur perubahan iklim; mendorong pengendalian sampah dan polusi; menyediakan ruang kehidupan; menjadi penghubung spasial bagi mobilitas orang dan barang; dan menyimpan dan melindungi berbagai warisan sejarah. Penggunaan lahan di Sumatera Selatan sangat menentukan dan saling mempengaruhi dengan pola kegiatan sosial, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Berdasarkan data luas penutupan lahan tahun 2010, penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar digunakan untuk mendukung pertanian lahan kering campur sekitar 32,91 persen, belukar rawa sekitar 10,33 persen, semak belukar sekitar 10,23 persen, perkebunan 8,34 persen dan pertanian lahan kering sekitar 6,48 persen.

Berdasarkan data agregat penggunaan lahan pada tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Gambar 5-3 dan pada Gambar 5-4 untuk Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Gambar 5-3 dan 5-4, pada tahun 2014 dari seluruh luas lahan, penggunaan untuk non pertanian mencapai 67.39 persen untuk Provinsi Sumatera Selatan dan 66.48 persen untuk Kabupaten Musi Rawas. Sementara untuk lahan sawah di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 8.48 persen dan di Kabupaten Musi Rawas 4.78 persen. Sedangkan penggunaan untuk non pertanian mencapai 24.14 persen untuk Provinsi Sumatera Selatan dan 28.74 persen untuk Kabupaten Musi Rawas. Rincian penggunaan lahan Provinsi Sumatera Selatan menurut kabupaten/kota disajikan pada Tabel 5-5 dan Tabel 5-6 untuk Kabupaten Musi Rawas menurut Kecamatan.

---



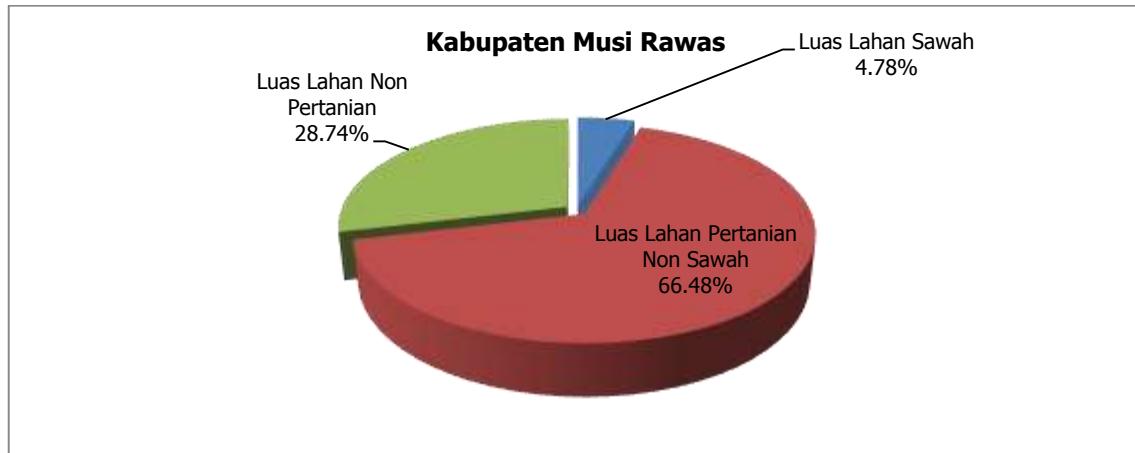
Sumber : Luas Lahan Provinsi Sumatera Selatan Menurut Penggunaannya Tahun 2014, BPS

Gambar 5. Persentase Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

Tabel 6. Luas dan Penggunaan Lahan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Ha)

No	Kabupaten/kota	Luas Lahan Sawah	Luas Lahan Pertanian Non Sawah	Luas Lahan Non Pertanian	Luas Lahan Total
1	Ogan Komering Ulu	8901	469897	68697	547495
2	Ogan Komering Ilir	183000	1449120	321401	1953521
3	Muara Enim	27017	572247	128167	727431
4	Lahat	17491	336320	55867	409678
5	Musi Rawas	30366	422654	182698	635718
6	Musi Banyuasin	68222	932344	426030	1426596
7	Banyuasin	235139	573863	374297	1183299
8	OKU Selatan	18040	374826	131217	524083
9	OKU Timur	84966	163095	58922	306983
10	Ogan Ilir	64962	118099	80972	264033
11	Empat Lawang	14091	161366	50187	225644
12	PALI	6579	137078	40343	184000
13	Musi Rawas Utara	7131	377047	216688	600866
14	Palembang	6189	9109	27725	43023
15	Prabumulih	550	28831	14069	43450
16	Pagar Alam	3440	29331	30594	63365
17	Lubuk Linggau	1916	30329	7904	40149
	Jumlah	778000	6185556	2215778	9179334

Sumber : Luas Lahan Provinsi Sumatera Selatan Menurut Penggunaannya Tahun 2014, BPS



Sumber : Luas Lahan Provinsi Sumatera Selatan Menurut Penggunaannya Tahun 2014, BPS

Gambar 6. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014

Tabel 7. Luas Penggunaan Lahan di Wilayah Kabupaten Musi Rawas Menurut Kecamatan Tahun 2014 (Ha)

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah	Luas Lahan Pertanian Non Sawah	Luas Lahan Non Pertanian	Luas Lahan Total
1	STL. Ulu	7056	19291	33345	59692
2	Selangit	419	58048	13267	71734
3	Sumber Harta	5837	3613	928	10378
4	Tugu Mulyo	2748	2295	1728	6771
5	Purwodadi	1611	3744	971	6326
6	Muara Beliti	2048	13337	2178	17563
7	Tiang Pumpung Kepungut	368	28549	3725	32642
8	Jaya Loka	90	14941	1015	16046
9	Suka Karya	249	9994	1910	12153
10	Muara Kelinci	1382	48255	14945	64582
11	Cecar (BTS Ulu)	965	59175	15014	75154
12	Tuah Negeri	1473	20952	3920	26345
13	Muara Lakitan	872	113543	81939	196354
14	Megang Sakti	5248	26917	7813	39978
JUMLAH		30366	422654	182698	635718

Sumber : Luas Lahan Provinsi Sumatera Selatan Menurut Penggunaannya Tahun 2014, BPS

## 5.2.2. Potensi Kesesuaian Lahan dan Agroklimat

### 5.2.2.1. Topografi

Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Wilayah Sumatera Selatan memiliki bentangan wilayah dari Barat ke Timur dengan ketinggian antara 400-1.700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian rata-rata antara

900-1200 mdpl berada pada bagian Barat yang merupakan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan ini memiliki puncak-puncak dengan ketinggian tertinggi berada di Gunung Dempo dengan ketinggian 3.159 mdpl, kemudian Gunung Bungkuk dengan ketinggian 2.125 mdpl, Gunung Seminung dengan ketinggian 1.964 mdpl, dan Gunung Patah dengan ketinggian 1.107 mdpl. Bagian Timur merupakan daerah pantai dengan tanah terdiri dari rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya merupakan tumbuhan palmase dan bakau. Sedangkan di bagian tengah merupakan wilayah dengan dataran rendah yang luas. Luas Wilayah Kabupaten/ Kota berdarakan topografi disajikan pada Tabel 5-7.

**Tabel 8.** Luas Kabupaten/Kota Berdasarkan Kemiringan Lereng

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)				
		0-8%	8 - 15 %	16-25%	26-40%	>40%
1	Banyuasin	1.181.610	1.689	-	-	-
2	Empat Lawang	18.212	62.253	38.531	2.141	104.506
3	Lahat	126.787	142.785	148.751	5.133	107.718
4	Lubuk Linggau	2.863	24.546	5.492	1.569	5.680
5	Muara Enim	710.763	122.335	26.611	25.262	37.418
6	Musi Banyuasin	1.284.134	113.236	20.934	-	8.323
7	Musi Rawas	542.957	267.264	160.457	20.200	244.988
8	OKI	1.832.553	2.293	1.058	-	-
9	OKU	236.011	124.065	58.855	41.939	18.836
10	OKU Selatan	124.040	129.222	137.501	95.939	62.693
11	OKU Timur	297.717	39.109	174	-	-
12	Pagar Alam	86	26.931	20.005	11.703	4.641
13	Palembang	40.061	-	-	-	-
14	Prabumulih	24.760	15.220	3.470	-	-
15	Ogan Ilir	266.607	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>6.422.553</b>	<b>1.070.948</b>	<b>621.840</b>	<b>1.714.422</b>	<b>5.922.802</b>

Berdasarkan tatanan tektoniknya, wilayah Provinsi Sumatera Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Kedua mendala tektonik ini terbentuk akibat adanya interaksi menyerong antara Lempeng Samudera Hindia di Barat Daya dan Lempeng Benua Eurasia di timur laut pada tersier. Pertemuan kedua lempeng bumi tersebut terletak di sepanjang Parit Sunda yang berada di lepas Pantai Barat Sumatera, dimana lempeng samudera menyusup dengan penunjaman miring - 30° di bawah kontinen yang dikenal sebagai Paparan Sunda. Jenis struktur yang

umum dijumpai dicekungan Sumatera Selatan terdiri dari lipatan, sesar dan kekar. Struktur lipatan memperlihatkan orientasi Barat Laut-Tenggara, melibatkan sekuen batuan berumur Oligosen-Plistosen. Sedangkan sesar yang ada merupakan sesar normal dan sesar naik. Sesar normal dengan pola kelurusan Barat Laut-Tenggara tampak berkembang pada runtutan batuan berumur Oligosen-Moisen, sedangkan struktur dengan arah umum Timur Laut-Barat Daya, Utara-Selatan, dan Barat-Timur terdapat pada sekuen batuan berumur Plio-Plistosen. Sesar naik biasanya berarah Barat Laut-Tenggara, Timur Laut-Barat Daya dan Barat-Timur, dijumpai pada batuan berumur Plio-Plistosen dan kemungkinan merupakan hasil peremajaan struktur tua yang berupa sesar tarikan.

Struktur rekahan yang berkembang memperlihatkan arah umum timur laut-barat daya, relatif tegak lurus dengan struktur regional atau sejajar dengan arah pergerakan tektonik di Sumatera. Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk antiklinorium telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap hidrokarbon. Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini. Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis batuan yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan adalah (1) formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara; (2) formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara; (3) formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan; (4) formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan; (5) formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir; (6) formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batubara; dan (7) formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

### **5.2.2.2. Hidrologi**

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya air dengan sumber air utama dari Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai-sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Sebagian besar sungai-sungai bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi beserta anak sungainya, seperti Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelangi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas.

Keberadaan air permukaan di wilayah WS Musi juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang berada di wilayah ini fluktuasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan yang mencapai puncaknya genangan lebak sampai 500.000 Ha, sedang pada musim kemarau yang panjang genangan lebak tinggal 5.000 Ha.

#### **(1) Daerah Aliran Sungai**

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII mencakup 4 (empat) Wilayah Sungai (WS): Musi, Sugihan, Banyuasin, dan Lemau (MSBL). DAS (Daerah Aliran Sungai) yang merupakan bagian dari WS MSBL terdiri dari DAS Musi, DAS Banyuasin, DAS Benawang, DAS Bulurariding dan DAS Mesuji (BPDAS Musi). Wilayah Sungai Musi dengan nama DAS Musi, Lakitan, Rawas, Semangus, Batang Hari Leko, Wilayah Sungai Sugihan dengan nama DAS Burung, Gaja Mati, Pelimbangan, Beberi,

---

Olok, Daras, Medang, Padang, Banyuasin, Senda, Limau, Ibul, Puntian, Pangkalan Balai, Buluain, Kepayang, Mangsang, Kedawang, Titikan, Mendes, Tungkal, Keluang, Lalan, Supat, Lilin.

## **(2) Rawa**

Luas rawa di provinsi Sumatera Selatan sekitar 1.483.662 Ha atau 17,11% dari luas wilayah daratan yang terbagi menjadi RPS (rawa pasang surut), RL (rawa lebak). Rawa tersebut terdapat di Kabupaten Banyuasin dengan jumlah RPS 19 dan RL 1, di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah RPS 7 dan RL 1, di Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah RPS 3 dan RL 63, di Kabupaten Ogan Komering Ilir RPS 4 dan RL 14, sedangkan untuk Kabupaten Ogan Ilir dan OKU Timur Hanya terdapat RL yaitu Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah 53 dan OKU Timur dengan jumlah 5. Sementara, Kota Palembang hanya terdapat 1 RPS.

### **5.2.2.3. Klimatologi**

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 61,0/17-634,4/22 mm sepanjang tahun. Setiap bulan hujan cenderung turun dan bulan November merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu yang cenderung panas berkisar antara 26,4°C hingga 27,8°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 26,8°C. Suhu terendah/minimum terjadi pada bulan Agustus, sedangkan suhu tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Juni.

### **5.2.3. Arah Kawasan Peruntukan Budidaya Perkebunan Karet Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan bergambut seluas 1,42 juta ha atau 15,46 persen dari luas wilayah. Dengan luasan seperti ini menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi terluas kedua di Pulau Sumatera (setelah Provinsi Riau) yang memiliki kawasan gambut. Dilihat dari ketebalannya, kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketebalan yang bervariasi antara 50-400 cm atau termasuk kategori dangkal hingga dalam. Sekitar 96,8 persen termasuk gambut dangkal hingga sedang, sisanya 3,2 persen atau 45.009 ha merupakan gambut dalam yang sebarannya terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten

Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Tabel 5-8). Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, bahwa gambut yang termasuk dalam kategori kawasan lindung apabila mempunyai ketebalan lebih dari 3 m.

**Tabel 9.** Sebaran dan Luas Kawasan Gambut Menurut Kedalaman

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Dangkal (50-100 cm)	Sedang (100-200 cm)	Dalam (200-400 cm)
1	Banyuasin	252.706,52	dangkal	sedang	dalam
2	Muara Enim	24.104,00	-	sedang	dalam
3	Musi Banyuasin	340.604,48	Dangkal	Sedang	dalam
4	Musi Rawas	34.126,00	-	sedang	-
5	Ogan Komering Ilir	768.501,00	-	Sedang	dalam
<b>Jumlah .....</b>		<b>1.420.042</b>	-	-	-

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumberdaya hutan yaitu seluas 3.670.957 ha atau sekitar 41,96 persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan (Tabel 5-9). Dari seluruh luas tersebut luas hutan produksi konversi adalah seluas 4,13 persen atau sekitar 361 ribu Ha.

**Tabel 10.** Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Lindung	591.832	6,76
2	Hutan Produksi Tetap	1.688.445	19,30
3	Hutan Produksi Konversi	360.881	4,13
4	Hutan Produksi Terbatas	236.893	2,71
5	Suaka Margasatwa	267.772	3,06
6	Taman Nasional	466.060	0,53
7	Taman Hutan Rakyat	607	0,01
8	Taman Wisata Alam	223	0,003
<b>Total .....</b>		<b>3.670.957</b>	<b>41,96</b>

Pengembangan wilayah Sumatera Selatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah diarahkan menjadi beberapa kawasan budidaya yaitu diantaranya pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain. Secara rinci arah pengembangan wilayah dimaksud dapat dilihat pada Tabel 5-10.

**Tabel 11.** Arahan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Karakteristik dan Unggulan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Wilayah Kabupaten/Kota	Karakteristik Wilayah	Unggulan Wilayah	Arahan Pengembangan
1	Banyuasin	Dataran rendah, bergelombang	Pertanian, perkebunan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan pertanian</li> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan perikanan</li> <li>• Kawasan industri</li> </ul>
2	Empat Lawang	Perbukitan, Pegunungan	Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan perkebunan</li> </ul>
3	Lahat	Perbukitan, Pegunungan	Perkebunan, tambang mineral, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan pertambangan</li> <li>• Kawasan pertanian</li> </ul>
4	Muara Enim	Dataran rendah, perbukitan, pegunungan	Tambang, perkebunan, hutan tamanan, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan pertambangan</li> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan pertanian</li> <li>• Kawasan industri</li> </ul>
5	Musi Banyuasin	Dataran rendah, perbukitan	Tambang, perkebunan, pertanian, hutan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan hutan produksi</li> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan pertanian</li> <li>• Kawasan pertambangan</li> </ul>
6	Musi Rawas	Perbukitan, pegunungan	Perkebunan, pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan pertanian</li> </ul>
7	Musi Rawas Utara	Perbukitan, pegunungan	Perkebunan, tambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan pertambangan</li> </ul>
8	Ogan Ilir	Dataran rendah, perbukitan	Pertanian, perikanan, perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan pertanian</li> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan perikanan</li> </ul>
9	Ogan Komering Ilir	Dataran rendah	Hutan tanaman, perkebunan, pertanian, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan hutan produksi</li> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan pertanian</li> <li>• Kawasan perikanan</li> </ul>
10	Ogan Komering Ulu	Perbukitan	Perkebunan, pertanian, tambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan pertanian</li> <li>• Kawasan pertambangan</li> </ul>
11	OKU Selatan	Perbukitan, Pegunungan	Perkebunan, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan pertanian</li> </ul>
12	OKU Timur	Perbukitan	Pertanian, perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan pertanian</li> <li>• Kawasan perkebunan</li> </ul>
13	Penukal Abab Lematang Ilir	Dataran rendah, perbukitan	Perkebunan, tambang, hutan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan hutan produksi</li> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan pertambangan</li> </ul>
14	Lubuklinggau	Pegunungan	Jasa, pariwisata, perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan perkebunan</li> <li>• Kawasan permukiman</li> <li>• Kawasan pariwisata</li> </ul>
15	Pagar Alam	Pegunungan	Pariwisata, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan pertanian</li> <li>• Kawasan permukiman</li> <li>• Kawasan pariwisata</li> </ul>
16	Palembang	Dataran rendah	Jasa, industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan permukiman</li> </ul>
17	Prabumulih	Perbukitan	Perkebunan, pertanian, jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Perkebunan</li> <li>• Kawasan pertanian</li> <li>• Kawasan permukiman</li> </ul>

## **5.3. Kondisi Wilayah Dari Sisi Gangguan Produksi Yang Dapat Menghambat Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet**

### **5.3.1. Bencana Alam**

Bencana adalah gangguan serius terhadap keberfungsiannya suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan. Peristiwa tersebut melampaui kemampuan manusia atau masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki sendiri. Suatu peristiwa tergolong bencana jika menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dikelompokkan dalam kejadian bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, gunung meletus dan tsunami.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan, baik yang disebabkan oleh manusia/masyarakat maupun perubahan musim kemarau. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam Provinsi Sumatera Selatan saja, tapi juga masyarakat yang berada di provinsi yang berdekatan, bahkan hingga menimbulkan dampak internasional hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Kawasan yang termasuk daerah bahaya Gunung Dempo terdiri dari Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagar Alam dengan luas total seluas 36.850 Ha atau sekitar 0,40 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten tersebut merupakan daerah rawan bencana gempa bumi dengan total persentase terhadap luas wilayah 3,28 persen terdiri dari Kabupaten Empat Lawang persentase terhadap luas wilayah 1,92, Kabupaten Lahat persentase terhadap luas wilayah 1,16 Kota Pagar Alam persentase terhadap luas wilayah 0,19.

Kondisi geografis, topografi dan klimatalogi menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan termasuk rawan bencana baik banjir, longsor, abrasi maupun perubahan iklim. Hasil Kajian Risiko Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) menyebutkan bahwa perubahan iklim akan membawa dampak bagi wilayah Provinsi Sumatera Selatan baik pesisir, sumber daya air, pertanian, dan kesehatan.

Perubahan iklim akan mempengaruhi perubahan genangan tingkat permukaan laut yang selanjutnya menyebabkan bahaya banjir di pesisir Selatan wilayah Sumatera. Dampak primer yang dialami oleh Kabupaten/Kota yang diperkirakan terkena rendaman adalah terjadinya peningkatan frekuensi banjir di wilayah pesisir terutama wilayah yang masih berada pada sistem Sungai Musi; (2) turunnya permukaan air tanah yang disebabkan oleh pemanfaatan air tanah yang tidak memperhitungkan keseimbangan sehingga menyebabkan terjadinya intrusi air laut ke darat dan perubahan vegetasi, pertanian dan kesuburan tanah pesisir; (3) munculnya kenaikan muka laut juga mengakibatkan volume air laut yang mendesak ke dalam sungai semakin besar yang akan mengubah salinitas perairan pesisir; (4) terjadinya kemunduran ke arah darat batas antara perairan tawar dan payau, perubahan lokasi fisik, yaitu batas perairan darat, berkurangnya luas kawasan pantai dan semakin mengecilnya garis pantai sehingga berpengaruh pada luas administratif kota-kabupaten di kawasan pesisir. Kabupaten/Kota yang terkena rendaman di antaranya adalah OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Pola ruang yang terkena bahaya rendaman adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, pertanian lahan basah, hutan suaka alam, perkebunan, permukiman, dan kawasan pelabuhan Tanjung Api-api.

Berdasarkan kajian kerentanan, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang terkena risiko genangan pada tingkat risiko sangat tinggi yaitu Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, dan Kota Palembang. Dampak perubahan iklim pada sektor sumber daya air pada dasarnya dipengaruhi oleh curah hujan. Dampak perubahan iklim berupa banjir, longsor, dan penurunan ketersediaan air akan memberi dampak khusus pada penyediaan air Sumatera Selatan. Persentase cakupan wilayah risiko banjir Kota Prabumulih memiliki risiko potensi banjir tertinggi. Luas total potensi risiko tertinggi di Prabumulih adalah 33,82 persen. Namun, daerah resiko banjir terbesar adalah di Kabupaten Muara Enim. Dalam peristiwa ekstrim yang dipengaruhi oleh kenaikan tingkat pasang surut dan laut, Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin memiliki potensi risiko daerah genangan tertinggi. Hal ini

---

disebabkan oleh banjir dan naiknya permukaan laut sehingga menenggelamkan 59,36 persen dari luas Kota Palembang dan 57,33 persen dari wilayah Kabupaten Banyuasin. Sementara itu, berdasarkan hasil proyeksi, daerah dengan risiko banjir tertinggi terletak di Ogan Ilir di mana 43,39 persen dari luas Kabupaten terendam. Sementara itu, dalam kondisi peristiwa ekstrim, daerah potensi risiko tertinggi akan berlokasi di Kota Palembang karena 60,57 persen dari luas Kota Palembang akan tergenang.

Perubahan iklim juga akan berperngaruh terhadap meningkatnya risiko penurunan ketersediaan air dalam kondisi baseline di Sumatera Selatan cukup rendah. Risiko tinggi ditemukan di wilayah Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Sementara itu, risiko dengan tingkat "sedang" terdapat di 22 wilayah di 7 (tujuh) kabupaten / kota yaitu: Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, OKU Timur. Risiko kekurangan air meningkat disebabkan oleh penurunan pasokan air akibat turunnya tren curah hujan dan meningkatnya kebutuhan evapotranspirasi dan air.

Perubahan iklim juga akan berperngaruh terhadap meningkatnya risiko penurunan produktivitas tanaman pangan. Kabupaten Banyuasin dan OKI memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan luas sawah padi tada hujan, Muara Enim memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan lahan kering, Musi Banyuasin dan Banyuasin memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan luas pertanian jagung, dan OKU Timur dan Lahat memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan luas pertanian kedelai. Selain itu, Musi Banyuasin, OKI, Muara Enim, Banyuasin, Lahat, dan OKU Timur memiliki risiko serius dari penurunan luas panen padi, jagung, dan kedelai.

Risiko perubahan iklim terhadap penurunan produksi baik akibat penurunan produktivitas maupun luas panen terbesar terjadi pada komoditas pangan. Hasil kajian resiko perubahan iklim yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa penurunan produktivitas padi sawah bervariasi dari rendah ke tingkat tinggi, kecuali untuk OKU Timur. Daerah ini memiliki potensi risiko yang tinggi penurunan produktivitas padi sawah, sedangkan Lubuk Linggau dan Pagar Alam memiliki tingkat risiko yang sangat rendah. Adapun untuk produktivitas jagung, Sumatera Selatan sangat rendah dengan tingkat resiko yang tinggi, kecuali untuk OKI yang memiliki potensi tingkat risiko sangat tinggi. Untuk produktivitas kedelai, Sumatera Selatan akan mengalami tingkat moderat dan resiko yang tinggi, kecuali untuk OKU Selatan,

---

Lubuk Linggau, Pagar Alam, dan Palembang, tanpa risiko tingkat yang sangat tinggi.

Risiko dari perubahan iklim terhadap penurunan luas panen irigasi menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi risiko penurunan luas panen padi irigasi pada tingkat rendah dan sangat rendah. Hanya beberapa kabupaten yang mengalami risiko penurunan luas sawah pada tingkat sedang dan tinggi, seperti OKU Timur (tingkat sedang), OKI (tingkat sedang), dan Banyuasin (tingkat tinggi). Perubahan iklim berupa temperatur dan curah hujan dinilai berpengaruh pada penyebaran penyakit DBD, malaria, dan diare di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat curah hujan berpengaruh pada penyebaran populasi nyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD) yang berbeda berdasarkan tingkat kejadian, curah hujan bulanan dan temperatur, dan populasi. Puncak kejadian DBD biasa terjadi pada masa transisi tahunan sekitar November-Januari tahun berikutnya. Terdapat 6 wilayah berisiko tinggi terjangkit DBD yang disebabkan oleh berbagai faktor: tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yang mempercepat epidemik, kurangnya fasilitas kesehatan, dan tidak tertutupnya saluran air. Selain itu, perubahan iklim juga berpengaruh terhadap jangkitan diare. Kota Palembang memiliki prevalensi tertinggi diare diikuti oleh Muara Enim dan Ogan Komering Ulu. Kabupaten tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu tingkat pertumbuhan tinggi dan kepadatan penduduk. Secara umum, jumlah penduduk yang tinggi menjadi penyebab utama yang mengakibatkan resiko yang sangat tinggi diare.

**Tabel 12.** Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Sebaran Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2013

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	Total
1	Banyuasin	7	3	16	15	41
2	Empat Lawang	13	13	22	12	60
3	Lahat	8	13	15	15	51
4	Muara Enim	3	4	24	15	46
5	Musi Banyuasin	3	3	2	12	20
6	Musi Rawas	4	3	5	8	20
7	Musi Rawas Utara*)	0	0	0	5	5
8	Ogan Ilir	4	6	11	11	32
9	Ogan Komering Ilir	5	11	5	12	33
10	Ogan Komering Ulu	2	0	5	10	17
11	Ogan Komering Ulu Selatan	2	2	1	16	21
12	Ogan Komering Ulu Timur	5	5	16	11	37
13	Penukal Abab Lematang Ilir*)	0	0	0	4	4
14	Lubuklinggau	0	1	1	1	3
15	Pagar Alam	11	13	37	26	87
16	Palembang	14	20	25	26	85
17	Prabumulih	1	1	10	7	19
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>	<b>98</b>	<b>195</b>	<b>206</b>	<b>581</b>

Sumber : BPBD Prov. Sumsel, 2013

Keterangan : \* data masih tergabung dengan kabupaten induk

**Tabel 13.** Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2010 – 2013

No	Jenis Bencana	2010	2011	2012	2013	Total
1	Banjir	34	7	32	47	120
2	Kebakaran	27	69	107	106	309
3	Puting Beliung	15	17	37	30	99
4	Tanah Longsor	6	5	19	23	53
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>	<b>98</b>	<b>195</b>	<b>206</b>	<b>581</b>

### **5.3.2. Bencana Non Alam**

Selain dari bencana yang berasal dari alami, terdapat juga bencana yang disebabkan oleh faktor non alam dan faktor manusia. Bencana non alam antara lain kebakaran pemukiman, bentrok masa, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, epidemi, dan wabah penyakit. Konflik secara sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau sekelompok orang, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurnya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial). Sumber-sumber konflik berasal dari : (1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; (2) Perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antar suku, dan antar etnis; Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; (3) Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha, dan; (4) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Jumlah kejadian bencana alam dan non alam di Sumatera Selatan pada kurun tahun 2019 sampai tahun 2012 berjumlah 365 kejadian. Kejadian bencana yang terbesar yakni bencana alam sebanyak 198 kejadian dan bencana alam non alam

---

sebanyak 167 kejadian. Kejadian yang terbesar pada bencana alam yakni banjir dan banjir bandang sebanyak 70 kasus, di peringkat kedua yakni angin puting beliung (APB) sebanyak 69 kasus, dan pada posisi ketiga yakni tanah longsor sebanyak 26 kejadian.

Bencana yang non alami yang menjadi permasalahan yakni kebakaran pemukiman. Kejadian bencana alam yang terbesar dari 15 kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Selatan secara berurutan pada kurun tersebut yakni Kabupaten Empat Lawang (27 kali di 37 desa), Kota Pagaralam (26 kali di 14 desa), Kabupaten Banyuasin (22 kali di 14 desa), Kabupaten Lahat (21 kali di 23 desa), dan Musi Banyusin (20 kali di 29 desa). Akan tetapi ada tiga kabupaten yang kejadian bencana alamnya di bawah lima kabupaten tersebut, tetapi desa yang dilandanya lebih banyak, yakni Kabupaten Muaraenim terjadi di 66 desa dengan kejadian sebanyak 13 kali, kabupaten Musi Rawas dengan 8 musibah melanda 29 desa, dan di Kabupaten Ogan Ilir bencana alam melanda 29 desa dengan 6 kejadian. Konflik sosial dalam periode 2009 sampai 2012 di Sumatera Selatan terdapat 46 kasus.

**Tabel 14.** Batas Wilayah Yang Masih Harus Diselesaikan

No	Segmen	Panjang Batas (Km)	Sudah Selesai (Km)	Belum Selesai (Km)
1	Ogan Ilir dengan Muara Enim	128	38	90
2	Ogan Ilir dengan Banyuasin	27	7	20
3	OKI dengan Banyuasin	214	202	12
4	Muara Enim dengan Lahat	183	138	45
5	Muara Enim dengan Prabumulih	117	20	97
6	Muara Enim dengan Ogan Komering Ulu	143	113	30
7	Muara Enim dengan Musi Rawas	35	0	35
8	Musi Banyuasin dengan Banyuasin	299	198	101
9	Musi Rawas dng Empat Lawang	30	25	5
10	Lahat dengan Musi Rawas	54	10	44
11	Lahat dengan Pagar Alam	90	30	60
12	Lubuklinggau dengan Musi Rawas	52	45	7
13	Ogan Ilir dengan Ogan Komering Ulu	27	23	4
14	Ogan Ilir dengan Ogan Komering Ilir	92	10	82
15	Ogan Ilir dengan Prabumulih	7	0	7
16	Ogan Komering Ulu dengan OKU Selatan	93	38	55
17	Banyuasin dengan Muara Enim	70	10	60
18	OKU Timur dengan OKU Selatan	28	26	2
19	Ogan Ilir dengan OKU Timur	45	22	23

Air sungai di Sumatera Selatan pada umumnya berwarna keruh dan membawa endapan lempung (suspended materials). Hal ini disebabkan salah satunya oleh kegiatan penebangan pohon-pohon (hutan) yang tidak terkendali sehingga terjadi erosi di daerah hulu dan sedimentasi di sepanjang aliran sungai. Kondisi ini selanjutnya berakibat pada pendangkalan aliran sungai dan pergeseran pola aliran sungai.

Air permukaan merupakan sumber daya air yang paling strategis karena dapat dimanfaatkan langsung untuk berbagai keperluan makhluk hidup. Air permukaan dapat langsung digunakan sebagai sumber bahan baku keperluan manusia, hewan, industri, dan kebutuhan lainnya. Keberadaan air permukaan sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu.

Keberadaan air permukaan di wilayah WS Musi juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang berada di wilayah ini fluktuasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan yang mencapai puncaknya genangan lebak sampai 500.000 Ha, sedang pada musim kemarau yang panjang genangan lebak tinggal 5.000 Ha.

Ketergantungan masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran sungai terhadap keberadaan sungai tersebut masih sangat besar terutama dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Malahan masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih. Mereka mengambil air dari sungai kemudian diendapkan atau ditambahkan kaporit, kemudian langsung digunakan sebagai air untuk dimasak atau pada saat musim hujan mereka menampung air hujan untuk dijadikan air minum. Kebiasaan ini sudah terjadi secara turun menurun sejak dahulu. Hanya saja dulu air sungai masih belum terlalu tercemar. Saat ini penggunaan air sungai tanpa pengolahan khusus akan sangat berbahaya bagi kesehatan, karena pencemaran sungai sudah sangat tinggi.

### **5.3.3. Konversi Lahan**

Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan lahan, Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi. Selain itu, Sumatera Selatan juga menjadi salah satu koridor ekonomi Sumatera dan menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus (KEK) di Tanjung Api-api. Penetapan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan terkait dengan ketersediaan potensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tada hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering. Selain juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, komoditas sayuran dan buah-buahan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia secara keseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa, penggunaan bahan baku, peningkatan keterampilan petani dan kemampuan petani mengakses modal perbankan, dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian.

Penetapan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi akan mendorong optimalisasi pengelolaan lahan untuk memanfaatkan potensi sumber daya energi Sumatera Selatan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi untuk penyediaan energi bahan bakar, rumah tangga dan industri. Selain itu, pembangunan koridor ekonomi dan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api juga memerlukan lahan yang luas sehingga mengubah penggunaan lahan. Hal ini menimbulkan konsekuensi berupa permasalahan terkait penggunaan lahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lumbung pangan, lumbung energi, koridor ekonomi dan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api- api antara lain adalah meningkatnya lahan kritis, meningkatnya alih fungsi lahan, maraknya penimbunan rawa, rusaknya daerah hutan mangrove dan pesisir, banyaknya tambang galian C liar dan pembalakan hutan, meningkatnya konflik kepemilikan lahan, serta meningkatnya spekulasi lahan yang menyebabkan harga lahan tinggi.

Berdasarkan data luas penutupan lahan tahun 2010 (Tabel 5-14), penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar digunakan untuk mendukung pertanian lahan kering campur sekitar 32,91 persen, belukar rawa sekitar 10,33 persen, semak belukar sekitar 10,23 persen, perkebunan 8,34 persen dan pertanian lahan kering sekitar 6,48 persen.

---

**Tabel 15.** Luas Penutupan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan 2006-2010  
(Ribu Ha)

Penutupan Lahan	Kode	2006	2008	2010	Distribusi (%)
Hutan Lahan Kering Primer	2001	297.93	295.71	295.71	3.40
Hutan Lahan Kering	2002	300.90	277.06	275.95	3.17
Hutan Mangrove Primer	2004	142.88	104.37	104.36	1.20
Hutan Rawa Primer	2005	30.12	20.83	11.68	0.13
Hutan Tanaman	2006	215.78	217.53	289.10	3.32
Semak Belukar	2007	532.21	518.86	890.08	10.23
Perkebunan	2010	663.02	724.86	725.72	8.34
Permukiman	2012	167.48	167.48	167.48	1.92
Tanah Terbuka	2014	285.93	278.05	305.45	3.51
Awan	2500	3.14	3.14	3.14	0.04
Rumput	3000	267.39	263.91	263.60	3.03
Air	5001	96.85	96.85	96.85	1.11
Hutan Mangrove Sekunder	20041	30.99	67.96	67.96	0.78
Hutan Rawa Sekunder	20051	223.15	204.05	197.08	2.26
Belukar Rawa	20071	1336.13	1340.81	898.63	10.33
Pertanian Lahan Kering	20091	561.93	562.10	564.06	6.48
Pertanian Lahan Kering	20092	2852.50	2864.97	2863.62	32.91
Sawah	20093	404.21	404.22	404.22	4.65
Tambak	20094	59.81	60.11	60.11	0.69
Bandara/Pelabuhan	20121	231.00	231.00	231.00	0.00
Transmigrasi	20122	55.14	55.14	55.14	0.63
Pertambangan	20141	28.20	28.20	28.20	0.32
Rawa	50011	145.85	145.32	133.38	1.53
<b>Total</b>		<b>8701.74</b>	<b>8701.74</b>	<b>8701.74</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5–15 dan 5-16 menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan penggunaan lahan seluas 118.19 ribu Ha antara tahun 2006 – 2008. Pengurangan luas yang terbesar terjadi pada hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder dan semak belukar. Sedangkan penambahan terluas terjadi pada perkebunan, hutan rawa sekunder, pertanian lahan kering campur dan belukar rawa.

**Tabel 16.** Perubahan Luas Penutupan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan 2006-2010 (Ribu Ha)

Penutupan Lahan	Perubahan 2006 - 2008	Perubahan 2008 - 2010	Perubahan 2006 - 2010
Hutan Lahan Kering Primer	-2.22	0.00	-2.22
Hutan Lahan Kering Sekunder	-23.85	-1.11	-24.95
Hutan Mangrove Primer	-38.51	-0.01	-38.52
Hutan Rawa Primer	-9.28	-9.15	-18.44
Hutan Tanaman	1.75	71.57	73.33
Semak Belukar	-13.35	371.22	357.87
Perkebunan	61.84	0.86	62.70
Permukiman	0.00	0.00	0.00
Tanah Terbuka	-7.88	27.40	19.52
Awan	0.00	0.00	0.00
Rumput	-3.48	-0.31	-3.79
Air	0.00	0.00	0.00
Hutan Mangrove Sekunder	36.97	0.00	36.97
Hutan Rawa Sekunder	-19.09	-6.97	-26.06
Belukar Rawa	4.68	-442.18	-437.50
Pertanian Lahan Kering	0.16	1.96	2.13
Pertanian Lahan Kering Campur	12.48	-1.36	11.12
Sawah	0.01	0.00	0.01
Tambak	0.31	0.00	0.31
Bandara/Pelabuhan	0.00	0.00	0.00
Transmigrasi	0.00	0.00	0.00
Pertambangan	0.00	0.00	0.00
Rawa	-0.53	-11.93	-12.47
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Tabel 17. Rangkuman Perubahan Luas Penutupan Lahan T di Provinsi Sumatera Selatan 2006-2010 (Ribu Ha)**

Pengurangan Luas Lahan	Ribu Ha	Penambahan Luas Lahan	Ribu Ha
<b>Tahun 2006 - 2008</b>		<b>Tahun 2006 - 2008</b>	
Hutan Lahan Kering Primer	-2.22	Hutan Tanaman	1.75
Hutan Lahan Kering Sekunder	-23.85	Perkebunan	61.84
Hutan Mangrove Primer	-38.51	Hutan Mangrove Sekunder	36.97
Hutan Rawa Primer	-9.28	Belukar Rawa	4.68
Semak Belukar	-13.35	Pertanian Lahan Kering	0.16
Tanah Terbuka	-7.88	Pertanian Lahan Kering Campur	12.48
Rumput	-3.48	Sawah	0.01
Hutan Rawa Sekunder	-19.09	Tambak	0.31
Rawa	-0.53		
<b>Jumlah</b>	<b>-118.19</b>	<b>Jumlah</b>	<b>118.19</b>
<b>Tahun 2008 - 2010</b>		<b>Tahun 2008 - 2010</b>	
Hutan Lahan Kering Sekunder	-1.11	Hutan Tanaman	71.57
Hutan Mangrove Primer	-0.01	Semak Belukar	371.22
Hutan Rawa Primer	-9.15	Perkebunan	0.86
Rumput	-0.31	Tanah Terbuka	27.40

Hutan Rawa Sekunder	-6.97	Pertanian Lahan Kering	1.96
Belukar Rawa	-442.18		
Pertanian Lahan Kering Campur	-1.36		
Rawa	-11.93		
<b>Jumlah</b>	<b>-473.01</b>	<b>Jumlah</b>	<b>473.01</b>
<b>Tahun 2006 - 2010</b>		<b>Tahun 2006 - 2010</b>	
Hutan Lahan Kering Primer	-2.22	Hutan Tanaman	73.33
Hutan Lahan Kering Sekunder	-24.95	Semak Belukar	357.87
Hutan Mangrove Primer	-38.52	Perkebunan	62.70
Hutan Rawa Primer	-18.44	Tanah Terbuka	19.52
Rumput	-3.79	Hutan Mangrove Sekunder	36.97
Hutan Rawa Sekunder	-26.06	Pertanian Lahan Kering	2.13
Belukar Rawa	-437.50	Pertanian Lahan Kering Campur	11.12
Rawa	-12.47	Sawah	0.01
		Tambak	0.31
<b>Jumlah</b>	<b>-563.94</b>	<b>Jumlah</b>	<b>563.94</b>

Pada periode 2008 – 2010 terjadi perubahan penggunaan lahan 473.01 ribu. Perubahan berupa pengurangan luas lahan terbesar terjadi pada belukar rawa, rawa, hutan rawa primer dan hutan rawa sekunder. Sementara itu perubahan perluasan lahan terbesar terjadi pada Semak belukar, hutan tanaman dan tanah terbuka. Secara kumulatif perubahan penggunaan lahan tahun 2006 – 2010 adalah seluas 563.94 Ha dengan pengurangan luasan terbesar pada belukar rawa, hutan mangrove primer, hutan rawa sekunder, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer dan rawa. Penambahan luas terbesar terjadi pada semak belukar, hutan tanaman, perkebunan, hutan mangrove sekunder, tanah terbuka dan lahan pertanian campur. Dalam periode 2006 – 2010, luas lahan bukaan baru perkebunan meningkat 62.70 ribu Ha.

Perubahan penggunaan lahan periode 2006 -2010 menunjukkan kondisi yang sangat membahayakan karena hutan rawa mengalami perubahan perubahan yang sangat besar. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong pengelolaan dan peruntukan lahan secara baik, transparan, akuntabel dan berbasis hukum sehingga penggunaan lahan akan menjamin pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan.

## **5.4. Kondisi Kependudukan dan Sosial Budaya**

### **5.4.1. Perkembangan Jumlah Penduduk**

Pada tiga dekade terakhir, jumlah penduduk Sumatera Selatan meningkat dari 5,59 juta jiwa pada tahun 1990 menjadi 6,21 juta jiwa pada tahun 2000, 7,45 juta jiwa pada tahun 2010 dan mencapai 7,83 juta jiwa pada tahun 2014. Ini berarti dalam kurun waktu tiga puluh tahun jumlah penduduk Sumatera Selatan bertambah lebih dari dua juta jiwa. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan pun semakin meningkat. Pada 1980, setiap satu kilometer persegi hanya dihuni oleh 46 penduduk sedangkan untuk saat ini terdapat lebih dari 90 jiwa yang menghuni setiap kilometer perseginya.

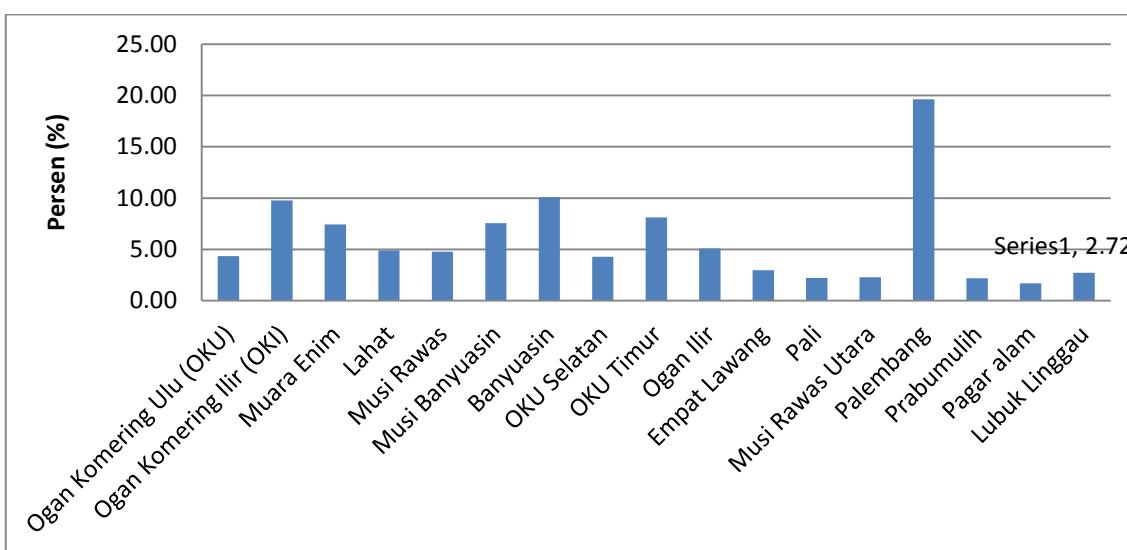
Tabel 18. Indikator Kependudukan Sumatera Selatan 1980 - 2014

Kependudukan	1980	1990	2000	2010	2014
Jumlah Penduduk (jiwa)	3975904	5492993	6210800	7450394	7941495
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	-	3.29	1.28	1.85	1.61
Rasio Jenis Kelamin	102.00	101.00	101.00	103.69	103.34
Kepadatan (jw/ km2)	45.69	63.13	72.10	85.62	91.26

Tabel 19. Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota 2011 - 2013

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	Perubahan (%)
Ogan Komering Ulu (OKU)	120.57	122.04	122.63	0.85
Ogan Komering Ilir (OKI)	43.52	44.14	44.84	1.51
Muara Enim	85.17	86.38	87.72	1.49
Lahat	91.88	93.32	94.36	1.34
Musi Rawas	44.14	44.78	45.80	1.86
Musi Banyuasin	40.10	40.57	40.92	1.02
Banyuasin	62.79	63.73	64.92	1.68
OKU Selatan	58.30	59.13	60.92	2.23
OKU Timur	181.65	184.40	186.12	1.22
Ogan Ilir	154.08	156.38	158.49	1.42
Empat Lawang	87.13	88.30	90.63	1.99
Pali	-	-	*)	
Musi Rawas Utara	-	-	*)	
Palembang	3961.75	4019.69	4106.36	1.81
Prabumulih	396.00	400.89	407.48	1.44
Pagar Alam	220.50	223.98	226.36	1.32
Lubuk Linggau	490.91	497.60	507.38	1.66
Sumatera Selatan	87.20	88.51	89.97	1.58

Untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari terus bertumbuhnya penduduk tersebut salah satunya adalah dengan mengarahkan persebarannya. Namun, persebaran penduduk antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan sendiri masih menunjukkan ketimpangan. Berdasarkan wilayah, penduduk Sumatera Selatan terkonsentrasi di kota Palembang (19,62 persen). Hal ini sejalan dengan peran Kota Palembang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk.



Gambar 7. Persentase Sebaran Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2014 (dalam %)

Menurut gender, jumlah penduduk laki-laki masih lebih besar dibandingkan perempuan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk laki-laki mencapai 4,03 juta, sedangkan penduduk perempuan sebesar 3,90 juta. Dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) sebesar 103,34, artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 103 penduduk laki-laki. RJK diatas 100 ini menunjukkan proporsi penduduk yang maskulin.

Jika dilihat menurut kelompok umur, rasio jenis kelamin tertinggi terdapat pada kelompok umur 0 – 9 yaitu 105,12 sedangkan paling rendah pada kelompok umur 60 tahun ke atas yang hanya sebesar 92,15. Gambaran ini sejalan dengan kenyataan bahwa pada usia tua kemampuan bertahan hidup

(*survival rate*) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Berdasarkan kabupaten/kota, RJK tertinggi terdapat di Kabupaten MUBA sebesar 104,95. RJK terendah terdapat di Kabupaten Ogan Ilir sebesar 100,30 dan Kota Palembang sebesar 100,37. Sebagian besar kabupaten/kota memiliki RJK di atas RJK provinsi. Hanya enam kabupaten/kota yang memiliki RJK dibawah RJK provinsi. Keenam kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Pali, Kota Prabumulih Kab. Muaratara.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) menggambarkan rata-rata pertambahan penduduk pada periode tertentu. Pada tahun 2014 LPP Sumatera Selatan bernilai 1,50 persen, artinya pada periode 2010-2014 rata-rata jumlah penduduk meningkat 1,50 persen per tahun. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka LPP periode 2000-2010 sebesar 1,85 persen. Jika dibandingkan LPP periode 1990- 2000 sebesar 1,28 persen, laju pertumbuhan penduduk periode satu dasawarsa terakhir ini menjadi sangat besar. Konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk adalah peningkatan fasilitas umum dan permintaan pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, pelayanan lansia dan sebagainya).

Tabel 20. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota, di Provinsi Sumatera Selatan, 1990-2014 (%)

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>1990- 2000</b>	<b>2000- 2010</b>	<b>2010- 2013</b>
Ogan Komering Ulu	0,94	3,04	1.51
Ogan Komering Ilir	1,86	2,01	1.57
Muara Enim	1,98	2,00	1.68
Lahat	0,77	1,22	1.21
Musi Rawas	1,59	1,88	1.50
Musi Banyuasin	1,54	3,25	1.69
Banyuasin	-	1,62	1.55
OKU Selatan	-	0,62	1.53
OKU Timur	-	1,53	1.23
Ogan Ilir	-	1,62	1.40
Empat Lawang	-	0,74	1.47
Pali	-	-	1.61
Muratara	-	-	1.49
Palembang	0,68	1,78	1.51
Prabumulih	-	2,95	1.64
Pagar Alam	-	1,21	1.16
Lubuk Linggau	-	2,30	1.60
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>1,28</b>	<b>1,85</b>	1.50

LPP antara kabupaten/kota dalam setahun terakhir cukup bervariasi. Jika diamati, trend LPP per kabupaten/kota menunjukkan pola hampir seragam, menunjukkan penurunan. Pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan periode 2010-2014 diindikasikan akan cenderung turun. Salah satu penyebabnya adalah penurunan fertilitas. Estimasi *Total Fertility Rate* (TFR) hasil Supas 2005 sebesar 2,20 sedangkan hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 2,60. Tetapi khususnya di perkotaan, diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding pedesaan, penyebab utamanya tentu bukan tidak lain adalah karena semakin besarnya laju urbanisasi.

Tabel 21. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan di Provinsi Sumatera Selatan, 2014 (%)

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+	
Ogan Komering Ulu	28.81	67.23	3.96	48.75
Ogan Komering Ilir	29.91	66.08	4.00	51.32
Muara Enim	30.50	65.57	3.93	52.52
Lahat	29.11	65.92	4.98	51.70
Musi Rawas	29.37	66.19	4.45	51.09
Musi Banyuasin	30.85	65.55	3.60	52.56
Banyuasin	30.17	65.89	3.94	51.76
OKU Selatan	29.63	66.86	3.51	49.56
OKU Timur	28.17	66.34	5.49	50.75
Ogan Ilir	29.55	66.00	4.46	51.52
Empat Lawang	30.38	65.01	4.61	53.82
Pali	34.17	62.17	3.66	60.85
Muratara	32.09	64.38	3.54	55.33
Palembang	26.83	69.28	3.89	44.33
Prabumulih	29.98	66.51	3.51	50.36
Pagar Alam	28.03	66.98	5.00	49.31
Lubuk Linggau	29.54	67.01	3.45	49.23
Sumatera Selatan	29.28	66.60	4.12	50.15

Pada periode 1980-2013 angka beban tanggungan penduduk cenderung menurun. Pada tahun 1980 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 88 penduduk tidak produktif, angka tersebut turun menjadi 80,07 persen pada tahun 1990 dan sebesar 61,42 persen tahun 2000. Tahun 2010 angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 52,27 persen, sedangkan pada 2014 berada pada posisi 50,15 persen artinya dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 50 penduduk usia tidak produktif.

Semakin kecilnya angka beban ketergantungan memungkinkan penduduk usia produktif untuk lebih meningkatkan kualitas dirinya.

Penduduk Sumatera Selatan tahun 2014 terkategorii sebagai penduduk usia muda, tercermin dari dominasi penduduk usia muda. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2014, jumlah penduduk usia 0-14 tahun mencapai 2,32 juta. Penduduk usia muda, baik laki-laki maupun perempuan, bila tidak mendapat perhatian serius bisa menjadi beban pembangunan.

Peningkatan penduduk tua (usia 65+) diduga terjadi karena semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Struktur umur penduduk tahap transisi ini juga ditemui di hampir seluruh kabupaten/kota. Lebih dari separuh kabupaten/kota memiliki proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) kurang dari 30 persen, sedangkan proporsi penduduk lansia umumnya bernilai kurang dari 5 persen, kecuali di Kabupaten OKU Timur sebesar 5,19 persen dan Kota Pagaralam sebesar 5,00 persen.

Penurunan angka beban ketergantungan diikuti oleh penurunan proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun). Pada tahun 1980 sekitar 44,10 persen penduduk Sumatera Selatan berusia muda (0-14 tahun), angka tersebut turun menjadi 41,68 persen pada tahun 1990. Pada tahun 2000 persentase penduduk usia 0-14 tahun mencapai 34,94 persen, tahun 2010 turun menjadi 30,25 persen dan tahun 2014 menjadi 29,28 persen. Struktur umur penduduk Sumatera Selatan berada pada tahap transisi dari penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk muda (di bawah 15 tahun) kurang dari 40 persen, sementara proporsi penduduk tua (usia 65+) masih kurang dari 5 persen. Pada tahun 1980, proporsi penduduk usia 65 tahun atau lebih mencapai 2,61 persen, meningkat menjadi 3,11 persen pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 4,12 persen pada tahun 2014.

#### **5.4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurun Lapangan Pekerjaan Utama**

Situasi Ketenagakerjaan Sumatera Selatan selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan, walaupun tidak semua indikator ketenagakerjaan menunjukkan penurunan. Hal ini ditandai dengan semakin turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu dari 69,56 persen tahun 2012, terus turun hingga menjadi 68,85 persen pada tahun 2014. TPAK merupakan indikator kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Ternyata penurunan TPAK tahun 2014 diimbangi oleh peningkatan tingkat kesempatan kerja (TKK), yaitu suatu indikator penilaian banyaknya angkatan kerja tertampung dalam pasar kerja. Hal ini menunjukkan kualitas indikator ketenagakerjaan tahun 2014 masih lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pilihan bekerja di sektor pertanian masih mendominasi pasar kerja di Sumsel dengan persentase sebesar 53,37 persen, diikuti oleh sektor manufaktur sebesar 10,77 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 35,87 persen. Transformasi sektoral tenaga kerja selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pekerja di sektor pertanian semakin menurun, hal ini mengindikasikan transformasi perekonomian Sumatera Selatan dari tradisional mengarah ke industri dan jasa-jasa. Komplemen dari TKK adalah indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun 2012 TPT mencapai 5,57 persen, dan angka ini menurun menjadi 4,96 persen tahun 2014. Walau menurun, secara absolut jumlah penganggur masih cukup tinggi yaitu sebesar 192,868 orang, dan sekitar 60 persen diantaranya belum pernah bekerja. Tingginya jumlah penganggur tersebut menunjukkan banyaknya pencari kerja yang tidak tertampung pada lapangan kerja.

Di Sumatera Selatan, pada tahun 2014 tingkat setengah pengangguran masih cukup tinggi mencapai 41 persen. Artinya dari tiap 100 angkatan kerja yang sudah bekerja sebanyak 41 orang mempunyai jam kerja yang relatif kecil atau kurang dari 35 jam per minggu. Hal ini menandakan bahwa produktivitas pekerja di Sumatera Selatan cenderung masih rendah. Tingginya proporsi

---

pekerja paruh waktu menunjukkan indikasi penduduk usia ekonomi aktif belum sepenuhnya memanfaatkan *skill* dan kapasitas-kapasitas lain. Mereka terpaksa menerima atau melakukan pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan *skill* atau pendidikan yang dimiliki demi memenuhi kebutuhan hidup sembari menunggu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Walaupun sudah menunjukkan indikasi menurun dari 14,87 persen pada tahun 2011 menjadi 9,45 persen pada tahun 2014, dapat diduga bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok pengangguran terdidik adalah para pencari kerja usia muda atau pencari kerja pertama kali yang baru tamat dari pendidikan sekolah.

Pada periode 2013-2014, peningkatan laju pertumbuhan tenaga kerja penduduk laki-laki sebesar 1,72 persen, begitu juga dengan jumlah angkatan kerja yang mengalami kenaikan sebesar 3,90 persen. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan, dimana laju pertumbuhan tenaga kerja penduduk perempuan tumbuh sebesar 1,69 persen, sedangkan laju angkatan kerjanya tumbuh negatif sebesar 3,90 persen. Jika melihat kondisi indikator TPAK. Baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, TPAK penduduk laki-laki pada periode 2010-2014 selalu di atas 80 persen, sementara TPAK perempuan rata-rata 50 persen. Hal ini sejalan dengan budaya masyarakat yang menganggap bahwa bekerja adalah tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga semen-tara peran utama perempuan adalah mengurus rumah tangga.

TPT penduduk laki-laki cenderung lebih rendah dibandingkan perempuan, kecuali pada tahun 2009 TPT perempuan sedikit lebih rendah dibanding TPT laki-laki. Pada tahun 2013, perbedaan TPT penduduk laki-laki dan perempuan telah menyempit, dimana TPT perempuan mencapai 4,28 persen dan TPT laki-laki Secara absolut jumlah angkatan kerja laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan. Jumlah angkatan kerja laki-laki tahun 2013 mencapai 2.321.892 orang, sementara angkatan kerja perempuan sekitar 1.382.240 orang. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di kota terutama disebabkan oleh pertumbuhan alamiah penduduk dan tingginya arus masuk

---

angkatan kerja dari pedesaan serta banyaknya pencari kerja sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan. Sementara itu kesempatan kerja pada sektor-sektor produktif di perkotaan tidak mampu menampung seluruh pencari kerja. Ini berakibat pada tingginya tingkat pengangguran.

Tabel 22. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan 2012 - 2014

Variabel Kependudukan	2012	2013	2014
Angkatan Kerja ( 000 jiwa )	3603.00	3704.10	3885.70
TPAK ( %)	69.56	66.75	68.85
Tingkat Setengah Pengangguran (%)	39.92	45.06	41.99
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT(%)	5.57	4.84	4.96
Tingkat Kesempatan Kerja/TKK (%)	94.30	95.16	95.81
Tingkat Pengangguran Terdidik (%)	18.32	10.48	9.45
UMP (Rp. 000)	1195.22	1630.00	1825.60
Bekerja di sektor Agraris (%)	56.37	54.86	53.37
Bekerja di sektor Manufaktur(%)	11.16	10.37	10.77
Bekerja di sektor Jasa(%)	32.48	34.76	35.87

TPAK penduduk pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK penduduk perkotaan. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang secara ekonomi berpotensi untuk menghasilkan barang dan jasa lebih banyak berada di pedesaan. Kegiatan perekonomian di pedesaan yang bercorak agraris lebih banyak menyerap tenaga kerja dibanding perkotaan. Selain itu, sifat dan aktifitas pekerjaan masih dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga, bahkan memungkinkan sekali bagi kaum perempuan pedesaan bekerja sambil mengasuh anak. Sebaliknya, kondisi umum angkatan kerja di pedesaan tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan dan mau menerima pekerjaan-pekerjaan sektor tradisional. Perspektif ini sangat berhubungan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan.

Transformasi perekonomian suatu negara dari tradisional menuju negara industri biasa ditandai oleh transformasi sektoral tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah (primer) ke sektor-sektor berproduktivitas lebih tinggi (sektor sekunder dan tersier), sehingga, persentase tenaga kerja sektor primer

---

akan menurun dan sebaliknya tenaga kerja sektor sekunder dan tersier justru meningkat. Pada tahun 2013, dari sekitar 3.524.883 orang penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan, lebih dari setengahnya (54,86 persen) bekerja pada sektor pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan. Sektor penyerap tenaga kerja terbesar kedua adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (15,46 persen), diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 13,44 persen. Penyerapan tenaga kerja menurut kabupaten/kota memiliki pola hampir serupa. Sektor pertanian menjadi penyerap utama tenaga kerja di seluruh kabupaten, sementara sektor tersier menjadi penyerap utama tenaga kerja di wilayah Kota Palembang, Lubuklinggau, dan Prabumulih.

#### **5.4.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin**

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hal-hal dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Untuk mengukur kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).

Tabel 23. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 – 2014

Indikator	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	1042.00	1108.20	1085.80
Persentase Penduduk Miskin (%)	13.50	14.10	13.62
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.85	2.49	2.41
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.43	0.73	0.62
Garis Kemiskinan (Rp)	259668	291058	307488

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (susenas), batas garis kemiskinan (GK) Sumatera Selatan tahun 2014 sebesar 307.488 rupiah per

---

kapita per bulan. Nilai inilah yang menjadi penentu batas kriteria penduduk miskin atau tidak miskin di Sumatera Selatan pada tahun 2014. Berdasarkan GK, jumlah penduduk miskin Sumatera Selatan tahun 2014 tercatat sekitar 1.085 juta jiwa atau berkurang sekitar 22 ribu jiwa dibanding kondisi periode yang sama setahun sebelumnya. Secara proporsi, penduduk miskin tahun 2014 mencapai sekitar 13,62 persen dari seluruh penduduk Sumatera Selatan.

Secara umum penurunan jumlah penduduk miskin sangat berhubungan erat dengan perbaikan angka inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terutama karena kenaikan rata-rata upah harian buruh tani, buruh bangunan dan peningkatan produksi padi serta peningkatan nilai tukar petani. Penurunan jumlah, ternyata juga diikuti dengan penurunan kedalaman kemiskinan. Selama dua tahun terakhir kedalaman kemiskinan yang menggambarkan seberapa jarak pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, menyempit dari sekitar 2,49 menjadi 2,41. Hal ini berarti pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Demikian juga dengan indikator keparahan kemiskinan, menggambarkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin berkurang dari sebesar 0,73 pada tahun 2013 menjadi 0,62 pada tahun 2014.

Tingkat kemiskinan suatu masyarakat memiliki hubungan erat dengan ketimpangan pendapatan. Pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran kecuali bagi golongan tertentu saja. Pada banyak literatur disebutkan bahwa ada hubungan yang sistematis antara tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan, meskipun hubungan tersebut tidak berlaku umum dan berbeda antar wilayah. Penelitian yang dilakukan oleh Semoa dan Testa mengenai hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Virginia Barat pada tahun 1980 dan 1990 menyatakan adanya hubungan yang searah antara perubahan tingkat kemiskinan dan perubahan ketimpangan pendapatan, dalam artian jika tingkat kemiskinan meningkat maka ketimpangan pendapatan juga meningkat.

Koefisien gini merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Pada periode 2011-2012, koefisien gini

---

Sumatera Selatan merambat naik, dari sebesar 0,368 menjadi 0,382 menunjukkan pendapatan antar penduduk Sumatera Selatan semakin timpang. Hal ini berarti di Sumatera Selatan tidak terjadi hubungan timbal balik antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, karena penurunan angka kemiskinan justru diikuti dengan peningkatan gini ratio.

Kriteria kemiskinan Bank Dunia dapat digunakan sebagai indikator pembanding. Kriteria bank dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen berpendapatan terbawah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan teratas. Tingkat pemerataan pendapatan diukur dengan memperhatikan proporsi pendapatan dari 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Pada periode 2012 - 2014 terjadi penurunan persentase pengeluaran pada kelas 40 persen terbawah bersamaan dengan peningkatan persentase pengeluaran di kelas 20 persen teratas. Dengan kata lain, kemerataan cenderung memburuk pada periode 2012 - 2013. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, kondisi ketimpangan pendapatan penduduk suatu negara, dapat dilihat dari persentase pengeluaran penduduk pada kelompok pendapatan 40 persen terbawah, jika :

- bernilai < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- bernilai 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
- bernilai > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Berdasarkan kriteria ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia, pada tahun 2014 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan tergolong rendah. Hal ini tampak dari proporsi pengeluaran kelompok 40 persen terendah bernilai lebih dari 18,34 persen.

Pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan telah dilakukan dengan beberapa pendekatan program/kegiatan. Sejak tahun 2011 program penanggulangan kemiskinan antara lain dilakukan dengan program MDGs yang difokuskan pada goal 1 (Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan). Pada

---

tahun 2013 kemiskinan di Sumatera Selatan dilengkapi pula lewat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang diintegrasikan dengan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sebagai langkah awal, pada tahun 2013 dilakukan rekonsilidasi dengan menetapkan lokasi Quickwins di beberapa Kab/kota untuk Tahun 2014. Pemerintah Pusat menetapkan 2 Kab/Kota itu sebagai lokasi quickwins, yaitu Kabupaten OKI (Kecamatan Sirah Pulau Padang) dan Kota Palembang (Kecamatan Kertapati). Provinsi Sumatera Selatan menambahkan 2 lagi lokasi quickwins Kab/Kota berdasarkan prioritas dan perangkingan, melengkapi yang telah ditetapkan pusat, yaitu Kabupaten Ogan Ilir (Kecamatan Pemulutan, dan Kabupaten Muara Enim (Kecamatan Tanjung Agung).

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2004-2011 menunjukkan kecenderungan menurun. Data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan pada tahun 2004 tercatat sebesar 1.379,30 jiwa (20,92 persen) dan berkurang menjadi 1.057,03 ribu jiwa (13,78 persen) pada tahun 2012. Kondisi ini menempatkan Provinsi Sumatera Selatan termasuk kelompok provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional (12,49 persen). Jika dianalisis persebarannya menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, hingga tahun 2012 63 persen lebih penduduk miskin Sumatera Selatan tinggal tersebar di perdesaan. Namun laju penurunan penduduk miskin di perdesaan cenderung lebih cepat daripada di perkotaan dalam lima tahun terakhir (2005-2010).

Tabel 24. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Kota		Desa		Total	
	Jumlah (Ribu)	Persen (%)	Jumlah (Ribu)	Persen (%)	Jumlah (Ribu)	Persen (%)
2004	455.10	20.13	924.20	21.33	1379.30	20.92
2005	557.80	21.19	871.20	20.90	1429.00	21.01
2006	559.50	22.32	847.40	20.14	1446.90	20.99
2007	545.90	20.30	785.90	18.43	1331.80	19.15
2008	514.70	18.87	734.90	17.01	1249.60	17.73
2009	470.03	16.93	697.85	15.87	1167.87	16.28

2010	471.20	16.73	654.50	14.67	1125.70	15.47
2011	407.42	14.94	654.45	13.39	1061.87	13.95
2012	388.65	14.16	668.38	13.57	1057.03	13.78
2013	375.96	13.28	732.25	14.50	1108.21	14.06

Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin adalah tertinggi, yaitu sebesar 25,45 persen pada tahun 2008 dan menjadi 18,99 persen pada tahun 2011. Selanjutnya Kabupaten Musi Rawas adalah kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi kedua yaitu sebesar 24,27 persen pada tahun 2008 dan turun menjadi 18,25 persen pada tahun 2011. Persentase kemiskinan tertinggi ketiga ada di Kabupaten Lahat yaitu sebesar 23,21 persen pada tahun 2008, dan turun menjadi 17,92 persen pada tahun 2011. Sementara, tingkat kemiskinan yang terendah tahun 2011 adalah Kabupaten OKU Timur, Kota Pagaralam dan OKU Selatan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah upaya pengurangan kemiskinan harus memperhatikan karakteristik wilayah dan mengutamakan sinergitas kebijakan Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 25. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2012 (%)

<b>Kab/Kota</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
OKU	14.64	13.17	12.28	11.58	11.19
OKI	17.67	16.17	15.98	15.06	14.53
Muara Enim	17.98	15.96	14.51	13.71	13.21
Lahat	23.21	20.98	19.03	17.92	17.45
Musi Rawas	24.27	21.40	19.38	18.25	17.67
MUBA	25.45	22.76	20.06	18.99	18.29
Banyuasin	15.38	13.72	12.39	11.66	11.27
OKU Selatan	14.56	12.73	11.53	10.84	10.49
OKU Timur	12.12	9.95	9.81	9.23	8.98
Ogan Ilir	17.78	15.65	13.98	13.18	12.79
Empat Lawang	18.37	15.80	14.74	13.82	13.36
Palembang	16.66	14.75	15.00	14.13	13.59
Prabumulih	15.39	13.93	12.94	12.19	11.71
Pagaralam	10.23	9.66	9.81	9.24	9.00
Lubuklinggau	17.36	15.12	15.30	14.43	13.88
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>17.67</b>	<b>16.28</b>	<b>14.80</b>	<b>13.95</b>	<b>13.48</b>

## 5.5. Kondisi Kelembagaan Pendukung Pada Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet

Organisasi/lembaga baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengembangan agribisnis karet di Sumatera Selatan jumlahnya cukup banyak, diantaranya : (1) Di Tingkat Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Lembaga Riset Perkebunan Nusantara; (2) Di tingkat Provinsi Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan, Badan Penelitian Pengembangan Inovasi Daerah Balitbangnovda); Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Balai Pengkajian dan Peneratapan Teknologi Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Balai Penelitian Karet Sembawa, Universitas Sriwijaya, Badan Penyuluhan Pertanian Provinsi; (3) Di Tingkat Kabupaten Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas; Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas; Kelompok petani karet di Musi Rawas; Koperasi Petani Karet: Pedagang Pengumpul di Musi Rawas; Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapindo) Cabang; Perusahaan Industri Pengolahan Karet *Crumb Rubber milik swasta*; Perusahaan Industri Pengolahan Karet *Crumb Rubber* milik PTPN VII; Sekolah Pembanguan Pertanian (SPP) Negeri Sembawa.

Di tingkat pusat, peranan organisasi/lembaga di tingkat pusat terlihat ada di semua subsistem agribisnis karet rakyat, tetapi lebih banyak bergerak di fasilitasi subsistem budidaya dan pengolahan produk setengah jadi, sementara itu peranan pelaku usaha masih relatif belum dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan agribisnis karet rakyat di Sumatera Selatan belum optimal dilakukan oleh pelaku usaha yang difasilitasi oleh pemerintah

---

kabupaten/kota. Di tingkat provinsi Sumatera Selatan, peranan organisasi/lembaga di tingkat provinsi lebih banyak bergerak di subsistem penunjang dan subsistem industri produk setengah jadi, namun peranan pada subsistem hulu dan subsistem budidaya yang bersifat koordinatif dan meningkatkan kerjasama antar wilayah kabupaten/kota masih sangat kurang.

Di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Selatan, kondisinya terlihat cukup mengkhawatirkan karena rendahnya peranan organisasi/lembaga pelaku usaha dan peran fasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Peranan kabupaten/kota terlihat umumnya lebih banyak bergerak di subsistem budidaya, kurang bergerak pada pengembangan subsistem hulu (penyediaan sarana produksi seperti industri pembibitan, pupuk, alsintan), padahal permasalahan rendahnya tingkat produktivitas dan mutu bokar umumnya sangat terkait kondisi peranan organisasi/lembaga pelaku usaha dan kebijakan kelembagaan dari pemerintah untuk penyediaan kebutuhan sarana produksi seperti industri pembibitan, pupuk, alsintan tersebut. Kondisi ini dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang faktor penyebab produktivitas rendah, mutu bokar rendah dan industri hilir karet belum berkembang di Sumatera Selatan.

Perhatian organisasi/lembaga pelaku usaha (petani) dan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota sebagai lembaga terdekat dengan sentra produksi karet rakyat, tercermin pada masih adanya masalah rendahnya tingkat produktivitas dan mutu bokar yang masih sulit diatasi dan memerlukan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah lebih maju dalam hal tingkat produktivitas dan mutu bokar. Tidak hanya lemah peranan pada subsistem hulu dan budidaya, ternyata peranan organisasi/lembaga pelaku usaha dan fasilitasi pemerintah di tingkat kabupaten/kota juga terlihat sangat kurang bahkan tidak dikatakan sangat jarang memperhatikan peningkatan pengelolaan untuk pengembangan subsistem industri pengolahan barang jadi dari karet (industri hilir) maupun dalam subsistem pengembangan industri hilir karet rakyat. Rendahnya pengelolaan pada subsistem hilir ini, menyebabkan kurang optimalnya pengembangan nilai tambah produk karet untuk dinikmati oleh masyarakat pelaku usaha lokal, sehingga dapat

---

mengakibatkan pada tidak optimalnya kontribusi karet rakyat pada pengembangan ekonomi di wilayah sentra produksi.

## **5.6. Kondisi Prasarana dan Sarana Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet**

### **5.6.1. Jaringan Irigasi**

Karet bukan komoditas yang membutuhkan infrastruktur irigasi. Namun demikian, pengembangan infrastruktur akan mempengaruhi pengembangan komoditas karet. Ketersediaan jaringan irigasi akan mengubah lahan karet menjadi komoditas lain yaitu pangan terutama beras. Pangan harus menjadi prioritas karena menyangkut ketahanan pangan nasional dan daerah. Lahan-lahan usaha karet dapat diintegrasikan dengan pengembangan pangan lahan kering dan juga dengan ternak dalam rangka diversifikasi usaha, peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani. Pemanfaatan lahan umur karet masih muda dan pola perbaikan pola tanam yang tepat akan sangat bermanfaat bagi pengembangan karet terintegrasi dengan pangan dan ternak.

Infrastruktur lainnya yang berkaitan erat dengan bidang perekonomian di Sumatera Selatan adalah infrastruktur Daerah Rawa dan Daerah Irigasi yang mendukung sektor pertanian terutama produksi beras. Provinsi Sumatera Selatan memiliki luasan irigasi baku seluas 269.209 Ha dan luas potensial sebesar 211.596 Ha. Dari luasan potensial tersebut, baru 67,97% atau seluas 143.842 Ha yang telah menjadi daerah fungsional yang terdiri dari irigasi teknis seluas 90.965 Ha, irigasi semi teknis 48.817 Ha dan irigasi sederhana seluas 4.060 Ha. Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki luasan daerah rawa yang tersebar di pantai timur Sumatera Selatan yang terdiri dari rawa pasang surut dan rawa non-pasang surut. Rawa pasang surut memiliki luasan baku sebesar 584.956 Ha dan luasan potensial sebesar 538.658 Ha. Dari luasan potensial tersebut, baru 40% atau seluas 215.866 ha rawa pasang surut yang berfungsi. Untuk rawa non-pasang surut memiliki luasan baku sebesar 114.274 Ha dan luasan potensial sebesar 100.474 Ha. Dari luasan potensial tersebut, baru 30% atau seluas 30.775 ha rawa non pasang surut yang berfungsi. Tantangan ke depan yang dihadapi adalah masih banyaknya lahan potensial yang belum dikembangkan menjadi daerah irigasi teknis. Selain itu perlunya mempertahankan dan menjaga luasan daerah irigasi dan rawa tersebut agar tidak terjadi penyusutan dan alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan. Pemanfaatan lahan irigasi dan

---

rawa di masa mendatang tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan nasional, namun juga mampu mensejahterakan masyarakat.

### 5.6.2.Sarana Produksi

Sumatera Selatan memiliki BUMN yang memproduksi pupuk yaitu PT Pusri. Namun demikian tingkat penggunaan pupuk oleh petani masih relatif rendah. Selain pupuk, di Sumatera Selatan terdapat 26 penangkar benih karet yang memiliki kapasitas produksi 12 juta polybag benih per tahun. Saat ini produktivitas tanaman karet di Sumatera Selatan masih relatif rendah dan berpotensi untuk ditingkatkan. Sekitar 60% dari seluruh kebun yang menggunakan klon unggul, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar yang mencapai 85 hingga 100 persen.. Potensi klon unggul yang dihasilkan oleh Balai Peneltian Karet Sembawa cukup banyak. Saat ini tingkat adopsi teknologi rekomendasi paket teknologi karet yang diterapkan oleh petani baru mencapai kisaran 40 – 60 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar yang mencapai 80 hingga 95 persen.

Balai Penelitian Karet Sembawa telah menghasilkan klon-klon karet unggul yang direkomendasikan. Klon anjuran komersial dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok klon penghasil lateks dan penghasil lateks-kayu, seperti terinci pada Tabel 5....

Tabel 26. Daftar Klon Karet Unggul anjuran Komersial dari Balai Penelitian Karet Sembawa.

No	Kelompok Klon	Klon Unggul Anjuran
1	Klon Penghasil Lateks	IRR 104, IRR 112, IRR 118, IRR 220, BPM 24, PB 260, PB 330, dan PB 340.
2	Klon Penghasil Lateks-Kayu	RRIC 100, IRR 5, IRR 39, IRR 42, IRR 107, dan IRR 119.
3	Benih Anjuran untuk Batang Bawah	AVROS 2037, GT 1, BPM 24, PB 260, RRIC 100, dan PB 330.

[www.bibitkaretunggulan.blogspot.com](http://www.bibitkaretunggulan.blogspot.com)

### **5.6.3. Sumberdaya Pendukung Pengembangan SDM dan Teknologi**

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan sub sektor perkebunan di Sumatera Selatan. Dalam pembangunan perkebunan ada 2 (dua) sisi sumber daya manusia yang berperan yaitu jumlah tenaga / petugas yang tersedia sebagai pendamping, pembina maupun sebagai penyuluhan petani perkebun dan kualitas SDM petani pekebun sebagai pengelola lahan usaha.

Data tahun 2013 menunjukkan bahwa karet melibatkan lebih dari 735 ribu KK petani pekebun. Sedangkan jumlah SDM petugas yang tercatat di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembina, pendamping maupun penyuluhan adalah sebanyak 152 orang yang terdata di Dinas Perkebunan Provinsi. Sumber daya manusia ( petugas ) ini belum termasuk petugas – petugas yang ada di daerah Kabupaten / kota yang membidangi perkebunan. Bila dilihat dari jumlah petugas dan SDM petani pekebun secara kuantitas, maka hal ini merupakan suatu kekuatan yang potensial dalam kegiatan pembangunan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah petugas lapangan dalam mendampingi masih kurang. Pembinaan petani mencakup berbagai aspek budidaya tanaman seperti sekolah lapang, penangkar, pembinaan pemasaran dan lain-lain.

Penemuan terakhir di bidang pemuliaan karet oleh Lembaga Riset Perkebunan Nusantara (LRPN) menghasilkan klon baru yang memiliki pertumbuhan cepat, se-hingga masa tanaman belum menghasilkan dapat dipersingkat dari 5 tahun menjadi 3 tahun 6 bulan. Klon-klon baru tersebut diberi nama IRR (Indonesian Rubber Research) dan yang terbaik terdapat 5 klon yaitu IRR 100, IRR 111, IRR 112, IRR 117, dan IRR 118. Keragaan pertumbuhan kelima klon tersebut dalam bentuk per-tumbuhan lilit batang dan persentase matang sadap pada umur 3,5 tahun. Dengan kriteria matang sadap 60 persen tanaman telah men-capai ukuran lilit batang 45 cm, maka matang sadap kelima klon baru tersebut sudah ter-capai pada umur 3,5 tahun. Sedangkan klon PR 261 sebagai pembanding di-perkirakan baru mencapai

---

matang sadap umur 4,5 tahun. Di samping waktu matang sadap lebih cepat klon baru ini juga memiliki potensi hasil lateks dan kayu lebih tinggi.

Dengan semakin terbatasnya potensi kayu dari hutan alam maka fungsi kebun karet sebagai sumber kayu dan biomassa lainnya akan semakin penting pada abad ke-21 ini. Untuk meraih peluang tersebut maka pe-muliaan karet tidak hanya ditujukan kepada penemuan klon unggul penghasil lateks tetapi juga sebagai peng-hasil kayu (timberlatex clones). Pada saat ini telah ditemukan sejumlah klon yang diunggulkan dari segi produktivitas lateks dan kayu. Klon unggul terbaik mampu meng-hasilkan kayu log antara 236 dan 288 m<sup>3</sup> per hektar pada umur 18 th di-samping produksi lateks sebesar antara 1.306 dan 2.270 kg karet kering/ha /tahun. Klon IRR 33 lebih unggul se-bagai penghasil kayu dari pada peng-hasil lateks, sedangkan klon lainnya (IRR 30, IRR 32, IRR 39, dan IRR 54) unggul sebagai penghasil lateks maupun kayu. Produktivitas kayu dari klon tersebut diperkirakan akan men-capai lebih dari 300 m<sup>3</sup> per hektar apabila dipanen pada akhir umur ekonomis karet (25-30 tahun). Dari hasil kajian dilaksanakan oleh beberapa instansi seluruh tanaman karet punya manfaat. Tunggul dan cabang akar (15%) untuk arang dan papan partikel, batang bekas sadapan (15-20%) untuk papan gypsum dan parquet (flooring), batang bekas sadapan (20- 25%) untuk furniture, kayu lapis dan kayu rekonstitusi (LVL), dan batang di atas batang (10-15%) untuk kayu olahan. Sementara cabang utama dan kedua bisa menghasilkan produk kerajinan tangan dan mainan serta papan serat, sedangkan ranting dan daun bisa untuk kompos dan arang. Permintaan pasar terhadap kayu karet cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari hasil ekspor Thailand dan Malaysia sejak 1995. Saat ini kedua negara tersebut mampu mengekspor produk kayu karet dengan devisa mencapai 1 miliar dolar.

#### **5.6.4. Potensi Pasar Komoditas**

Sumatera Selatan memiliki jumlah pabrik pengolahan bahan olahan karet sebanyak 32 unit. Selain PTPN yang memiliki empat unit pengolahan, telah terdata 24 Perusahaan karet di Sumatera Selatan dengan kapasitas 1.26 juta

---

ton. Produksi riil total mencapai 782 ribu ton dan masih defisit 478 ribu ton. Hasil analisis dari data survei pendapatan rumah tangga perkebunan tahun 2013 BPS menunjukkan bahwa 89 persen petani mengangkut hasil karet dari kebun ke rumah dengan sepeda motor, 7 persen dengan sepeda dan 4 persen dipanggul. Dalam menjual hasil hanya 5 persen petani yang menjual melalui kelompok, 14 persen petani mengangkut karet ke tengkulak dan 81 persen petani didatangi oleh tengkulak karet ke rumah-rumah.

#### **5.6.5. Sumberdaya Transportasi**

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tentu saja menyebabkan meningkatnya pergerakan orang maupun barang. Infrastruktur utamanya infrastruktur jalan dituntut agar mampu memfasilitasi semakin meningkatnya pergerakan orang dan barang tersebut. Keberadaan infrastruktur jalan menjadi sangat vital karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah.

Jaringan jalan berstatus di Provinsi Sumatera Selatan sendiri hingga pada tahun 2013 mencapai 17.248,65 km, yang terdiri atas jalan dengan status jalan nasional sebesar 8,37% atau sepanjang 1.444,26 km, jalan provinsi sebesar 8,48% atau sepanjang 1.462,87 km dan jalan kabupaten/kota sebesar 83,15% atau sepanjang 14.341,52 km yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari total keseluruhan panjang jalan tersebut, tentu saja tidak semua dalam kondisi baik/mantap. Berdasarkan data tahun 2013, secara keseluruhan kondisi jalan mantap baru mencapai 64,84% dari total seluruh jaringan jalan. Apabila diuraikan berdasarkan status jalan, kondisi jalan mantap kewenangan nasional sebesar 96,20%, jalan mantap kewenangan provinsi sebesar 81,59% dan jalan mantap kewenangan kab/kota rata-rata sebesar 59,98%. Selain belum mantapnya beberapa kondisi jaringan jalan, beberapa ruas jalan utama di Provinsi Sumatera Selatan juga masih sering terjadi kemacetan akibat kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung volume kendaraan yang lewat. Pada kurun waktu terakhir laju kerusakan ruas jalan

---

melebihi dari upaya peningkatan/rehabilitasi jalan yang ada sebagai akibat dari tingginya lalu lintas kendaraan dengan tonase tinggi (MST 10 ton – 16 ton) sedangkan kemampuan daya dukung jalan di Sumatera Selatan rata-rata 10 ton

Pada tahun 2014, sektor transportasi dan pergudangan mampu tumbuh hingga 7,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan peran sektor transportasi salah satunya tidak terlepas dari kondisi cuaca yang relatif lebih baik pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 sehingga mengurangi kendala aktivitas di sektor ini. Namun demikian pada tahun 2015 kendala transportasi meningkat akibat meluasnya kebakaran lahan dan kabut asap.

Transportasi dan komunikasi memiliki fungsi sangat penting dalam pembangunan. Pembangunan sektor trasportasi dan komunikasi didesain untuk tiga tujuan yaitu mendukung gerak perekonomian, stabilitas nasional dan juga mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan memperluas jangkauan arus distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok nusantara. Jalan raya merupakan salah satu sarana transportasi terpenting untuk menumbuhkan, mendukung dan memperlancar laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2014 panjang jalan darat berstatus sebagai jalan provinsi di Provinsi Sumatera Selatan adalah 1.462,87 kilometer. Pembangunan jembatan baru pada ta-hun ini juga menyebabkan panjang jembatan provinsi bertambah sekitar 150 km atau menjadi 10.724,54 km. Lebih dari 80 persen jalan provinsi di Provinsi Sumatera Selatan sudah merupakan jalan aspal, namun kerusakan sedang dan ringan masih banyak dijumpai. Titik-titik kerusakan jalan provinsi tersebar hampir di seluruh kabupaten/ kota.

Berdasarkan hasil Survei Sistem Informasi Operasi Pelabuhan 2014, jumlah arus muat barang mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekspor turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, volume barang yang dimuat mengalami peningkatan 0,57 persen sementara barang yang dibongkar justru menurun hampir 40 persen dibanding tahun 2013. Minat masyarakat menggunakan moda transportasi laut juga mulai berkurang, hal ini ditunjukkan dari jumlah penumpang yang turun hingga 28,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

---

Laju pertumbuhan sub sektor angkutan rel pada tahun 2014 adalah sebesar 18,42 persen. Sepanjang tahun 2010-2014, jumlah angkutan barang yang menggunakan kereta api selalu meningkat. Angkutan barang pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 17 juta ton atau meningkat hampir 12 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 15 juta ton. Pada tahun 2014, jumlah penumpang kereta api meningkat hingga 7,47 persen dari sebanyak 1,35 juta pada tahun 2013 menjadi 1,45 juta penumpang. Kenaikan jumlah penumpang ini sebagai dampak dari penambahan gerbong oleh PT KAI ditambah upaya meningkatkan kenyamanan dengan memasang penyejuk udara pada semua kelas kereta membuat masyarakat banyak beralih menggunakan moda transportasi ini. Jika dilihat menurut bulan, jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 139 ribu orang sedangkan jumlah penumpang terendah terjadi pada bulan September yaitu sebanyak 99 ribu penumpang. Momen liburan akhir tahun menyebabkan jumlah penumpang melonjak cukup tinggi pada bulan Desember.

Hingga tahun 2014 laju pertumbuhan angkutan udara mencapai 4,03 persen. Tahun 2014, lalu lintas di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) dipadati oleh 3,34 juta penumpang yang datang dan berangkat melalui bandara SMB II. Jumlah ini meningkat sekitar 22,11 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2013. Jumlah kedatangan penerbangan di bandara SMB II pada tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar 4,53 persen dibandingkan tahun 2013. Jika dilihat menurut bulan, jumlah kedatangan penerbangan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Agustus masing-masing sebesar 1.389 dan 1.047 penerbangan. Momen liburan akhir tahun dan libur lebaran menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah penerbangan pada bulan tersebut.

#### **5.6.6. Sumberdaya Telekomunikasi**

Sektor informasi dan komunikasi tumbuh 8,16 persen dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan *booming* produk-produk telekomunikasi. Makin berkembangnya teknologi dan informasi saat ini ternyata memang

---

menuntut berbagai pihak agar tidak buta teknologi. Saat ini persentase penduduk Sumatera Selatan yang mengakses Internet diketahui naik sebesar 17,13 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya pengguna internet tersebut adalah murahnya harga *smartphone* yang mampu mengakses internet dengan mudah. Hal ini ditunjukkan dengan angka persentase rumah tangga yang memiliki telepon seluler mencapai 89,51 persen pada tahun 2014. Berbeda dengan kepemilikan telepon seluler, kepemilikan komputer di rumah tangga ternyata masih sangat kecil. Pada tahun 2014 persentase rumah tangga yang memiliki komputer hanya sebesar 15,01 persen. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan peningkatan meskipun relatif kecil.

Tabel 27. Perkembangan Rumah Tangga Penggunaan Terlekomunikasi di Sumatera Selatan tahun 2008 – 2012.

Persentase RT	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Memiliki Telepon Rumah	8,25	8,36	8,64	7,05	5,11
Ada Anggota RT yang memiliki Ponsel	51,70	58,91	75,03	81,00	86,38
Memiliki Komputer	6,96	9,08	9,45	9,95	12,04
Akses Internet	n.a	n.a	9,20	9,25	10,87
Akses Internet di Rumah	3,57	1,76	2,49	2,42	2,86
Ada Anggota RT Akses Internet di Luar Rumah	5,42	9,18	8,56	8,67	10,21

### 5.6.7. Sumberdaya Listrik

Tingkat elektrifikasi di Sumsel baru mencapai 56,2 %, dan saat ini pembangkit tenaga listrik khususnya di pedesaan masih dominan menggunakan bahan bakar solar. Oleh karena itu dengan ketersediaan batubara maka di daerah ini telah ada rencana dan upaya untuk membangun pembangkit tenaga listrik memakai batubara sebagai bahan bakar, yaitu : (1) • PLTU Sp-Belimbing, 2x113.5 MW (PT Guo Hua Energi Musi Makmur, 2011), (2) PLTU Banjarsari, 2x100 MW (PT Bukit Pembangkit Inovatif, 2013); (3) PLTU Sumsel-2 (Keban Agung) 2x112.5 MW (PT Primanaya Power Energi, 2013); (4) PLTU Baturaja, 2x10 MW (IPP, 2013), PLTU Sumsel-5, 2x150 MW (IPP, 2015); (5) PLTU

Sumsel-6, 2x300 MW (IPP, 2014/2015), PLTU Sumsel-7, 2x150 MW (IPP, 2015/2016), dan PLTU Sumatera Mulut Tambang, 5x600 MW (IPP, 2016/2018).

Sampai dengan akhir tahun 2012, tercatat yang terdiri dari PLN Pembangkitan dan Pembangkit Swasta dengan total 1,306.12MW sebagai berikut: (1) PLN Pembangkit (MW): PLTU (Batubara) : 260 ; PLTU (gas) : 25; PLTG (Gas turbin): 449.85 ; PLTGU : 40; PLTD : 25,20; PLTD Isolated : 5,24; (2) Pembangkit Swasta (MW): PLTGU (IPP/Borang) : 150,00; PLTG Gunung megang : 80,00; PLTG Prabumulih : 12,00; PLTG Sako : 12,00; PLTG/U Musi-2 : 19,83; PLTU Sim.Belimbing : 227,00.

Pada tahun 2012 tercatat sebesar 94,02 persen rumah tinggal di Sumatera Selatan telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Angka penggunaan listrik ini konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya dan meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2006 yang besarnya 77,21 persen. Namun demikian saat ini masih ada sekitar 5,98 persen rumah tangga yang belum menggunakan listrik sebagai penerangan utama.

#### **5.6.8. Sumberdaya Keuangan dan Pembiayaan**

Kinerja penghimpunan dana juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, jumlah dana yang berhasil dihimpun perbankan Provinsi Sumatera Selatan mencapai 56,97 trilyun rupiah. Nilai ini meningkat sekitar 5,78 persen dibandingkan kondisi tahun 2013 yang sebesar 53,86 trilyun rupiah. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito, dari sebesar 19,67 trilyun rupiah menjadi 22,29 trilyun rupiah, walaupun dari sharing masih kalah dibanding tabungan yaitu hanya 39,12 persen dari total penghimpunan dana perbankan tahun 2014, sedangkan tabungan mencapai 46,89 persen.

Banyaknya proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 mencapai 34 proyek dan bernilai sekitar 9,92 trilyun rupiah, meningkat dibanding tahun 2011. Pada tahun 2011, banyaknya realisasi proyek mencapai 26 buah dengan nilai proyek sebesar 4,78 trilyun rupiah. Sebagian besar PMDN tahun 2012 diinvestasikan

---

pada sektor industri pengolahan dengan nilai proyek sebesar 5,35 trilyun rupiah. Banyaknya rencana proyek penanaman modal asing (PMA) tahun 2012 mencapai 73 buah dengan proyek senilai 2,370 juta US dollar dan mempekerjakan sekitar 34.481 orang tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah rencana proyek PMA meningkat sekitar 217,39 persen. Namun bila dibandingkan dengan besaran nilainya, rencana PMA tahun 2011 meningkat sekitar 88,54 persen. Sebagian besar rencana PMA tahun 2012 digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan industri pengolahan. Realisasi PMA tahun 2012 sesuai dengan rencana, yaitu mencapai 2,370 juta US dollar berasal dari 73 proyek. Sebagian besar realisasi PMA tahun 2012 diinvestasi pada sektor pertanian dengan nilai proyek sebesar 1.147 juta US dollar.

Penyaluran kredit tahun 2014 tumbuh sangat pesat, mencapai 13,36 persen, agak sedikit turun dibanding pertumbuhan tahun 2013. Secara nominal, penyaluran kredit perbankan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 mencapai 86,62 triliun rupiah, meningkat dari sebesar 76,41 triliun rupiah tahun 2013. Sebagian besar penyaluran kredit tahun 2014 digunakan untuk sektor lain-lain, sektor perdagangan dan sektor pertanian. Penyaluran kredit untuk ketiga sektor ini mencapai 56,93 trilyun rupiah atau sekitar 64,66 persen. Dilihat dari jenisnya, penyaluran kredit pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2014 mencapai Rp 18,99 triliun dan umumnya disalurkan pada sektor perdagangan, yaitu mencapai Rp 8,94 trilyun. Mayoritas Kredit UMKM digunakan untuk kredit modal kerja. Pada tahun 2014 kredit modal kerja pada Kredit UMKM mencapai Rp 12,39 triliun, sementara untuk investasi mencapai Rp 6,60 triliun.

## **5.7. Kondisi Ekonomi dan Perekonomian Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet**

### **5.7.1. Perkembangan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan**

#### **5.7.1.1. Struktur Perekonomian Wilayah**

Struktur perekonomian Sumatera Selatan telah bergeser dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke sektor ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDRB Sumatera Selatan. Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara peranan sektor lainnya di bawah 5 persen.

Tabel 27.1 Peranan PDRB Menurut Sektor (persen), 2010-2014

	<b>Sektor/Industry</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013*</b>	<b>2014**</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,	19,62	19,10	18,90	18,50	17,81
B	Pertambangan dan Penggalian	23,32	25,70	25,72	25,37	23,97
C	Industri Pengolahan	18,86	17,52	16,55	17,07	17,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,10	0,10	0,09	0,10
F	Konstruksi	10,58	11,18	12,30	12,60	13,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,45	9,24	9,14	8,94	9,01
H	Transportasi dan Pergudangan	1,68	1,62	1,64	1,77	1,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1,10	1,11	1,17	1,17	1,25
J	Informasi dan Komunikasi	2,85	2,59	2,51	2,38	2,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	2,22	2,48	2,57	2,56
L	<i>Real Estat/Real Estate Activities</i>	2,53	2,45	2,43	2,40	2,58
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,49	3,29	3,26	3,21	3,50
P	Jasa Pendidikan	2,39	2,29	2,29	2,43	2,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,59	0,59	0,57	0,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,91	0,85	0,75	0,74	0,73
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### **5.7.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan tahun 2014 mencapai 4,68 persen, sedangkan tahun 2013

sebesar 5,40 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor Jasa Pendidikan sebesar 16,54 persen. Sedangkan seluruh sektor ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif.

Tabel 28. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Sektor (persen), 2010-2014

	<b>Sektor/Industry</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013*</b>	<b>2014**</b>
A	P pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,92	5,40	6,07	5,26	4,06
B	Pertambangan dan Penggalian	4,56	5,57	4,50	3,52	2,93
C	Industri Pengolahan	2,87	5,88	5,86	4,11	4,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,97	8,83	11,14	6,67	8,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,78	-0,87	8,81	5,09	6,73
F	Konstruksi	8,02	8,25	12,12	9,23	4,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,23	7,73	8,20	6,07	4,45
H	Transportasi dan Pergudangan	7,64	8,40	7,38	7,53	7,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	9,16	8,97	3,00	5,63
J	Informasi dan Komunikasi	6,62	7,23	8,31	6,12	8,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,36	8,54	16,26	10,39	3,96
L	Real Estat	9,30	8,81	9,91	9,00	7,26
M,N	Jasa Perusahaan	9,48	10,36	8,77	9,40	6,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,39	3,99	2,01	0,74	6,70
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	12,47	8,40	6,57	9,98	16,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,74	6,37	8,26	5,59	9,48
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	3,75	3,69	1,10	2,39	3,10
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		5,53	6,36	6,83	5,40	4,68

Adapun sektor-sektor lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencatat sebesar 9,48 persen, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,86 persen, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,16 persen, sektor Real Estat sebesar 7,26 persen, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,18 persen, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,73 persen, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,70 persen, sektor Jasa Perusahaan sebesar 6,20 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,63 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 4,57 persen, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,45 persen, sektor Konstruksi sebesar 4,29 persen, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,06 persen, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

sebesar 3,96 persen, sektor Jasa lainnya sebesar 3,10 persen, dan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,93 persen.

### **5.7.1.3. Perkembangan Sektor Pertanian**

Sektor pertanian mencakup Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Subsektor kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subsektor Perikanan. Sektor ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 17,81 persen. Subsektor tanaman perkebunan merupakan penyumbang terbesar terhadap Sektor pertanian yaitu tercatat sebesar 40,36 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Namun pertumbuhan Subsektor ini mengalami perlambatan dari 6,50 persen pada tahun 2013 menjadi 4,06 persen pada tahun 2014. Kontribusi Subsektor tanaman perkebunan terhadap total PDRB pada tahun 2014 menurun menjadi 7,19 persen dibanding tahun 2013 sebesar 7,63 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada sektor pertanian terbesar adalah pada sektor Perikanan yaitu sebesar 9,39 persen yang diikuti oleh sektor Peternakan sebesar 8,47 persen. Sektor Tanaman Pangan terkontraksi 0,05 persen sedangkan sektor-sektor lainnya tetap mencetak laju pertumbuhan yang positif. Berturut-turut sektor Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Jasa Pertanian dan Perburuan, serta Kehutanan dan Penebangan Kayu mencetak laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,06 persen, 4,06 persen, 2,41 persen, dan 0,33 persen.

### **5.7.2. Perkembangan Peran Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Sumatera Selatan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pencapaian pembangunan secara makro. Selain hal itu, dengan menggunakan metode penghitungan yang terstandarisasi sehingga indikator tersebut dapat dibandingkan antar daerah satu dengan yang lainnya. Provinsi Sumatera Selatan terbagi atas 17 kabupaten/kota, dua diantaranya merupakan kabupaten baru yaitu

---

Kabupaten PALI (Penukal Abab Pematang Ilir) yang merupakan pecahan dari Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan pecahan dari Kabupaten Musi Rawas. Masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi perekonomian antar daerah yang berbeda. Kota Palembang merupakan ibukota provinsi sekaligus sebagai pusat pembangunan ekonomi. Hal tersebut tergambar nilai PDRB Kota Palembang terbesar dibandingkan dengan PDRB kabupaten/kota lainnya.

Tabel 29. Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Sumatera Selatan 2010-2013

No	Kabupaten/Kota	2010		2013		Perubahan Pangsa (%)
		Nilai (Rp T)	Pangsa (%)	Nilai (Rp T)	Pangsa (%)	
1	Ogan Komering Ulu	5.82	3.65	8.82	3.82	0.17
2	Ogan Komering Ilir	6.95	4.36	10.47	4.54	0.18
3	Muara Enim	16.93	10.62	23.96	10.38	-0.23
4	Lahat	5.73	3.59	8.32	3.61	0.02
5	Musi Rawas	5.65	3.55	8.24	3.57	0.03
6	Musi Banyuasin	27.88	17.48	38.13	16.53	-0.95
7	Banyuasin	11.93	7.48	16.92	7.33	-0.15
8	Oku Selatan	3.02	1.89	4.53	1.96	0.07
9	Oku Timur	5.40	3.39	8.00	3.47	0.08
10	Ogan Ilir	3.74	2.35	5.80	2.51	0.17
11	Empat Lawang	2.09	1.31	2.97	1.29	-0.03
12	PALI	3.47	2.17	4.66	2.02	-0.16
13	Muratara	2.06	1.29	2.99	1.30	0.00
14	Palembang	52.41	32.87	77.51	33.60	0.73
15	Prabumulih	2.96	1.86	4.37	1.90	0.04
16	Pagar Alam	1.27	0.80	1.84	0.80	0.00
17	Lubuk Linggau	2.14	1.34	3.18	1.38	0.03
	Sumatera Selatan	159.46	100.00	230.70	100.00	

Pada tahun 2010 dan 2013 peringkat pertama sebagai nilai PDRB terbesar adalah Kota Palembang. Nilai PDRB ibukota provinsi tersebut mencapai 52,41 trilyun rupiah pada tahun 2010 dan sebesar 77,51 trilyun rupiah pada tahun 2013. Secara umum perekonomian Kota Palembang bertumpu pada sektor sekunder dan tersier khususnya pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan hotel dan restoran. Sedangkan pada urutan kedua yang mempunyai perekonomian terbesar adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2010 nilai PDRB di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 27,88 trilyun rupiah. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2013 yang mencapai 38,13 trilyun rupiah.

Kabupaten Musi Banyuasin yang terletak pada lintas trans sumatera serta mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi pertambangan migas di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan yang terbesar di Provinsi Sumatera Selatan sehingga menempatkan sebagai daerah sumber migas di Pulau Sumatera. Potensi pertambangan migas di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai lebih dari 50 persen dari total potensi migas di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan nilai PDRB yang tercipta, Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang mempunyai perekonomian terbesar ketiga di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai PDRB pada tahun 2010 mencapai 16,93 trilyun rupiah dan selanjutnya pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi hampir 2 (dua) kali lipat menjadi 23,96 trilyun rupiah. Kabupaten Muaraenim merupakan salah satu daerah yang menjadi potensi sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Sumatera Selatan. Komoditi ekspor batu bara terbesar di Provinsi Sumatera Selatan berasal dari daerah ini. Bahkan potensi batu bara di Kabupaten Muara Enim mencapai lebih dari 70 persen dari total potensi batu bara di Provinsi Sumatera Selatan yang telah di eksploitasi. Selain hal itu Kabupaten Muara Enim juga merupakan penghasil migas terbesar kedua setelah Kabupaten Musi Banyuasin.

Daerah selanjutnya yang mempunyai kontribusi perekonomian terbesar di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Banyuasin. Kabupaten yang terbentuk di awal tahun 2000 ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2010, Kabupaten Banyuasin mempunyai nilai PDRB sebesar 11,93 trilyun rupiah dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 16,92 trilyun rupiah. Penopang utama perekonomian di Kabupaten Banyuasin adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Daerah penyumbang perekonomian terbesar selanjutnya secara berurutan adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dan Kabupaten Lahat. Ketiga kabupaten tersebut mempunyai struktur perekonomian yang mirip. Pada umumnya sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam ekonomi regional masing-masing daerah tersebut.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang terletak di ujung timur Provinsi Sumatera Selatan menempati urutan kelima ekonomi terbesar di Provinsi Sumatera

---

Selatan yaitu pada tahun 2010 mempunyai nilai PDRB sekitar 6,95 trilyun rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan sekitar 50 persen pada tahun 2013 yaitu menjadi 10,47 trilyun rupiah. Secara umum perekonomian Kabupaten OKI menyumbang sekitar 4,54 persen perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Daerah dengan nilai PDRB selanjutnya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang pada tahun 2010 mempunyai nilai PDRB mencapai 5,82 trilyun rupiah. Pada tahun 2013 nilai PDRB Kabupaten OKI mengalami kenaikan lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2010 yaitu menjadi 8,82 trilyun rupiah. Secara umum Kabupaten OKU mempunyai penopang utama perekonomian di sektor pertanian. Setengah perekonomian di Kabupaten OKU berasal dari sektor pertanian yaitu dengan komoditi utama dari perkebunan.

Peran ekonomi daerah kota pada perekonomian Provinsi Sumatera Selatan cenderung rendah dibandingkan peran daerah kabupaten. Tercatat 3 (tiga) dari 4 (empat) kota di Provinsi Sumatera Selatan menduduki kontributor lima terendah dari 17 kabupaten/kota. Kota Pagaralam pada peringkat 17 sebagai kontributor terendah perekonomian Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan nilai PDRB tahun 2013 sebesar 1,84 trilyun rupiah. Selanjutnya Kota Prabumulih dan Kota Lubuklinggau secara berurutan pada peringkat 13 dan 14 dengan nilai PDRB tahun 2013 masing-masing sebesar 4,37 trilyun rupiah dan 3,18 trilyun rupiah. Secara umum sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai penopang utama pada sektor primer.

Sebagai pusat perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2010 Kota Palembang menopang sekitar 32,87 persen perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Pada peringkat 2 (dua) yaitu Kabupaten Musi Banyuasin berkontribusi sebesar 17,48 persen. Jadi secara umum persebaran perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan belum tersebar merata di seluruh kabupaten/kota. Hal ini diperlihatkan bahwa setengah perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan berasal dari 2 (dua) daerah yaitu Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada tahun 2010, beberapa daerah penghasil komoditi pertambangan dan penggalian di Provinsi Sumatera Selatan, menjadi kontributor perekonomian utama. Daerah terbesar ketiga Kabupaten Muara Enim yang merupakan daerah utama

---

penghasil batu bara di Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi perekonomian sebesar 10,38 persen. Selain daerah ketiga terbesar kontributor utama perekonomian tersebut, mempunyai nilai kontribusi kurang dari 10 persen. Kabupaten Banyuasin yang mempunyai potensi pertambangan migas menempati urutan keempat kontributor terbesar yaitu mencapai 7,33 persen. Jadi struktur ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan memperlihatkan bahwa sekitar 70 persen perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan terpusat pada 4 (empat) kabupaten/kota sedangkan sisanya yaitu hanya 30 persen yang terdapat di 13 kabupaten/kota.

Salah satu indikator kecepatan pembangunan yaitu dari pergeseran struktur ekonomi suatu daerah. Pada kurun waktu 4 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 hingga 2013 terlihat sebagian besar daerah mengalami kenaikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan kontribusi yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten PALI. Secara umum penurunan kontribusi perekonomian tersebut terjadi pada daerah yang merupakan daerah penghasil utama komoditi migas. Pergerakan jumlah produksi serta pergerakan harga komoditi migas berpengaruh signifikan pada fluktuasi kontribusi di kedua kabupaten tersebut.

Pada tahun 2013, penurunan kontribusi tertinggi adalah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu mencapai 0,95 persen yaitu dari 17,48 pada tahun 2010 menjadi 16,53 persen pada tahun 2013. Penurunan kontribusi terbesar kedua adalah Kabupaten Muara Enim yaitu dari 10,62 persen pada tahun 2010 menjadi 10,38 persen pada tahun 2013 atau mengalami penurunan sekitar 0,23 persen. Penurunan kontribusi di kedua kabupaten disebabkan oleh pergerakan jumlah produksi dan harga produk tambang migas.

Pada tahun 2013 Kota Palembang merupakan daerah yang mempunyai kontribusi perekonomian terbesar di Provinsi Sumatera Selatan yaitu mencapai 33,60 persen. Secara umum kontribusi Kota Palembang meningkat dibandingkan tingkat kontribusi pada tahun 2010 yang mencapai 0,73 persen dan merupakan peningkatan terbesar dibandingkan daerah lainnya. Pembangunan infrastruktur

---

yang cenderung cepat sehingga memacu pergerakan perekonomian secara luas di Kota Palembang.

Secara umum struktur kontribusi perekonomian berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 cenderung mempunyai pola yang sama dibandingkan tahun 2010. Kabupaten Banyuasin yang merupakan salah satu daerah penghasil migas menempati urutan keempat terbesar yaitu mencapai 7,33 persen. Selanjutnya Kabupaten OKI yang mempunyai kontribusi ekonomi pada tahun 2013 sebesar 4,54 persen. Sementara kabupaten/kota lainnya memberikan kontribusi ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan masih dibawah 4 (empat) persen.

Kontribusi ekonomi terendah pada tahun 2013 adalah Kota Pagaralam yang mempunyai tingkat kontribusi kurang dari 1 (satu) persen. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi Kota Pagaralam hanya sekitar 0,80 persen. Pada sisi daerah kabupaten, daerah yang mempunyai kontribusi terendah adalah Kabupaten Empat Lawang yang mempunyai tingkat kontribusi sekitar 1,29 persen. Secara umum sektor pertambangan dan penggalian dan sektor perkebunan mempunyai peranan penting dalam pembentukan pola struktur ekonomi regional. Beberapa daerah yang mempunyai potensi-potensi di kedua sektor tersebut cenderung mempunyai tingkat kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan daerah non potensi

### **5.7.3. Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota**

Secara umum karakteristik perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan terbagi atas 2 (dua) kelompok besar yaitu wilayah perkotaan yang tercermin oleh kota dan wilayah *rural* yang tercermin pada daerah kabupaten. Walaupun sebagian besar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan adalah kabupaten, akan tetapi masing-masing wilayah perekonomian tersebut mempunyai peran dalam perkembangan ekonomi regional. Perbedaan yang mencolok antara 2 (dua) kelompok besar pembangunan regional tersebut adalah struktur ekonomi masing-masing wilayah. Secara umum wilayah kota mempunyai karakteristik utama dari sektor non pertanian dan non pertambangan. Sedangkan wilayah kabupaten bergantung pada perkembangan sektor pertanian dan pertambangan.

---

Secara nyata wilayah perkotaan cenderung mempunyai variasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Sebaliknya kecenderungan karakteristik ekonomi pada sektor pertanian sehingga variasi kegiatan ekonomi di wilayah kabupaten cenderung homogen. Sebagian besar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan adalah wilayah kabupaten yaitu mencapai 85 ribu hektar. Luas wilayah tersebut mencapai 97,94 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu potensi sumber daya alam di wilayah kabupaten relatif tinggi.

Jika ditinjau dari perbandingan pembangunan perekonomian antar wilayah memperlihatkan bahwa daerah perkotaan mempunyai tingkat pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten. Secara umum tingkat pembangunan tersebut didasarkan pada rata-rata kontribusi masing-masing daerah terhadap perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2010 walaupun mempunyai luas wilayah hanya 3 (tiga) persen dari total luas wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, kontribusi perekonomian yang berasal dari wilayah kota mencapai 34,84 persen. Jumlah daerah kota di Provinsi Sumatera Selatan hanya 4 (empat) yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuklinggau. Walaupun hanya 4(empat) daerah, akan tetapi mempunyai kontribusi lebih dari sepertiga perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan daerah kabupaten yang sebanyak 13 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kontribusi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 63,13 persen. Perbedaan wilayah antara kabupaten dan kota mempunyai pola struktur ekonomi yang berbeda. Secara umum wilayah perkotaan di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh kegiatan usaha pada sektor sekunder maupun tersier. Sedangkan di daerah kabupaten mempunyai kegiatan utama di sektor pertanian dan sektor pertambangan. Perbandingan percepatan pembangunan antara wilayah kabupaten dan kota juga diperlihatkan dari perubahan struktur perekonomian antar wilayah kota dan kabupaten dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Pada tahun 2013 kontribusi ekonomi daerah kota yaitu sebesar 37,68 persen. Jika dibandingkan tahun 2010, kontribusi tersebut mengalami peningkatan yaitu sekitar 0,81 persen. Hal sebaliknya terjadi pada tingkat kontribusi di wilayah

---

kabupaten. Pada tahun 2013, kontribusi ekonomi daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 62,32 persen. Nilai kontribusi tersebut lebih rendah daripada tingkat kontribusi pada tahun 2010 yang sebesar 63,13 persen. Perubahan tingkat kontribusi di daerah kota yang meningkat memperlihatkan bahwa perekonomian di daerah kota tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian di daerah kabupaten. Perekonomian di daerah kabupaten sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan, Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan di kedua sektor tersebut lebih lambat dibandingkan sektor sekunder maupun tersier.

Struktur ekonomi memperlihatkan kondisi perekonomian regional yang berdasarkan pada sektor-sektor pembentuknya. Selain hal itu struktur perekonomian juga memperlihatkan pola pergeseran perekonomian suatu daerah. Pergerakan perekonomian tersebut menjadi acuan utama sebagai indikator proses pembangunan ekonomi regional. Secara umum semakin tinggi kecepatan pembangunan suatu daerah maka terjadi kecenderungan pergerakan struktur ekonomi menuju sektor sekunder hingga sektor tersier.

Pada tahun 2010 secara agregat kabupaten/kota sektor primer menjadi penopang utama perekonomian regional. Sektor primer menyumbang sekitar 40,22 persen perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Nilai kontribusi sektor pertanian yang tinggi tersebut khususnya berasal dari seluruh kabupaten yang mempunyai struktur perekonomian pada sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sedangkan untuk wilayah kota lainnya yaitu Palembang, Prabumulih, Pagaralam dan Lubuklinggau mempunyai penopang utama di sektor sekunder maupun sektor tersier. Pada tahun 2010 sektor yang mempunyai kontribusi terbesar kedua adalah sektor sekunder yaitu sebesar 30,04 persen. Sedangkan sisanya yaitu sekitar 29,73 persen berasal dari sektor tersier.

Secara umum pergerakan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan cenderung cepat. Salah satu indikator tersebut adalah terjadi pergeseran struktur ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Secara agregat 17 kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan memperlihatkan bahwa peran sektor primer mengalami penurunan yang relatif signifikan. Kontribusi sektor primer pada tahun 2013

---

mengalami penurunan sebesar 3,47 persen dari 40,22 persen tahun 2010 yaitu menjadi 36,75 persen. Selain hal itu, kontribusi sektor sekunder juga mengalami penurunan yaitu sekitar 1,69 persen atau dari 30,04 persen pada tahun 2010 menjadi 28,35 persen. Di sisi lain terjadi peningkatan signifikan pada tingkat kontribusi di sektor tersier yaitu dari 29,73 persen pada tahun 2010 menjadi 34,89 persen pada tahun 2013.

Secara sektoral PDRB merupakan hasil penciptaan nilai tambah dari setiap sektor ekonomi yang ada di suatu daerah. Perbandingan porsi nilai tambah dari masing-masing sektor terhadap total pendapatan regional daerah tersebut menggambarkan struktur ekonomi daerah tersebut. Pada umumnya struktur ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan masih mengandalkan pada sektor primer. Sektor primer terdiri atas sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2010 terlihat bahwa keseluruhan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 13 kabupaten mempunyai struktur ekonomi utama di sektor primer. Sedangkan 4 (empat) kota mempunyai penopang utama perekonomian di sektor sekunder maupun sektor tersier.

Khusus pada sektor pertanian mempunyai keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pada tahun 2010, daerah yang mempunyai struktur ekonomi dengan peran sektor primer paling besar adalah Kabupaten PALI. Pada tahun tersebut sektor primer menyumbang sekitar 79,40 persen perekonomian regional PALI. Sedangkan sisanya sekitar 20,60 persen berasal dari sektor sekunder dan sektor tersier. Selanjutnya daerah yang mempunyai struktur ekonomi utama berasal dari sektor primer yang terbesar adalah Kabupaten Musi Banyuasin dengan nilai kontribusi mencapai 74,20 persen. Berikutnya adalah Kabupaten Musi Rawas Utara yang mempunyai nilai kontribusi sektor primer dalam perekonomian regional mencapai 72,97 persen. Sedangkan kondisi struktur di daerah kota memperlihatkan bahwa Kota Palembang menjadikan sektor sekunder sebagai penopang utama perekonomian di tahun 2010 yaitu mempunyai kontribusi mencapai 56,46 persen. Sektor tersier menyumbang sekitar 43,68 persen sedangkan sektor primer di Kota Palembang hanya menyumbang sekitar 0,45 persen. Daerah kota yang lain yaitu Kota Prabumulih, Pagaralam, dan

---

Lubuklinggau mempunyai sektor utama yaitu sektor tersier. Pada tahun 2010, sektor tersier di Kota Lubuklinggau menyumbang sekitar 63,37 persen terhadap perekonomian. Nilai peran sektor tersier di Lubuklinggau menempatkan kota ini sebagai salah satu daerah yang mempunyai struktur ekonomi dengan peran sektor tersier terbesar. Kota Lubuklinggau yang terletak di jalur perdagangan antara provinsi di sekitarnya, khususnya dengan Provinsi Bengkulu, sehingga sektor tersier lebih maju dibandingkan sektor lainnya.

Pada tahun 2013, sejalan dengan pembangunan di masing-masing wilayah kabupaten/kota terlihat bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi. Transformasi ekonomi regional tersebut menjadi indikator percepatan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan kontribusi sektor primer dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Penurunan kontribusi sektor primer terbesar dalam kurun waktu 4 tahun (2010 - 2013) terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Penurunan kontribusi sektor primer tersebut mencapai 6,00 persen, yaitu dari 74,20 persen di tahun 2010 menjadi 68,20 persen di tahun 2013. Pada tahun 2013, Kota Palembang masih mempunyai struktur ekonomi dengan penopang utama perekonomian dari sektor tersier yang mencapai 50,50 persen. Secara umum kontribusi sektor tersier di kota Palembang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2010 yang menurun hingga 7,41 persen. Sebaliknya, sektor sekunder di Kota Palembang pada tahun 2013 mengalami penurunan signifikan mencapai 7,41 persen, sehingga pada tahun 2013 kontribusi sektor sekunder mencapai 49,05 persen.

Sejalan dengan pergerakan tingkat produksi dan harga komoditi migas dalam 4 (empat) tahun terakhir yang cenderung berfluktuasi, struktur sektor primer di Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan daerah penghasil migas di Provinsi Sumatera Selatan, mengalami penurunan yang relatif signifikan. Pada tahun 2013 sektor primer di Kabupaten Musi Banyuasin menyumbang sekitar 68,20 persen atau mengalami penurunan kontribusi mencapai 6,00 persen dibandingkan tahun 2010. Penurunan kontribusi sektor primer juga terjadi di Kabupaten PALI yang juga

---

mengalami penurunan mencapai 5,93 persen atau pada tahun 2013 tingkat kontribusi sektor primer tersebut menjadi 73,48 persen.

#### **5.7.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota**

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pengukur keberhasilan program pembangunan sekaligus sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Nilai pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan dalam perekonomian, sedangkan nilai negatif menunjukkan hal yang sebaliknya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai maka mencerminkan terjadi percepatan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang tercipta sehingga secara langsung berpengaruh pada peningkatan nilai tambah (*value added*) baru yang tercipta. Secara umum peningkatan nilai tambah tersebut mencerminkan peningkatan pendapatan faktor-faktor produksi. Sehingga jika dibarengi oleh pemerataan pembangunan yang tinggi maka semakin tinggi pertumbuhan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kota Palembang sebagai ibukota provinsi memegang peranan penting bagi kondisi ekonomi regional provinsi bahkan hingga wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Peran kota Palembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan tersebut menempatkan sebagai kota dengan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di tahun 2011. Pada tahun tersebut, Kota Palembang mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 9,65 persen. Selanjutnya beberapa wilayah kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi diatas 7 (tujuh) persen yaitu Kabupaten Ogan Ilir yang tumbuh sebesar 7,91 persen dan menjadi daerah yang tumbuh tertinggi kedua. Daerah selanjutnya tumbuh pada kisaran 6 (enam) persen secara berurutan adalah Kabupaten OKI yang tumbuh tertinggi yaitu tumbuh mencapai 6,90 persen, Kabupaten OKU Selatan yang tumbuh 6,79 persen, kemudian Kabupaten OKU Timur yang tumbuh 6,48 persen. Kabupaten Lahat tumbuh terbesar selanjutnya yang masih pada kisaran 5 (lima) persen yaitu tumbuh sebesar 6,47 persen. Kota Lubuklinggau tumbuh sebesar 6,43 persen, disusul Kabupaten OKU yang tumbuh 6,17 persen dan Kabupaten Banyuasin yang tumbuh 6,13 persen. Selanjutnya Kabupaten Empat

---

Iawing dan Kabupaten Musi Rawas masing-masing tumbuh 6,07 persen dan 6,00 persen.

Beberapa daerah yang tumbuh pada kisaran 5 (lima) persen pada tahun 2011 selanjutnya secara berurutan adalah Kabupaten Muara Enim yang tumbuh 5,51 persen, Kota Prabumulih tumbuh 5,39 persen, Kota Pagar Alam tumbuh 5,32 persen dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang tumbuh 5,13 persen, Sedangkan beberapa daerah lainnya, pada tahun 2011, mengalami pertumbuhan di bawah 5 (lima) persen. Tercatat terdapat 2 (dua) daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 sekitar 3 persen. Kabupaten PALI mengalami pertumbuhan sebesar 3,60 persen. Seiring dengan perlambatan produksi dari sektor pertambangan migas di Provinsi Sumatera Selatan, berdampak pada tingkat pertumbuhan di Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan penghasil komoditi migas terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2011 tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin hanya sekitar 3,20 persen dan menjadi daerah yang tumbuh terendah di Provinsi Sumatera Selatan.

Sejalan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang yang relatif cukup tinggi sehingga menempatkan Kota Palembang tumbuh tertinggi pada tahun 2013. Pada tahun tersebut Palembang mengalami pertumbuhan mencapai 8,14 persen. Hal ini menjadikan hanya Kota Palembang yang mampu tumbuh diatas 8 (delapan) persen di tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2013 terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara Kota Palembang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi terbesar kedua pada kisaran 6 (enam) persen. Kabupaten OKU Timur menempati urutan kedua yang tumbuh sebesar 6,82 persen. Selanjutnya Kabupaten Ogan Ilir menempati urutan 3 (tiga) tumbuh 6,68 persen

Jika dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011, memperlihatkan bahwa posisi kedua dan ketiga daerah yang tumbuh tertinggi mengalami pergeseran. Kabupaten OKU Timur yang pada tahun 2011 menempati urutan kelima tertinggi, pada tahun 2013 mengalami percepatan pertumbuhan. Hal yang berbeda terjadi dengan pertumbuhan di Kabupaten Ogan Ilir yang pada tahun 2011 tumbuh 7,91 persen, pada tahun 2013 melambat menjadi 6,68 persen.

---

Secara umum sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tumbuh pada kisaran 6 (enam) persen pada tahun 2013. Tercatat sebanyak 12 (dua belas) kabupaten/kota yang tumbuh pada tingkat pertumbuhan tersebut. Kabupaten OKI menjadi daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan terbesar keempat yaitu tumbuh sebesar 6,46 persen. Selanjutnya Kota Lubuklinggau yang pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,41 persen atau lebih lambat dibandingkan tahun 2011. Kabupaten OKU mengalami pertumbuhan sebesar 6,28 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2011, dan Kabupaten Banyuasin tumbuh sebesar 6,18 persen. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 lebih lambat dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Hal ini menggambarkan bahwa perekonomian pada tahun 2013 cenderung menurun.

#### **5.7.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten/kota**

Secara umum perekonomian suatu daerah terbagi dalam beberapa sektor utama. Dalam perkembangan pembangunan ekonomi regional, masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai pola pertumbuhan sektoral yang berlainan. Pada umumnya pembangunan ekonomi yang telah diprogramkan oleh masing-masing daerah, berpengaruh pada pola pertumbuhan ekonomi regional di daerah tersebut. Secara umum pertumbuhan secara sektoral tersebut juga memperlihatkan pergerakan ekonomi masing-masing sektor. Pada tahun 2011 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara sektoral pada agregat 17 kabupaten/kota paling tinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu tumbuh 12,68 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota memperlihatkan bahwa beberapa kabupaten kota, pertumbuhan sektor ini mencapai diatas 10 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh tertinggi di Kabupaten Empat Lawang yaitu mencapai 13,96 persen. Peningkatan kebutuhan dalam berkomunikasi berpengaruh signifikan pada daerah termuda di Provinsi Sumatera Selatan tersebut.

Secara agregat 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mampu tumbuh lebih dari 10 persen pada tahun 2011. Sektor-

sektor lainnya secara agregat tumbuh kurang dari 9 (sembilan) persen pada tahun 2011. Sektor yang tumbuh tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 14,07 persen. Hampir seluruh kabupaten/kota memiliki pertumbuhan diatas 10 persen di sektor pengangkutan dan komunikasi kecuali Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuklinggau yang tumbuh kurang dari 10 persen. Kota Palembang yang merupakan ibukota provinsi Provinsi Sumatera Selatan, sektor pengangkutan dan komunikasi di kota ini tumbuh sebesar 14,72 persen atau menjadi yang terbesar ke - 4. Sedangkan daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi terendah adalah Kota Lubuklinggau yang tumbuh sebesar 7,58 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang mengalami pertumbuhan terendah di tahun 2011. Secara agregat PDRB kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan tercatat sektor ini tumbuh sekitar 2,18 persen. Secara umum sektor ini berkaitan erat dengan produktivitas mesin produksi serta ketersediaan cadangan migas yang ada. Bahkan beberapa sumur migas di Provinsi Sumatera Selatan memasuki kategori sumur tua sehingga tingkat produksi migas tersebut semakin terbatas. Ketergantungan dari komoditi migas tersebut tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah di beberapa kabupaten/kota potensi migas. Kabupaten/kota potensi migas tersebut adalah Musi Banyuasin, Muaraenim dan Prabumulih. Kabupaten Musi Banyuasin yang menyumbang hampir setengah atau sekitar 45 persen produksi sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Sumatera Selatan hanya tumbuh sekitar 1,29 persen.

Kondisi pertumbuhan ekonomi sektoral tahun 2013 memperlihatkan kondisi yang hampir sama dengan kondisi tahun 2011. Berdasarkan nilai agregat PDRB kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan, sektor yang tumbuh tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu mencapai 11,12 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi tersebut menjadi satu-satunya sektor yang mampu tumbuh diatas 10 persen pada tahun 2013.

---

Secara umum sektor ini berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Teknologi komunikasi yang berkembang relatif cepat sehingga memberikan pengaruh pada makin tingginya terciptanya sarana-sarana komunikasi yang semakin canggih. Sejalan dengan hal itu kebutuhan komunikasi yang meningkat signifikan, khususnya pada beberapa periode terakhir. Di sisi lain, tingkat perekonomian suatu daerah yang cenderung meningkat memberikan pengaruh pada peningkatan mobilitas manusia maupun barang antar wilayah.

Pada tahun 2013, sektor pengangkutan dan komunikasi di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan tumbuh diatas 10 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh tertinggi di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu sebesar 14,24 persen. Selanjutnya Kabupaten Musi Rawas menempati urutan kedua yaitu sebesar 12,76 persen. Beberapa kota menempati urutan selanjutnya yang tumbuh lebih dari 11 persen adalah Kabupaten Lahat yang sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2013 tumbuh 12,18 persen, Kota Palembang yang tumbuh 11,53 persen, serta Kabupaten OKU yang tumbuh 11,03 persen. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh paling rendah di Kabupaten Empat Lawang yaitu tumbuh sebesar 6,72 persen.

Agregat PDRB kabupaten/kota di sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan 8,91 persen dan menjadi sektor yang tumbuh terbesar kedua di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan kabupaten/kota, pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tertinggi di Kabupaten PALI yang tumbuh mencapai 18,10 persen. Beberapa kabupaten juga tumbuh diatas 10 persen yaitu Kabupaten Lahat yang tumbuh 13,45 persen, Kabupaten Musi Banyuasin yang tumbuh 12,52 persen, Kabupaten Muara Enim tumbuh 10,20 persen, dan di Kabupaten OKU yang tumbuh 10,11 persen. Secara umum sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh kegiatan real estate.

Sektor bangunan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2013 yaitu mencapai 8,83 persen. Pada sektor bangunan, terdapat 6 (enam) daerah kabupaten/kota yang tumbuh pada kisaran diatas 10 persen pada tahun 2013. Sektor bangunan di

---

Kabupaten Empat Lawang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2013 dibandingkan daerah lainnya yaitu mencapai 12,37 persen. Selanjutnya Kabupaten Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara pertumbuhan sektor bangunan mencapai 12,12 persen. Pada tahun 2013, daerah yang mempunyai nilai pertumbuhan sektor bangunan diatas 10 persen lainnya adalah Kabupaten Banyuasin yang tumbuh 11,18 persen, Kabupaten PALI yang tumbuh 10,37 persen, dan Kabupaten OKI yang tumbuh 10,31 persen. Pertumbuhan sektor bangunan umumnya dipicu oleh pengeluaran pemerintah pada belanja pembangunan infrastruktur.

Sejalan dengan pola pertumbuhan di tahun 2011, tercatat pertumbuhan agregat PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara sektoral terendah terjadi di sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2013 sektor pertambangan dan penggalian dari agregat PDRB kabupaten/kota tumbuh hanya sebesar 2,02 persen. Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi daerah penghasil terbesar komoditi migas di Provinsi Sumatera Selatan tumbuh sekitar 2,35 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011, pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian tersebut lebih tinggi.

#### **5.7.6. Perkembangan PDRB Per Kapita**

Indikator ekonomi yang acapkali digunakan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan adalah PDRB. Selain mencerminkan keberhasilan pembangunan tersebut juga menyajikan keterbandingan indikator tersebut dengan daerah lainnya. Salah satu penyesuaian keterbandingan antar daerah dalam indikator adalah PDRB per kapita. PDRB perkapita kabupaten/kota dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran ekonomi di suatu wilayah. Besaran PDRB per kapita dihitung dengan membagi besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut. Indikator ini menggambarkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing penduduk di suatu wilayah akibat dari adanya proses produksi. Kenaikan pada besaran PDRB per Kapita menunjukkan bahwa secara nominal pendapatan masyarakat pada umumnya mengalami peningkatan. Tinggi rendahnya besaran indikator ini dipengaruhi oleh

faktor besaran PDRB yang dihasilkan suatu wilayah serta jumlah penduduk wilayah tersebut.

Secara umum semakin besar PDRB suatu daerah maka semakin besar nilai PDRB per kapita daerah tersebut. Pada tahun 2010, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai PDRB per kapita mencapai 49,52 juta rupiah dan menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi dibandingkan dengan 16 kabupaten/kota lainnya. Sektor pertambangan khususnya komoditi migas berkaitan erat dengan pencapaian PDRB per kapita yang cukup tinggi tersebut. Kota Palembang yang berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa menempati urutan ke-2 yaitu dengan PDRB per kapita sebesar 35,70 juta rupiah. Selanjutnya adalah Kabupaten Muaraenim dengan tingkat PDRB per kapita sebesar 30,63 juta rupiah di tahun 2010. Sedangkan pada daerah yang mempunyai PDRB per kapita terendah pada tahun 2010 di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten OKU Timur yaitu sebesar 8,84 juta rupiah.

Hampir sama dengan kondisi tahun 2010, daerah yang mempunyai PDRB per kapita terbesar pada tahun 2013 adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2013 PDRB per kapita di daerah tersebut mencapai 64,36 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sekitar 29,96 persen. Secara umum peningkatan pendapatan per kapita tersebut disebabkan oleh pergerakan produksi barang/jasa di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain hal itu juga disebabkan oleh pergerakan barang/jasa yang dihasilkan di seluruh sektor. Tingkat harga barang/jasa yang diproduksi di tahun 2013 lebih besar daripada tingkat harga di tahun 2010. Peningkatan harga tersebut seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Selanjutnya Kota Palembang menempati urutan kedua yaitu sebesar 50,47 juta rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan sekitar 41,37 persen dibandingkan dengan nilai PDRB per kapita pada tahun 2010. Pergerakan nilai pendapatan per kapita di Kota Palembang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir menggambarkan percepatan pembangunan yang cenderung masif. Pada tahun 2013 terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota mempunyai PDRB per kapita diatas 10 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan kondisi PDRB per kapita tahun 2010, memperlihatkan perubahan peringkat tingkat PDRB per kapita pada level terbawah. Pada tahun 2013 daerah yang mempunyai nilai PDRB per kapita

---

terendah masih sama dengan tahun 2010 yaitu Kabupaten OKU Timur dengan nilai PDRB per kapita sebesar 12,60 juta rupiah.

#### **5.7.7. Perkembangan Nilai Tukar Petanian**

Berdasarkan hasil pemantauan BPS terhadap harga-harga pedesaan di 38 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, rata-rata NTP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 mencapai 100,92 persen. Nilai NTP tahun 2014 lebih dari 100 persen, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014, petani Provinsi Sumatera Selatan mengalami surplus. Surplus tersebut terjadi karena kenaikan harga produksi lebih besar dibanding kenaikan harga konsumsi, sehingga pendapatan petani tahun 2014 cenderung besar dibanding pengeluarannya dan menyebabkan tingkat kesejahteraan petani menjadi lebih baik.

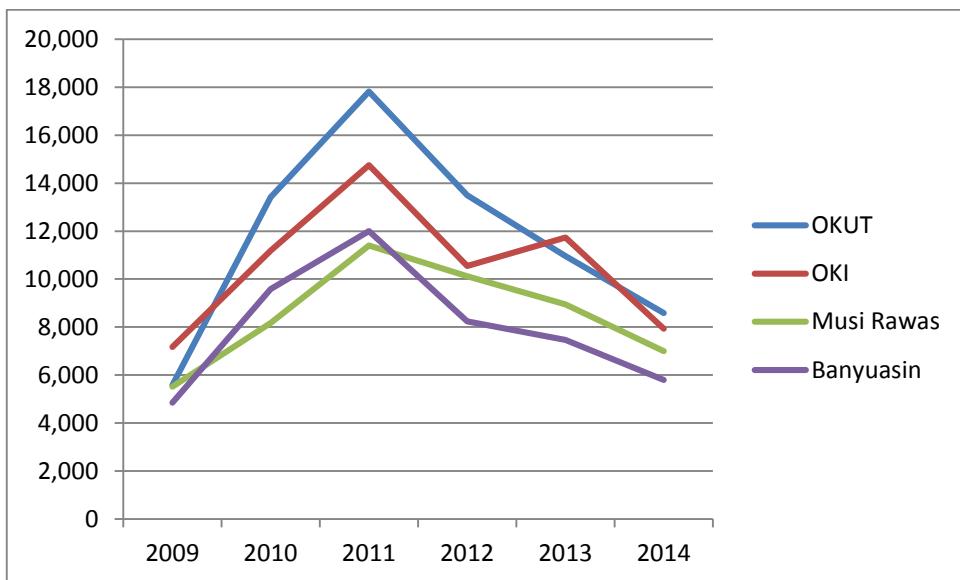
Dilihat berdasarkan komoditas pertanian, petani tanaman hortikultura cenderung lebih sejahtera jika dibanding petani tanaman bahan makanan, perkebunan, nelayan ataupun peternak, terlihat dari nilai NTP yang bernilai paling tinggi yaitu sebesar 108,67. Pada tahun 2014, nilai rata-rata indeks harga yang diterima petani (IT) lebih besar dari rata-rata harga yang dibayar petani (IB). Dibanding petani komoditas-komoditas lainnya, kesejahteraan petani tanaman bahan makanan pada tahun 2014 terlihat paling terpuruk. Data nilai IB dan IT menunjukkan bahwa penurunan kesejahteraan petani tanaman bahan makanan tahun 2014 terutama disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi.

#### **5.7.8. Perkembangan Harga Karet Di Tingkat Produsen**

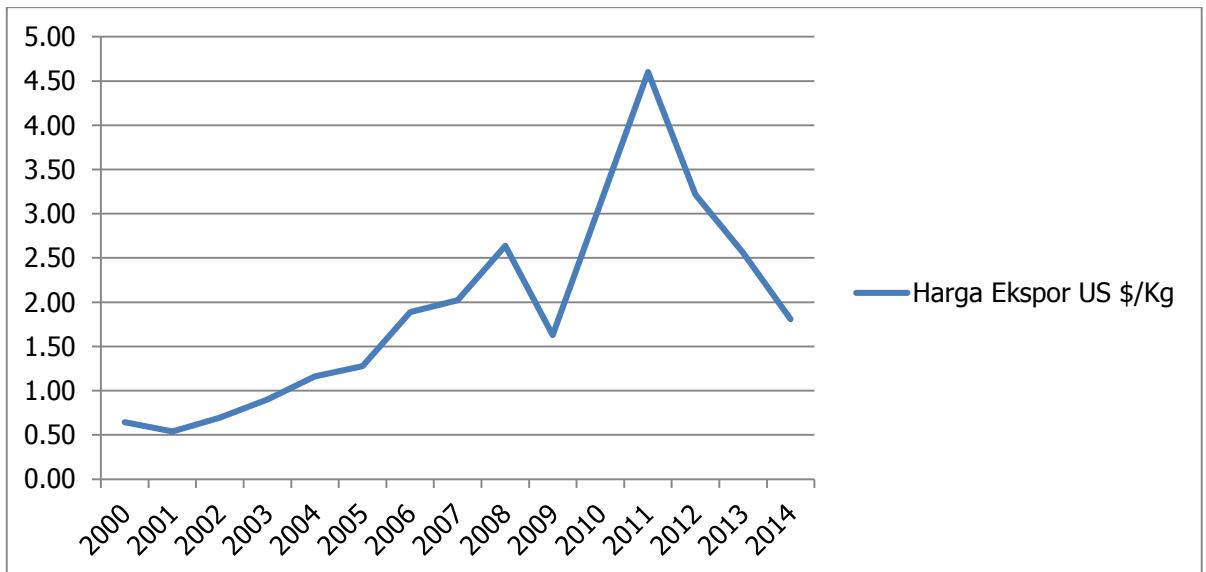
Harga karet di pasar domestik di Indonesia dalam wujud bahan olah karet (bokar) menunjukkan harga tinggi pada tahun 2007 dan paling tinggi rata-rata pada tahun 2011 sebesar Rp. 17913/kg. Pada tahun 2008 terjadi penurunan harga yang sangat signifikan hingga mencapai 80,97% dibanding tahun 2007 menjadi rata-rata Rp. 6050/kg, pada tahun 2009 harga karet mulai mengalami peningkatan dan menjadi rata-rata Rp.8333/kg. Namun demikian pada tahun 2012 harga karet kembali turun sebesar 32,51% menjadi 12333/kg dan menjadi cenderung ke level

---

tahun 2009 pada tahun 2014. Perkembangan harga karet di empat kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 8



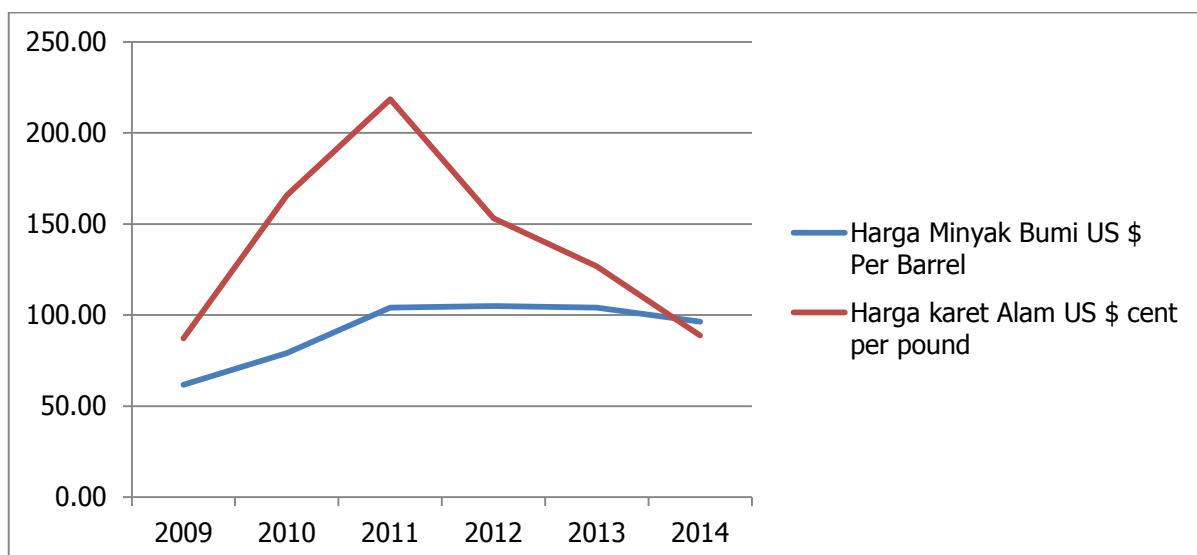
Gambar 8. Perkembangan Rata-rata Harga Produsen Karet di Sumatera Selatan Tahun 2009 – 2014 (Rp/Kg)



Gambar 9. Perkembangan Rata-rata Harga Ekspor Karet di Sumatera Selatan Tahun 2000 – 2014 (Rp/Kg)

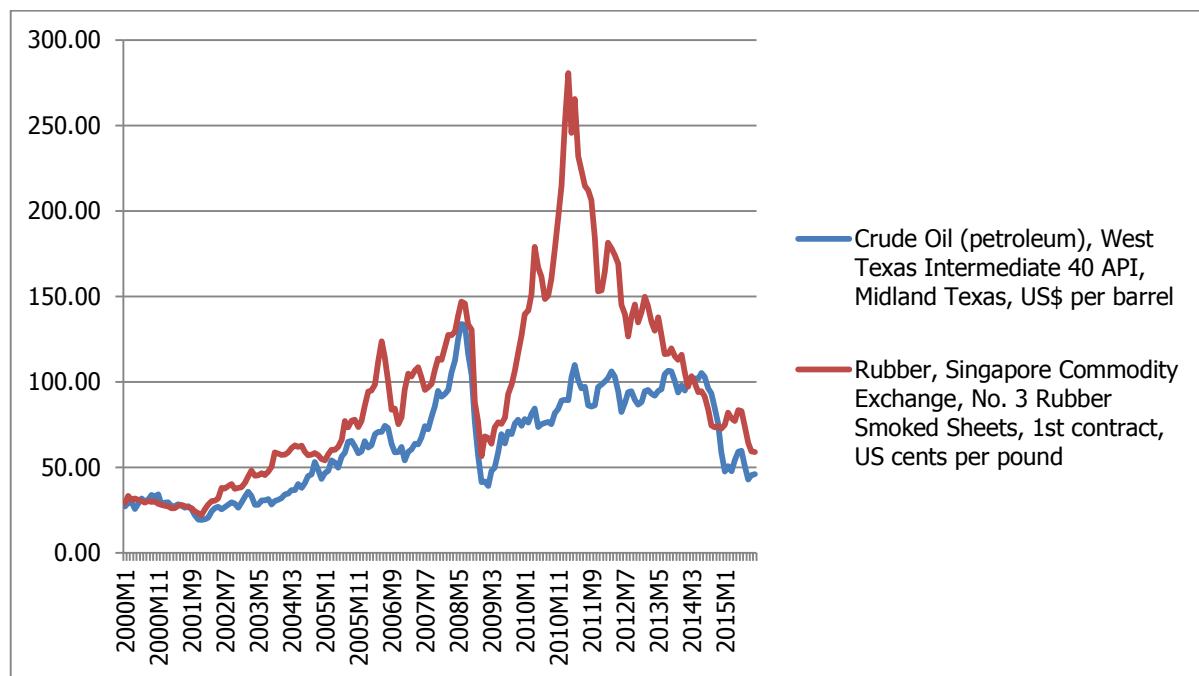
Dinamika perubahan harga karet di tingkat produsen di Sumatera Selatan mengikuti didinamika harga ekspor seperti tersaji pada Gambar 5.... Harga karet di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh harga internasional karet dan harga minyak

bumi. Gambar 5.... menunjukkan bahwa perubahan harga internasional dan harga minyak bumi mengalami perubahan cenderung bersamaan. Apabila terjadi kenaikan harga minyak bumi maka harga karet alam akan meningkat dan demikian sebaliknya. Hal ini terjadi karena apabila harga minyak bumi menurut produksi karet sintetis yang menggunakan bahan baku minyak bumi akan meningkat. Peningkatan produksi karet sintetis menekan harga karet alam.



Gambar 10. Perkembangan Harga Karet Alam dan Minyak Bumi Internasional Tahun 2000 – 2014

Gambar 5.... lebih memperjelas kaitan antara perkembangan harga karet alam dengan harga minyak bumi internasional. Dinamika dan perilaku harga karet alam tampak mengikuti perubahan harga minyak bumi di pasar internasional. Agar harga karet domestik tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga karet dan minyak bumi internasional, maka selain meningkatkan kualitas hasil panen karet oleh petani, juga perlu dilakukan upaya untuk meningkat serapan pasar domestik dan mengolah karet di dalam negeri sehingga ekspor sudah dala bentuk barang jadi. Selama ini 85 persen produksi karet diekspor dalam bentuk crumb rubber atau sejenisnya yang masih merupakan produk antara.



Gambar 11. Perkembangan Harga Karet Alam dan Minyak Bumi Internasional Bulan Januari 2000 – Oktober 2015

Tabel 30. PDRB Per Kapita Menurut Sektor (Juta Rp), 2010-2014

	Sektor	2010	2011	2012	2013*	2014**
A	P pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,1	5,7	6,2	6,7	6,9
B	Pertambangan dan Penggalian	6,0	7,7	8,4	9,1	9,3
C	Industri Pengolahan	4,9	5,2	5,4	6,1	6,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F	Konstruksi	2,7	3,3	4,0	4,5	5,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5
H	Transportasi dan Pergudangan	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
J	Informasi dan Komunikasi	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
L	Real Estat	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0
M,N	Jasa Perusahaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4
P	Jasa Pendidikan	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
<b>Produk Domestik Regional Bruto c</b>		25,9	29,8	32,8	36,0	38,8

**Tabel 31. PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2010 - 2013 (Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2010	2011 r	2012 *	2013 **
1. PERTANIAN	2409227	2797128	3127870	3553249
a. Tanaman Bahan Makanan	716120	809573	894834	1005959
b. Tanaman Perkebunan	1242983	1460250	1632906	1866284
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	150255	170670	196864	226704
d. Kehutanan	21713	23172	24826	25804
e. Perikanan	278156	333463	378440	428498
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1539385	1731354	1845248	1961377
a. Minyak dan Gas Bumi	1413710	1577122	1656843	1738646
b. Pertambangan tanpa Migas				
c. Penggalian	125675	154232	188405	222731
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	625272	706190	816398	923501
a. Industri Migas				
1. Pengilangan Minyak Bumi				
2. Gas Alam Cair				
b. Industri Tanpa Migas	625272	706190	816398	923501
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	463369	532898	631336	725126
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki				
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	135811	144712	153362	162568
4. Kertas dan Barang Cetakan	931	1028	1142	1280
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet				
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	7255	8449	9873	11503
7. Logam Dasar Besi & Baja				
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	17906	19103	20685	23024
9. Barang lainnya				
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	4477	5069	5821	6700
a. Listrik	4304	4876	5607	6458
b. Gas				
c. Air Bersih	173	193	214	242
5. BANGUNAN	262105	311256	379640	453438
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	269073	312588	367841	432944
a. Perdagangan Besar & Eceran	254200	295127	347494	409033
b. Hotel				
c. Restoran	14873	17461	20347	23911
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	30242	35443	42779	51849
a . Pe nga ngkuta n	22712	25814	30622	36551
1. Angkutan Rel				
2. Angkutan Jalan Raya	22328	25378	30119	35999
3. Angkutan Laut				
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	106	116	129	144
5. Angkutan Udara				
6. Jasa Penunjang Angkutan	278	320	374	408
b. Komunikasi	7530	9629	12157	15298
1. Pos dan Telekomunikasi	7383	9475	11992	15122
2. Jasa Penunjang Komunikasi	147	154	165	176
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	93037	106283	123411	144900
a. Bank	1054	1109	1222	1338
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	1762	1977	2245	2594
c. Jasa Penunjang Keuangan				
d. Sewa Bangunan	88460	101150	117572	138244
e. Jasa Perusahaan	1761	2047	2372	2724
9. JASA-JASA	421427	489325	600801	715327
a. Pemerintahan Umum	304616	354656	443656	534948
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	304616	354656	443656	534948
2. Jasa Pemerintah lainnya				

b. Swasta	116811	134669	157145	180379
1. Sosial Kemasyarakatan	68377	79475	92991	108122
2. Hiburan & Rekreasi	897	1012	1168	1342
3. Perorangan & Rumahtangga	47537	54182	62986	70915
PDRB DENGAN MIGAS	5654245	6494636	7309809	8243285
PDRB TANPA MIGAS	4240535	4917514	5652966	6504639

**Tabel 32. PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha 2010 - 2013 (Juta Rupiah)**

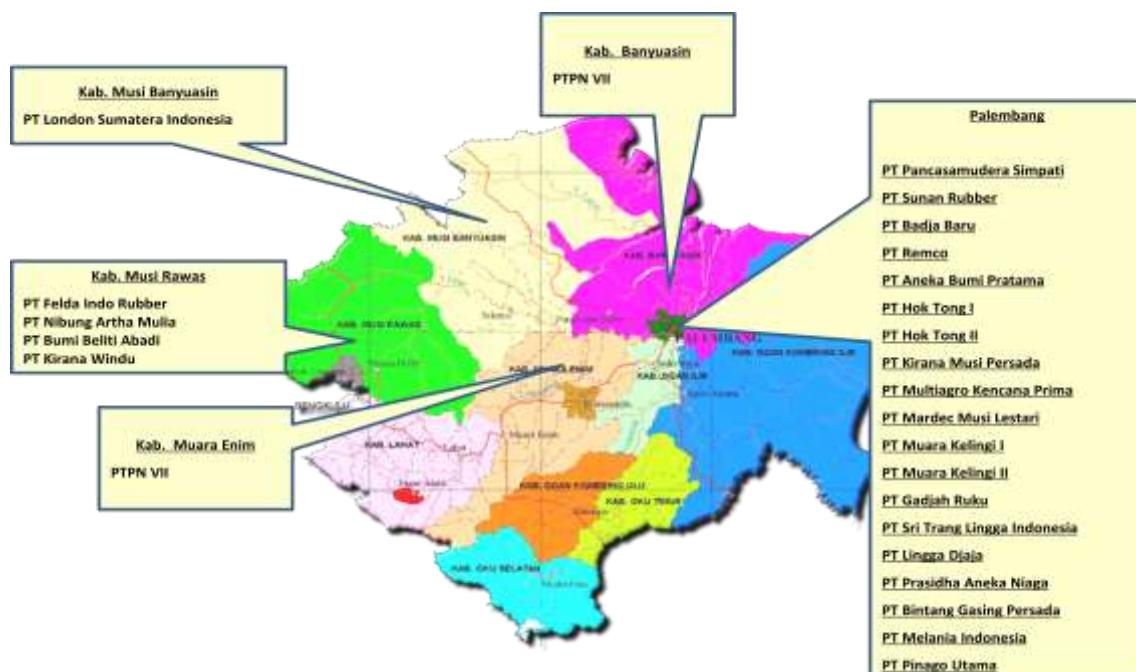
LAPANGAN USAHA	2010	2011 r	2012 *	2013 **
1. PERTANIAN	145432	1240220	1332798	1431702
a. Tanaman Bahan Makanan	297705	314970	328356	348719
b. Tanaman Perkebunan	657353	720479	784897	851727
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	60843	65142	70099	74249
d. Kehutanan	16321	16324	16361	16398
e. Perikanan	113210	123305	133085	140609
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	838269	851722	854315	865240
a. Minyak dan Gas Bumi	789874	798869	796472	802232
b. Pertambangan tanpa Migas				
c. Penggalian	48395	52853	57843	63008
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	246715	262442	280054	298991
a. Industri Migas				
1. Pengilangan Minyak Bumi				
2. Gas Alam Cair				
b. Industri Tanpa Migas	246715	262442	280054	298991
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	175322	190838	207976	226215
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki				
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	60964	60915	60897	61012
4. Kertas dan Barang Cetakan	385	412	427	447
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet				
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	2231	2384	2561	2735
7. Logam Dasar Besi & Baja				
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	7813	7893	8193	8582
9. Barang lainnya				
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	2200	2380	2583	2792
a. Listrik	2106	2281	2478	2680
b. Gas				
c. Air Bersih	94	99	105	112
5. BANGUNAN	102868	112116	125480	140689
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	104805	112737	122359	132470
a. Perdagangan Besar & Eceran	97287	104603	113703	123038
b. Hotel				
c. Restoran	7518	8134	8656	9432
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	13943	15820	17890	20172
a. Pengangkutan	9767	10504	11424	12321
1. Angkutan Rel				
2. Angkutan Jalan Raya	9614	10341	11249	12137
3. Angkutan Laut				
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	42	43	45	48
5. Angkutan Udara				
6. Jasa Penunjang Angkutan	111	120	130	136
b. Komunikasi	4176	5316	6466	7851
1. Pos dan Telekomunikasi	4019	5153	6297	7675
2. Jasa Penunjang Komunikasi	157	163	169	176
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	41739	45426	49505	53844
a. Bank	630	651	677	706
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	826	887	950	1017

c. Jasa Penunjang Keuangan				
d. Sewa Bangunan	39786	43359	47313	51519
e. Jasa Perusahaan	497	529	565	602
9. JASA-JASA	167596	180444	194740	209218
a. Pemerintahan Umum	124218	132776	142230	151574
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	124218	132776	142230	151574
2. Jasa Pemerintah lainnya				
b. Swasta	43378	47668	52510	57644
1. Sosial Kemasyarakatan	26351	29184	32388	35889
2. Hiburan & Rekreasi	356	384	416	451
3. Perorangan & Rumah tangga	16671	18100	19706	21304
	2663567	2823307	2979724	3155118
PDRB TANPA MIGAS	873693	2024438	2183252	2352886

## **5.8. Kondisi Konsumsi dan Perdagangan Komoditas Karet Wilayah Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet**

### **5.8.1. Industri Pengolahan Crumb Rubber**

Produksi karet Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.1 juta ton pada tahun 2014. Sementara itu kapasitas industri pengolahan crub rubber mencapai 1.23 juta ton. Data produksi riil menunjukkan produksi 782 ribu ton atau masih idle capacity sebesar 479 ribu ton. Tabel 33 memuat kapasitas terpasang dan produksi riil industri pengolahan bahan olahan karet atau bokar menjadi crumb rubber 24 perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil didata. Data pada Tabel 12 menunjukkan bahwa di luar PTPN VII sebanyak 4 unit perusahaan pengolah bokar menjadi crumb rubber di Sumatera Selatan masih bekerja di bawah kapasitas terpasangnya. Jika ditambah dengan kapasitas produksi dari PTPN, maka perusahaan pengolah bokar di Provinsi Sumatera Selatan masih kekurangan bahan baku sekitar 600 – 700 ribu ton bokar per tahun. Gambar 12 menunjukkan peta penyebaran pengolahan karet di Sumatera Selatan.



Gambar 12. Peta Sebaran Perusahaan Crumb Rubber di Sumatera Selatan.

**Tabel 33. Kapasitas Terpasang dan Produksi Riil Pengolahan Crumb Rubber Sumatera Selatan**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Produk	Kapasitas Terpasang (Ton/Thn)	Produksi Riil (Ton/Th)
1	PT Pancasamudera Simpati	Kec Gandus Palembang	SIR 20	90000	60075
2	PT Sunan Rubber	Kec Kertapati Palembang	SIR 20	60000	45770
3	PT Badja Baru	Kec Gandus Palembang	SIR 10, 20	60000	34967
4	PT Remco	Palembang	Crumb Rubber 25213	50000	30409
5	PT Aneka Bumi Pratama	Palembang	SIR 10, 20	93000	65448
6	PT Hok Tong I	Kec. Plaju Palembang	SIR 10, 20	65000	46062
7	PT Hok Tong II	Kremasan Palembang	SIR 10, 20	100000	
8	PT Kirana Musi Persada	Palembang	SIR 20	36000	34053
9	PT Multiagro Kencana Prima	Palembang	SIR 10, 20	30000	4420
10	PT Mardec Musi Lestari	Palembang	SIR 10, 20	30000	25401
11	PT Muara Kelingi I	P. Borang	SIR 10, 20	55000	30436
12	PT Muara Kelingi II	Kec Gandus Palembang	SIR 10, 20	55000	30436
13	PT Gadjah Ruku	Kec Gandus Palembang	SIR 5, 10, 20	80000	44657
14	PT Sri Trang Lingga Indonesia	Kec Kertapati Palembang	SIR 20	80000	52547
15	PT Lingga Djaja	Palembang	SIR 20	30000	21100
16	PT Prasida Aneka Niaga	Palembang	SIR 5, 10, 20	60000	23713
17	PT Bintang Gasing Persada	Palembang	SIR 20	36000	32274
18	PT Melania Indonjesia	Kab Banyuasin	RSS	2300	1732
19	PT Pinago Utama	Kec Banyuasin III Banyuasin	SIR 5, 10, 20	36000	25967
			RSS 1,2,3	720	
20	PT London Sumatera Indonesia	Kab Musi Banyuasin	SIR 3 CV, SIR 3L, SIR 10, 20	43200	4146
21	PT Felda Indo Rubber	Kab Muara Enim	SIR 10, 20	40000	40000
22	PT Nibung Artha Mulia	Kab Musi Rawas	SIR 5, 10, 20	18000	18000
23	PT Buni Beliti Abadi	Kec Tuah Negeri Kab Musi Rawas	SIR 20	60000	60000
24	PT Kirana Windu	Kec Rawas Hulu Kab Musi Rawas	SIR 5, 10, 20	50000	50000
				1260220	781613

### 5.8.2. Perkembangan Ekspor

Data ekspor karet Sumatera Selatan menunjukkan dari tahun ke tahun (Tabel 34). Dalam periode 2007 – 2013, volume ekspor karet Sumatera Selatan meningkat dari sekitar 698 ribu ton dengan nilai sekitar 1.42 miliar US \$ pada tahun 2007 menjadi 1.06 juta ton dengan nilai sekitar 2.71 miliar US \$ pada tahun 2013. Sumatera Selatan menyumbang sekitar 29 persen terhadap volume dan nilai ekspor Indonesia pada tahun 2007 dan meningkat menjadi lebih dari

39 persen pada tahun 2013. Ekspor karet berbentuk RSS dan SIR dengan negara tujuan ekspor utama China, Jepang dan Amerika Serikat.

**Tabel 34. Perkembangan dan Kontribusi Volume dan Nilai Ekspor Karet Sumatera Selatan Terhadap Indonesia Tahun 2007 - 2013**

Tahun	Sumatera Selatan		Indonesia		Kontribusi (%)	
	Volume (Ton)	Nilai (US \$ Ribu)	Volume (Ton)	Nilai (US \$ Ribu)	Volume	Nilai
2007	698,225	1,415,048	2,407,972	4,868,700	29.00	29.06
2008	688,258	1,840,817	2,283,158	6,023,323	30.15	30.56
2009	695,807	1,111,016	1,991,533	3,241,534	34.94	34.27
2010	769,903	2,419,232	2,351,915	7,326,605	32.74	33.02
2011	836,808	3,868,385	2,556,233	11,763,667	32.74	32.88
2012	948,297	2,963,826	2,444,503	7,861,947	38.79	37.70
2013	1,056,517	2,705,493	2,701,445	6,906,952	39.11	39.17

### **5.8.3. Perkembangan Ekspor, Impor dan Konsumsi Karet Dunia**

Pada tahun 2014 produksi karet dunia mencapai 28.76 juta ton, dimana produksi karet alam mencapai 12.07 juta ton dan karet sintetis 16.69 juta ton. Pada tahun yang sama konsumsi karet dunia mencapai total 28.92 juta ton dengan konsumsi karet alam 12.16 juta ton dan karet sintetis 16.76 juta ton.

**Tabel 35. Produksi dan konsumsi karet simtetis dan karet alam**

Tahun	Produksi			Konsumsi		
	Karet Alam	Karet Sintetis	Total	Karet Alam	Karet Sintetis	Total
2000	6,811	10,870	17,681	7,108	10,830	17,938
2001	6,913	10,483	17,396	7,039	10,253	17,292
2002	7,317	10,906	18,223	7,515	10,679	18,194
2003	7,986	11,414	19,400	7,797	11,177	18,974
2004	8,726	11,979	20,705	8,562	11,693	20,255
2005	8,921	12,025	20,946	9,049	11,731	20,780
2006	9,850	12,700	22,550	9,513	12,434	21,947
2007	10,057	13,367	23,424	10,133	13,087	23,220
2008	10,098	12,747	22,845	10,187	12,578	22,765
2009	9,723	12,409	22,132	9,289	12,146	21,435
2010	10,395	14,124	24,519	10,792	14,046	24,838
2011	11,217	15,104	26,321	10,997	14,858	25,855
2012	11,629	15,086	26,715	11,020	14,974	25,994
2013	12,251	15,473	27,724	11,388	15,467	26,855
2014	12,070	16,685	28,755	12,159	16,761	28,920

Sejak tahun 2000 hingga 2014, produksi dan konsumsi karet dunia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2009 dimana produksi dan konsumsi karet alam menunjukkan penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya. Neraca produksi dan konsumsi karet menunjukkan bahwa secara total terjadi defisit pada tahun 2000, 2010 dan 2014 (Tabel 5...).

**Tabel 36. Perkembangan Neraca Produksi dan Konsumsi Karet Dunia Tahun 2000 – 2014 (Ribu Ton)**

Tahun	Neraca Karet Alam	Neraca Karet Sintetis	Neraca Karet
2000	-297	40	-257
2001	-126	230	104
2002	-198	227	29
2003	189	237	426
2004	164	286	450
2005	-128	294	166
2006	337	266	603
2007	-76	280	204
2008	-89	169	80
2009	434	263	697
2010	-397	78	-319
2011	220	246	466
2012	609	112	721
2013	863	6	869
2014	-89	-76	-165

**Tabel 37. Perkembangan Persentase Perubahan Harga, Produksi dan Konsumsi Karet Dunia Tahun 2001 – 2014 (%)**

Tahun	Harga Dunia		Produksi Dunia			Konsumsi Dunia		
	Minyak Bumi	Karet Alam	Karet Alam	Karet Sintetis	Karet	Karet Alam	Karet Sintetis	Karet
2001	-13.82	-13.90	1.50	-3.56	-1.61	-0.97	-5.33	-3.60
2002	2.54	33.03	5.84	4.04	4.75	6.76	4.15	5.22
2003	15.80	41.56	9.14	4.66	6.46	3.75	4.66	4.29
2004	30.70	20.46	9.27	4.95	6.73	9.81	4.62	6.75
2005	41.30	15.12	2.23	0.38	1.16	5.69	0.32	2.59
2006	20.46	40.29	10.41	5.61	7.66	5.13	5.99	5.62
2007	10.67	8.71	2.10	5.25	3.88	6.52	5.25	5.80
2008	36.42	14.13	0.41	-4.64	-2.47	0.53	-3.89	-1.96
2009	-36.34	-26.48	-3.71	-2.65	-3.12	-8.82	-3.43	-5.84
2010	27.93	90.11	6.91	13.82	10.79	16.18	15.64	15.88
2011	31.61	31.86	7.91	6.94	7.35	1.90	5.78	4.09
2012	0.96	-29.89	3.67	-0.12	1.50	0.21	0.78	0.54
2013	-0.89	-17.25	5.35	2.57	3.78	3.34	3.29	3.31
2014	-7.52	-29.98	-1.48	7.83	3.72	6.77	8.37	7.69

Pada karet sintetis defisit hanya terjadi pada tahun 2014. Sementara itu neraca pada karet alam mengalami fluktuasi. Harga karet alam internasional menunjukkan peningkatan jika terjadi defisit pada tahun

---

sebelumnya. Tabel 38 menampilkan persentase perubahan harga, produksi dan konsumsi karet yang menunjukkan bahwa perubahan harga juga dipengaruhi oleh perubahan harga minyak bumi dunia.

Dugaan bahwa peningkatan harga karet alam dipengaruhi oleh perkembangan produksi negara Indochina (Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar) tidak sepenuhnya benar. Produksi karet di negara-negara tersebut memang konsisten meningkat, namun demikian peningkatan ini disertai dengan penurun produksi di Malaysia. Nampaknya perubahan produksi di India jauh lebih mempengaruhi perubahan harga jika dibanding negara-negara tersebut. Sebagai contohnya adalah peningkatan harga pada tahun 2011 adalah akibat penurunan produksi karet alam di India yang mencapai - 7.50 persen dibandingkan produksi tahun 2010. Pada tahun berikutnya produksi karet di India menunjukkan peningkatan dan mempengaruhi dinamika harga karet alam internasional. Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar kedua setelah Thailand dengan pangsa produksi 26 persen, namun demikian produktivitas karet Indonesia masih jauh dibawah Vietnam, Thailand dan Kamboja.

Tabel 38. Perkembangan Produksi Karet pada Negara-negara Produsen Karet Dunia tahun 2009 – 2013 (juta Ton)

Negara	Tahun					Rata-rata	Share	Rata-rata Peningkatan
	2009	2010	2011	2012	2013	(Ton)	(%)	(%/Thn)
Thailand	3.09	3.05	3.35	3.63	3.86	3.40	31.03	5.83
Indonesia	2.44	2.73	2.99	3.01	3.11	2.86	26.11	6.33
Malaysia	0.86	0.94	1.00	0.92	0.83	0.91	8.30	-0.54
India	0.83	0.86	0.80	0.90	0.90	0.86	7.85	2.25
Viet Nam	0.71	0.75	0.79	0.88	0.95	0.82	7.45	7.50
Lainnya	1.83	1.99	2.17	2.23	2.32	2.11	19.26	6.18
Total	9.76	10.33	11.10	11.57	11.97	10.94	100.00	5.24

#### 5.8.4. Perkembangan Produktivitas Karet Dunia

Produktivitas merupakan salah satu indikator daya saing dari efisiensi penggunaan input untuk menghasilkan output. Visi pengembangan kawasan perkebunan berbasis karet di Sumatera Selatan salah satunya adalah mampu

---

berdaya saing internasional. Dengan menggunakan produktivitas, maka Sumatera Selatan memiliki potensi sekaligus untuk bersaing internasional. Saat ini produktivitas karet di Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 1.43 ton per Ha, sedikit dibawah Vietnam dan Thailand, namun di atas Kamboja, Malaysia dan Indonesia. Disamping peningkatan kualitas, peningkatan produktivitas hingga mencapai produktivitas potensial mencapai salah satu kunci menuju daya saing.

Tabel 39. Perkembangan Produksi Karet pada Negara-negara Produsen Karet ASEAN tahun 2009 – 2013 (juta Ton)

Negara	Tahun					Rata-rata (Kg/Ha)
	2009	2010	2011	2012	2013	
Viet Nam	1697.72	1714.01	1716.79	1734.07	1731.63	1718.85
Thailand	1664.96	1581.84	1639.61	1640.93	1595.75	1624.62
Cambodia	1095.06	1123.27	1205.82	1194.44	1194.44	1162.61
Malaysia	810.04	925.22	969.98	886.30	781.66	874.64
Indonesia	710.38	793.85	865.2	864.57	873.94	821.59
Philippines	1005.3	940.31	869.62	628.39	601.23	808.97
Myanmar	646.72	672.32	754.31	750.00	725.49	709.77
Brunei Darussalam	51.69	52.96	56.91	56.91	56.91	55.08

Saat ini sekitar baru sekitar 60 persen areal karet di Sumatera Selatan yang menggunakan klon unggul dengan produktivitas tinggi. Dalam rangka peningkatan produktivitas, penggunaan klon unggul menjadi salah satu kunci keberhasilan, disamping manajemen budidaya, penanganan panen dan pasca panen. Balai Penelitian Karet Sembawa dan Lembaga Riset Perkebunan Nusantara memiliki koleksi klon unggul dengan produktivitas di atas 2 ton per ha. Rehabilitasi dan peremajaan atau replanting menjadi faktor yang penting untuk mencapai produktivitas yang tinggi.

#### **5.8.4. Pendapatan Petani**

Tingkat pendapatan rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata mencapai Rp. 31.94 juta per rumah tangga per tahun (Tabel 40) Usaha pertanian menjadi sumber utama pendapatan dengan nilai rata-rata Rp. 23.01 juta per Rumah Tangga per tahun. Rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi berada di Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian diikuti oleh

Palembang, OKU dan Banyuasin. Pendapatan rata-rata rumah tangga pertanian di Kabupaten Musi Rawas berada di bawah rata-rata provinsi dan berada di peringkat 9 dari 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

**Tabel 40. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Data SPP 2013 (Rp. Juta)**

Kabupaten	Rata-rata	Sumber Pendapatan/Penerimaan				
		Usaha Pertanian	Usaha Luar Pertanian	Usaha Lainnya dan Transfe r	Buruh Pertania n	Buruh non Pertania n
[01] OGAN KOMERING ULU	35.65	31.18	2.25	-3.16	2.84	2.55
[02] OGAN KOMERING ILIR	32.54	22.34	2.95	1.77	3.16	2.32
[03] MUARA ENIM	31.50	25.10	2.28	-0.42	0.85	3.69
[04] LAHAT	28.57	15.39	3.09	2.95	2.11	5.03
[05] MUSI RAWAS	30.89	24.01	2.43	-0.74	2.79	2.40
[06] MUSI BANYUASIN	44.51	35.65	2.06	1.72	2.02	3.05
[07] BANYU ASIN	33.88	22.20	1.58	2.15	4.11	3.84
[08] OGAN KOMERING ULU SELATAN	25.25	19.27	1.55	0.98	1.56	1.89
[09] OGAN KOMERING ULU TIMUR	32.61	23.49	2.40	0.92	2.05	3.75
[10] OGAN ILIR	26.73	17.58	3.08	-0.11	2.35	3.84
[11] EMPAT LAWANG	21.76	15.63	1.40	1.95	0.71	2.06
[71] PALEMBANG	37.74	14.82	3.64	4.14	2.21	12.93
[72] PRABUMULIH	29.92	23.49	2.26	0.01	0.29	3.87
[73] PAGAR ALAM	23.20	14.35	3.40	0.74	1.60	3.11
[74] LUBUKLINGGAU	30.31	18.53	3.01	2.48	1.43	4.86
<b>[1600] SUMATERA SELATAN</b>	<b>31.94</b>	<b>23.01</b>	<b>2.34</b>	<b>0.96</b>	<b>2.32</b>	<b>3.32</b>

Jika dibandingkan dengan jenis usaha rumah tangga lainnya di sektor pertanian, rata-rata tingkat pendapatan rumah tangga usaha perkebunan lebih tinggi dari sektor lainnya. Berdasarkan Tabel 41 upaya untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga perkebunan perlu dilakukan melalui diversifikasi usaha baik secara horisontal melalui integrasi tanaman dan ternak, peningkatan kualitas produksi dan upaya penanganan panen dan pasca panen serta pengolahan hasil secara sederhana. Sumber peningkatan lain adalah upaya pemanfaatan kayu dari kebun karet yang dimiliki oleh petani.

**Tabel 41. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Sub Sektor dan Sumbernya di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Data SPP 2013 (Rp. Juta)**

Sumber Pendapatan Utama	Sumber Pendapatan Usaha di Sektor Pertanian						Jumlah
	Padi	Palawija	Hortikultura	Perkebunan	Ternak	Pertanian Lainnya	
<b>A. SEKTOR PERTANIAN</b>							
1. Tanaman Padi dan Palawija	9.89	0.35	0.28	2.32	0.58	0.94	14.36
2. Tanaman Hortikultura	1.09	0.35	13.33	2.95	0.44	0.94	19.09
3. Tanaman Perkebunan	1.13	0.03	0.39	25.80	0.36	0.55	28.26
4. Peternakan	1.66	0.04	0.19	1.78	19.12	1.12	23.91
6. Budidaya Ikan di Tambak/Air Payau	3.18	0.00	0.00	2.42	0.00	22.59	28.18
7. Budidaya Ikan/Biota Lain di Kolam Air Tawar	3.87	0.01	0.17	0.16	1.49	32.02	37.72
8. Budidaya Ikan di Sawah	1.34	0.24	0.08	0.57	0.96	21.54	24.74
9. Budidaya Ikan di Perairan Umum	0.83	0.00	0.07	0.00	0.10	17.48	18.48
11. Penangkapan Ikan di Laut	0.42	0.00	0.00	-0.02	0.00	31.78	32.17
12. Penangkapan Ikan di Perairan Umum	1.44	0.00	0.42	0.28	0.59	14.17	16.90
13. Tanaman Kehutanan	0.40	0.00	0.98	6.74	1.20	9.52	18.83
15. Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar	1.44	0.28	0.06	-0.14	0.16	15.70	17.49
16. Jasa Pertanian	1.47	0.00	0.29	0.78	0.49	11.72	14.75
<b>B. DI LUAR SEKTOR PERTANIAN</b>							
17. Industri Pengolahan Hasil Pertanian	2.34	0.12	0.39	1.98	0.96	1.43	7.20
18. Industri Pengolahan Bukan Hasil Pertanian	2.37	0.06	0.38	2.95	0.12	0.31	6.20
19. Pertambangan dan Penggalian	1.64	0.09	0.28	4.41	0.31	0.07	6.81
20. Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	3.88	1.31	0.19	2.25	0.62	1.45	9.69
21. Air, Daur Ulang, Pembangunan, dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0.24	0.00	0.59	-1.16	0.00	0.09	-0.26
22. Konstruksi	2.48	0.08	0.63	2.55	0.24	0.37	6.35
23. Perdagangan, Akomodasi, Penyediaan, Makan minum	2.16	0.20	0.77	6.64	0.40	0.35	10.51
24. Transportasi, Pergudangan, Informasi, dan Komunikasi	1.93	0.22	0.66	5.20	0.27	0.18	8.46
25. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.95	0.02	0.04	4.80	0.17	-0.63	6.35
26. Lainnya	2.78	0.19	0.76	7.92	0.55	0.35	12.54
<b>C. PENDAPATAN/PENERIMAAN LAINNYA</b>							
27. Pensiun, sewa lahan, bunga, transfer dll	1.99	0.09	0.34	1.42	0.34	0.43	4.61
<b>Rata-rata</b>	3.37	0.13	0.59	17.48	0.53	0.91	23.01

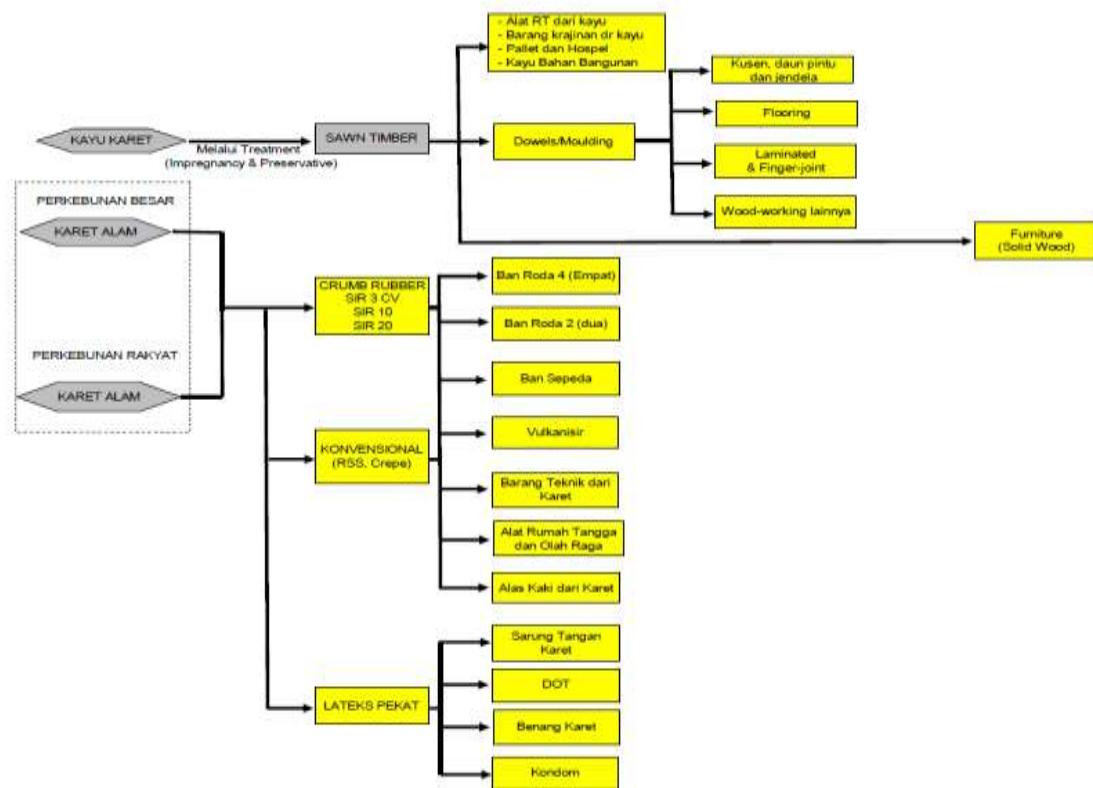
Upaya peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani juga dapat dilakukan melalui pengembangan industri karet hilir di Provinsi Sumatera Selatan. Disamping mendorong peningkatan pendapatan petani, hilirasi karet

akan mendorong peningkatan permintaan dan nilai tambah karet dan industri pengolahan di Sumatera Selatan.

Tabel 42. Lokasi Industri Produk Hilir Karet

Lokasi	Jenis produksi yang dihasilkan	Skala industri
DKI Jakarta	<b>Sarung tangan</b> , sarung jari, dekorasi panggung/perfilman, karet busa, benang karet	Skala industri rumah tangga dan uji coba pabrik
Kab, Bogor		Industri Rumah Tangga
Kab.Bekasi		
Kab.Tangerang	Balon dan <b>sarung tangan</b>	Skala industri rumah tangga dan uji coba pabrik
Kab.Cianjur	Balon dan <b>sarung tangan</b> dan benang karet	Industri Rumah Tangga
Padalarang		
Bandung	<b>Sarung tangan</b>	Industri Rumah Tangga
Semarang	<b>Sarung tangan</b>	Uji pabrik
Surabaya	Karet untuk transmiter Kondom dan perekat Balon udara Balon, <b>sarung tangan</b> dan dot bayi	Ujipabrik Industri Rumah Tangga Industri Rumah Tangga

Dari data Kementerian Perindustrian, pengolahan hilir karet berada di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur (Tabel 42) Sumatera Selatan berpotensi untuk mengembangkan industri hilir karet dengan pemasaran lokasi di kawasan ekonomi khusus Tanjung Api Api. Dalam rangka hilirasi industri karet, Provinsi Sumatra Selatan memiliki potensi untuk menghasilkan produk dari getah karet maupun dari kayu karet seperti dapat dilihat pada pohon industri karet Gambar 13.



Gambar 13. Pohon Industri Karet

## **5.9. Kondisi Teknis dan Teknologis Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Karet**

Posisi tawar petani, rendahnya kualitas dan harga yang diterima serta rendahnya aplikasi teknologi dan manajemen budidaya menjadi salah satu permasalahan yang tak henti-hentinya disebut-sebut sebagai penyebab rendahnya tingkat pendapatan petani. Pendapatan petani yang rendah menyebabkan insentif petani untuk menerapkan teknologi anjuran berkurang dan seterusnya. Dari sisi posisi tawar, saat ini sekitar 89 persen petani mengangkut hasil karet dari kebun ke rumah dengan sepeda motor, 7 persen dengan sepeda dan 4 persen dipunggul. Dalam menjual hasil hanya 5 persen petani yang menjual melalui kelompok, 14 persen petani mengangkut karet ke tengkulak dan 81 persen petani didatangi oleh tengkulak karet ke rumah-rumah. Posisi tawar petani lemah ketika penjualan karet didatangi oleh dan atau mengantarkan ke tengkulak.

Perawatan dan pemeliharaan tanaman yang kurang dan teknik sadap yang tidak sesuai anjuran menyebabkan potensi umur tanaman 25 – 30 tahun hanya sampai pada 14 – 15 tahun harus dilakukan replanting. Serangan penyakit juga meningkat ketika kedua paket teknologi anjuran tersebut tidak dilaksanakan. Replanting dan perbaikan manajemen budidaya menjadi penting untuk dilaksanakan. Dan pembinaan serta penerapan praktek pertanian yang baik, penanganan panen dan pasca panen, pengembangan kelembagaan dan penerapan standar mutu bokar menjadi salah satu kunci keberhasilan.

Lembaga penelitian seperti BPPT, Badan Litbang Pertanian, Balai Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, Balai Penelitian Karet Sembawa, Lembaga Riset Perkebunan Nusantara, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Universitas baik di Sumatera Selatan maupun provinsi lainnya di Indonesia merupakan sumber inovasi dan dapat diajak bekerja sama dalam mencapai keberhasilan pengembangan karet di Sumatera Selatan.

## **BAB VI ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN BERBASIS KOMODITAS KARET**

Komoditas Karet merupakan Produk Unggulan Kabupaten Musi Rawas, hal ini telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Musi Rawas tahun 2011 (Nomor : 436a/Kpts/Disbun/2011) yang menetapkan Komoditas Karet sebagai Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) Musi Rawas. Selain merupakan komoditas unggulan Kabupaten, karet juga merupakan komoditas unggulan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Berdasarkan Kepmenan No 50/2015 lokasi pengembangan kawasan perkebunan karet nasional di Sumatera Selatan adalah di Kabupaten Musi Rawas sebagai tindak lanjut dari Rapat Musrenbang Nasional tanggal 14 Mei 2014 di Bogor, dimana Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Karet Tingkat Nasional. Disamping itu, Kabupaten Musi Rawas ditetapkan Kementerian PDT sebagai Etalase PRUKAB Komoditas Karet Nasional, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2011 (nomor : 103/Kep/MPDT/IV/2011) yang menetapkan Komoditas Karet Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) Musi Rawas.

Upaya untuk menetapkan Musi Rawas sebagai Kawasan Perkebunan berbasis komoditas karet telah dimulai tahun 2012, dimana Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebagai percontohan dalam penerapan model pembangunan pertanian terpadu dengan pendekatan kawasan yang telah dituangkan dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013 – 2045. Ketetapan ini dikukuhkan dengan Surat Kementerian Pertanian tahun 2012 (Nomor : 1597/RC/110/E1/03/2012 tanggal 28 Maret 2012) perihal Penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Pusat Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu Berbasis Karet. Penyusunan Masterplan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet dimulai dari Kabupaten Musi Rawas dan tentunya akan dilanjutkan secara bertahap pada Kabupaten lainnya dalam lima tahun ke depan. Pada tahun 2019 ditargetkan penyusunan Masterplan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet diharapkan sudah selesai. Berdasarkan hal ini, maka dokumen masterplan ini akan terus dipertajam dan disempurnakan hingga pada akhirnya tidak hanya Kabupaten Musi Rawas yang memiliki dokumen master plan namun juga seluruh kabupaten/kota yang direncanakan merupakan lokasi pengembangan kawasan karet di Provinsi Sumatera Selatan.

---

Pengembangan kawasan karet yang dilakukan akan bertitik tolak dari upaya intensifikasi dengan titik berat pada upaya untuk mendukung rencana hilirisasi industri karet nasional dan provinsi, dan upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan provinsi, nasional dan kabupaten kota. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dilakukan perluasan areal pengembangan jika tersedia peluang perluasan areal. Disamping dalam rangka peningkatan produktivitas, produksi dan mutu hasil melalui perbaikan budidaya, panen dan penanganan pasca panen, fokus upaya intensifikasi dilakukan pada upaya peremajaan dan rehabilitasi tanaman karet. Peremajaan atau penanaman kembali merupakan upaya berkelanjutan dari program-program pengembangan tanaman karet di Sumatera Selatan pada periode 1970-1990, dimana pada masa-masa sekarang telah masuk siklus peremajaan atau penanaman kembali. Selain pada tanaman yang telah memasuki siklus peremajaan peremajaan juga penting untuk dilakukan pada tanaman yang mengalami kerusakan akibat berbagai faktor sehingga tidak produktif. Berdasarkan hal ini, penyusunan masterplan sebagai dokumen perencanaan akan memuat pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang dari program peremajaan atau penanaman kembali dan rehabilitasi, serta dari upaya perbaikan budidaya, panen dan penanganan pasca panen.

Berdasarkan arahan dari program pembangunan Kabupaten Musi Rawas, Pusat Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Karet memiliki pusat pengembangannya di Kecamatan Tuah Negeri dan kecamatan lainnya sebagai pendukung. Dari seluruh kecamatan yang ada, kawasan pendukung berada di empat kecamatan yaitu Kecamatan Muarabeliti, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Sukakarya Dan Kecamatan Muara Kelangi. Berdasarkan hal ini berdasarkan hasil program utama pengembangan kawasan karet setelah kecamatan Tuah Negeri adalah Kecamatan Muarabeliti, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Muara Kelangi.

Program pengembangan kawasan agropolitan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, Pusat Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Karet Berbasis komoditas karet di Kecamatan Tuah Negeri adalah di Desa Lubuk Rumbai. Desa-desa lainnya di Kecamatan Tuah Negeri sebagai wilayah

---

pendudukung. Selain Lubuk Rumbai, desa-desa yang memiliki tanaman karet luas adalah Banpres, Bamasko, Petunang, Jaya Bakti dan Air Beliti desa-desa ini merupakan program pengembangan lanjutan dari desa Lubuk Rumbai.

## **6.1. Kesesuaian Lahan dan Agroklimat dan Ketersediaan Areal Untuk Perluasan Areal dan Pengembangan Kawasan**

### **6.1.1. Perluasan Areal Perkebunan Karet**

Kabupaten Musi Rawas memiliki potensi sumberdaya lahan yang sesuai untuk tanaman karet seluas kurang lebih 435 ribu Ha. Berdasarkan hasil overlay dari berbagai peta diantara Peta RTRW, Peta spot 5 dan 6 LAPAN, Peta Tutupan Lahan dan Penggunaan Lahan dan Peta Analisis Kesesuaian Lahan diperoleh dari 435 ribu Ha lahan yang sesuai untuk tanaman karet 333 ribu Ha, sehingga masih terdapat potensi untuk perluasan areal tanaman karet seluas 102 ribu Ha (Tabel 49). Potensi areal seluas 102 ribu Ha tersebut akan menjadi peluang dan dapat dimanfaatkan apabila dari sisi kepemilikan dan penguasaan memungkinkan.

Tabel 49. Luas Lahan Sesuai Untuk Karet dan Potensi Perluasan Areal Tanaman Karet di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

No	Kode	Kecamatan	Luas Lahan Sesuai Untuk Karet (Ha)	Luas Telah Digunakan (Ha)	Potensi Sisa Lahan Sesuai (Ha)
1	030	STL Ulu	20,509.40	9,965.00	10,544.40
2	031	Selangit	61,719.00	36,784.00	24,935.00
3	032	Sumber Harta	3,713.00	2,325.00	1,388.00
4	040	Tugu Mulyo	2,485.91	1,041.00	1,444.91
5	041	Purwodadi	3,709.00	3,140.00	569.00
6	050	Muara Beliti	13,336.00	12,667.00	669.00
7	051	TPK	27,254.43	24,547.00	2,707.43
8	060	Jaya Loka	14,931.00	14,587.00	344.00
9	061	Sukakarya	10,257.00	7,206.00	3,051.00
10	070	Muara Kelangi	49,038.00	41,942.00	7,096.00
11	071	BTS Ulu	70,393.00	44,293.00	26,100.00
12	072	Tuah Negeri	20,952.09	17,102.00	3,850.09
13	080	Muara Lakitan	113,247.00	103,943.00	9,304.00
14	090	Megang Sakti	23,183.40	13,104.00	10,079.40
	1605	Musi Rawas	434,728.23	332,646.00	102,082.23

Sumber : Hasil Analisis

Dalam rangka perluasan areal tanaman karet perlu dilakukan pendataan mengenai kepemilikan dan penguasaan lahan. Apabila dari sisi kepemilikan dan penguasaan memungkinkan, maka perluasan areal tanaman karet di Musi Rawas dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sisa potensi yang ada yaitu seluas 102 ribu Ha. Program pendataan lahan menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pihak Dinas Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten bekerja sama dengan instansi terkait dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pusat dan daerah. Perluasan areal atau ekstensifikasi belum dapat diputuskan pada tahap awal perencanaan pengembangan kawasan perkebunan karet di Kabupaten Musi Rawas kecuali pada lahan-lahan yang telah dimiliki dan dikuasai oleh petani.

Tabel 50. Luas Tutupan Lahan Karet dan Luas Kebun Karet Rumah Tangga Petani di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014

No	Kode	Kecamatan	Luas Tutupan Lahan Karet 2014 (Ha)	Luas Lahan Karet Kebun Petani Data ST 2013 (Ha)	Belum Info Penguasaan (Ha)
1	030	STL Ulu	31,681.02	7894.48	23,786.53
2	031	Selangit	9,768.98	5402.42	4,366.56
3	032	Sumber Harta	2,866.14	2866.14	0.00
4	040	Tugu Mulyo	2,936.92	2936.92	0.00
5	041	Purwodadi	3,372.69	2459.40	913.29
6	050	Muara Beliti	6,437.14	4241.44	2,195.70
7	051	TPK	24,470.42	4264.91	20,205.51
8	060	Jaya Loka	12,539.55	6979.97	5,559.58
9	061	Sukakarya	7,971.08	4748.73	3,222.36
10	070	Muara Kelingi	11,473.62	11473.62	0.00
11	071	BTS Ulu	48,287.14	11606.40	36,680.75
12	072	Tuah Negeri	17,368.13	13588.92	3,779.21
13	080	Muara Lakitan	58,760.54	9594.29	49,166.26
14	090	Megang Sakti	14,664.23	14664.23	0.00
	1605	Musi Rawas	252,597.62	102.721.88	149,875.74

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 2015 dan Data Sensus Pertanian 2013 (Diolah)

Tabel 50. memuat rincian hasil analisis tutupan lahan oleh tanaman karet di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan data tahun 2014. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas lahan karet di Kabupaten Musi Rawas mencapai 253 ribu Ha. Data hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 BPS menunjukkan bahwa luas lahan karet yang dimiliki dan dikuasai oleh Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) petani karet adalah 103 ribu Ha. Dengan demikian masih terdapat sekitar 150 ribu ha tanaman

---

karet di Kabupaten Musi Rawas yang belum ada informasi apakah lahan tersebut dimiliki oleh petani luar daerah Kabupaten Musi Rawas, oleh perusahaan, lahan karet namun tidak berada pada kawasan peruntukkan perkebunan atau merupakan lahan hutan karet. Pengumpulan data dan informasi menjadi penting karena akan menentukan program dan perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten, bahkan nasional.

Hasil pendataan awal menunjukkan bahwa luas lahan potensial untuk dikembangkan sebagai perkebunan karet rakyat di Kecamatan Tuah Negeri mencapai luas 2.282 hektar terdiri dari lahan repuh sebesar 2,19 persen, lahan alang-alang sebesar 16,04 persen serta lahan jenis lainnya sebesar 81,77 persen. Ini mengindikasikan bahwa potensi karet ini secara total sangat mendukung ketersediaan bahan baku karet bagi pengembangan kawasan ini ke depan.

Luas areal tanaman perkebunan terutama karet di Kecamatan Tuah Negeri sangat dominan, tersebar merata di 11 desa. Persebaran tanaman karet dominan berada sejumlah desa antara lain Desa Jaya Tunggal, Lubuk Rumbai, Dharma Sakti, dan Petunang. Demikian pula lokasi persebaran komoditi karet di kawasan pendukung berada di empat kecamatan yaitu Kecamatan Muarabeliti, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Sukakarya Dan Kecamatan Muara Kelangi.

### **6.1.2. Intensifikasi Areal Perkebunan Karet Rakyat**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka program pengembangan lima tahun ke depan akan fokus pada Kecamatan Tua Negeri yang didukung oleh kecamatan sekitarnya yang berbatasan dengan Tuah Negeri. Berdasarkan Tabel 51, Kecamatan Tuah Negeri memiliki luas areal yang sesuai untuk karet seluas kurang lebih 20.95 ribu Ha dan telah digunakan sekitar 17.10 ribu Ha dan masih terdapat potensi perluasan sekitar 3.85 ribu Ha. Namun demikian potensi ini akan menjadi peluang setelah dilakukan pendataan kepemilikan dan penguasaanya.

Berdasarkan Tabel 48 dari total luas tutupan lahan karet 17.37 ribu ha, luas tanaman karet rakyat adalah 13.59 ribu Ha, dengan demikian terdapat luas areal karet yang masih diidentifikasi seluas 3.78 ribu Ha. Berdasarkan Tabel 51, dari total

---

luas areal karet rakyat 13.59 ribu Ha di Kecamatan Tuan Negeri, luas tanam belum menghasilkan (TBM) adalah 1814.37 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 10827.52 Ha dan Tanaman Tidak Menghasilkan atau Tanaman Tua dan Tanaman Rusak (TTM/TTR) adalah 947.04 Ha. Berdasarkan hal ini, maka program perbaikan manajemen budidaya adalah seluas 12.64 ribu Ha, program penanganan panen dan pasca panen 10.83 ribu dan peremajaan 947 Ha.

Tabel 51. Luas Perkebunan Karet Rakyat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 (Ha)

No	Kode	Kecamatan	TBM	TM	TTM/TTR	Total
1	030	STL Ulu	1777.07	5740.22	377.19	7894.48
2	031	Selangit	1559.36	3487.40	355.67	5402.42
3	032	Sumber Harta	356.81	2148.27	361.06	2866.14
4	040	Tugu Mulyo	247.19	2467.28	222.45	2936.92
5	041	Purwodadi	132.77	2255.30	71.34	2459.40
6	050	Muara Beliti	457.65	3578.73	205.06	4241.44
7	051	TPK	787.37	3135.37	342.17	4264.91
8	060	Jaya Loka	1071.40	5235.63	672.95	6979.97
9	061	Sukakarya	578.01	3855.68	315.04	4748.73
10	070	Muara Kelingi	2191.28	8794.79	487.55	11473.62
11	071	BTS Ulu	2895.39	6296.39	2414.62	11606.40
12	072	Tuah Negeri	1814.37	10827.52	947.04	13588.92
13	080	Muara Lakitan	2615.96	6358.46	619.87	9594.29
14	090	Megang Sakti	2007.69	11372.47	1284.07	14664.23
	1605	Musi Rawas	18.492.30	75.553.50	8.676.07	102.721.88

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 2015 dan Data Sensus Pertanian 2013 (Diolah)

Hasil analisis pada tabel 52 menunjukkan tingkat kepadatan atau populasi tanaman per Ha di Kecamatan Tuah Negeri adalah 497 pohon per Ha dan hal ini menujukkan sesuai rekomendasi, dimana dengan jarak tanam 3x5 m, maka kepadatan tanaman akan mencapai 500 – 550 pohon per Ha. Rata-rata kepadatan tanaman di Kabupaten Musi Rawas adalah 543 pohon per Ha, dimana beberapa kecamatan memiliki rata-rata diatas 550 pohon per Ha yaitu Kecamatan Sumber Harta, TPK dan Muara Kelingi. Program peremajaan karet di Kecamatan Tuah Negeri seluas 947 Ha aka membutuhkan benih karet sebanyak kurang lebih 520 ribu polybag, dengan cadangan kemungkinan adanya benih yang rusak atau mati dalam proses pengangkutan atau penanaman awal yang masih rentan sekitar 10 persen maka kebutuhan benih minimum 575 ribu polybag.

**Tabel 52.** Populasi Tanaman dan Rata-rata Jumlah Tegakan Karet Per Ha Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014

No	Kode	Kecamatan	TBM	TM	TTM/TTR	Jumlah	Rata-rata Per Ha
1	030	STL Ulu	912773	2948410	193741	4054924	513.64
2	031	Selangit	765550	1712097	174610	2652257	490.94
3	032	Sumber Harta	204315	1230134	206750	1641199	572.62
4	040	Tugu Mulyo	133144	1328943	119818	1581905	538.63
5	041	Purwodadi	70457	1196862	37861	1305180	530.69
6	050	Muara Beliti	200079	1564579	89650	1854308	437.19
7	051	TPK	448326	1785280	194833	2428439	569.40
8	060	Jaya Loka	529920	2589569	332843	3452332	494.61
9	061	Sukakarya	310646	2072212	169315	2552173	537.44
10	070	Muara Kelingi	1232713	4947536	274271	6454520	562.55
11	071	BTS Ulu	1977766	4300903	1649366	7928035	683.07
12	072	Tuah Negeri	901804	5381647	470710	6754161	497.03
13	080	Muara Lakitan	1428156	3471337	338412	5237905	545.94
14	090	Megang Sakti	1071775	6071024	685480	7828279	533.83
	1605	Musi Rawas	10.187.424	40.600.533	4.937.660	55.725.617	542.49

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 2015 dan Data Sensus Pertanian 2013 (Diolah)

Data tahun 2014 (Tabel 53) menunjukkan bahwa Desa Lubuk Rumbai memiliki luas TBM 220.42 Ha, TM 1286.44 Ha dan TTM/TTR 57.60 Ha dengan total luas karet 1564.46 Ha. Program intensifikasi di Desa Lubuk Rumbai akan mencakup lahan seluas 1506.86 Ha dan peremajaan akan mencakup lahan seluas 57.60 Ha dengan kebutuhan benih tanaman sekitar 35 ribu polybag. Pada saat ini tingkat kepadatan atau populasi tanaman per Ha di Desa Lubuk Rumbai mencapai rata-rata 529 pohon per Ha (Tabel 54), masih sesuai rekomendasi.

**Tabel 53.** Luas Areal Perkebunan Karet Rakyat di Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 (Ha)

No	Kode	Desa	TBM	TM	TTM/TTR	Jumlah
1	1	AIR BELITI	191.07	929.28	155.89	1276.25
2	2	SUKA MULYA	67.92	277.54	138.64	484.11
3	3	JAYA TUNGGAL	119.33	469.42	143.07	731.83
4	4	REMAYU	103.05	591.43	52.88	747.37
5	5	PETUNANG	151.23	1299.90	119.46	1570.60
6	6	JAYA BAKTI	155.03	1094.00	42.40	1291.43
7	7	DHARMA SAKTI	98.24	577.74	29.72	705.70
8	8	BANPRES	472.55	1682.90	106.43	2261.89
9	9	BAMASKO	228.45	1492.98	74.02	1795.45
10	10	LUBUK RUMBAI	220.42	1286.44	57.60	1564.46
11	11	LEBAN JAYA	7.06	1125.87	26.90	1159.84
	1605072	Tuah Negeri	1814.37	10827.52	947.04	13588.92

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 2015 dan Data Sensus Pertanian 2013 (Diolah)

---

Tabel 54. Jumlah Tegakan dan Populasi Tanaman Per Ha di Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 (Pohon)

No	Kode		TBM	TM	TTM/TTR	Jumlah	Populasi/Ha
1	001	AIR BELITI	98300	491915	76550	666765	526.75
2	002	SUKA MULYA	46250	194450	90110	330810	697.18
3	003	JAYA TUNGGAL	71125	287880	81395	440400	610.25
4	004	REMAYU	44300	261600	21700	327600	440.15
5	005	PETUNANG	62200	550100	46900	659200	421.11
6	006	JAYA BAKTI	79380	576332	20725	676437	524.22
7	007	DHARMA SAKTI	50040	302786	14450	367276	521.51
8	008	BANPRES	250350	917350	53820	1221520	542.42
9	009	BAMASKO	77448	520777	23950	622175	347.10
10	010	LUBUK RUMBIAI	113910	684056	28410	826376	529.13
11	011	LEBAN JAYA	3501	572901	12700	589102	506.35
	1605072	Tuah Negeri	896.804	5.360.147	470.710	6.727.661	497.02

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 2015 dan Data Sensus Pertanian 2013 (Diolah)

Berdasarkan hasil analisis ini maka program intensifikasi yang mencakup peremajaan tanaman, Upaya Pengendalian OPT dan Gangguan Produksi (Banjir Kekeringan) termasuk penanganan panen dan pasca panen akan mencakup desa-desa Lubuk Rumbai dan sekitarnya. Disamping pendataan pemilikan dan penguasaan lahan, upaya sertifikasi lahan penting untuk dilaksanakan di Kecamatan Tuah dan Kecamatan lain di Kabupaten Musi Rawas.

### 6.1.3. Integrasi Tanaman Karet Dengan Tanaman Lain dan Ternak

Pengembangan peremajaan dan rehabilitasi tanaman karet berpotensi untuk integrasi karet dengan tanaman lain dan ternak baik ruminansia besar maupun ruminansia kecil. Pada integrasi tanaman karet dengan tanaman lain, pemanfaatan gawangan karet sampai umur 3 tahun atau menjelang menutupnya tajuk tanaman karet dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan pekebun. Beberapa jenis tanaman sela yang terbukti memberikan keuntungan tanpa merugikan pertumbuhan tanaman karet diantaranya adalah nenas, pisang, jagung, kapulaga, dan padi gogo. Tumpang sari nenas di kebun karet adalah salah satu alternatif terbaik dan dinilai layak untuk dikembangkan secara komersial. Selain nenas, penanaman pisang barang di sela-sela tanaman karet juga dapat memberikan tambahan pendapatan petani di samping meningkatkan konsumsi pisang untuk memberbaiki gizi rumah tangga petani. Tanaman sela toleran naungan

seperti kapulaga dapat tumbuh dan memberikan hasil yang cukup baik dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Potensi integrasi dengan tanaman lain yang bernilai ekonomi tinggi baik berupa sayuran maupun tanaman rempah juga perlu dikaji dalam rangka peningkatan pendapatan petani. Disamping menambah pendapatan, tanaman sela akan menyelamatkan pendapatan rumah tangga petani pada saat harga karet sedang mengalami penurunan.

Karet membutuhkan tanaman pentup lahan dan juga di bawah tanaman karet tersedia rumput sebagai sumber makanan ternak ruminansia. Jika satu hektar kebun karet mampu menyediakan pakan ternak sapi atau kerbau sekitar 2 ekor dari 4 ekor potensi, maka kapasitas tampung ternak ruminansia besar di Kecamatan Tuah Negeri mencapai lebih dari 25 ribu lebih satuan ternak setara sapi. Saat ini populasi sapi dan kerbau di Kecamatan Tuah Negeri masih sekitar 4 ribu ekor setara sapi (sapi 2700 dan kebaru 1300) dan kambing/domba sekitar 1000 ekor setara sapi (kambing 5000 ekor dan domba 300 ekor). Terdapat potensi penambahan populasi ternak 20 ribu ekor setara sapi. Disamping menambah pendapatan dari ternak, potensi libah dari ternak dapat dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Perncontohan model integrasi karet dengan tanaman lain dan ternak diperlukan dalam rangka mempercepat adopsi inovasi tenoknogi ini.

#### **6.1.4. Pengembangan Pemanfaatan Kayu Karet**

Selain produksi getah karet, produksi tanaman sela dan ternak, upaya pemanfaatan kayu karet akan memberikan peluang peningkatan pendapatan petani dan pengembangan industri pengolahan kayu di Kecamatan Tuah Negeri. Selama ini kayu karet dalam bentuk log telah ditampung oleh dua unit industri pengolahan kayu karet yang ada wilayah Palembang. Namun demikian potensi kayu ini dapat diolah menjadi produk industri kecil dan kerajinan rakyat untuk mengembangkan perekonomian wilayah Kabupaten Musi Rawas. Pembinaan dan pelatihan serta percontohan untuk kegiatan ini perlu dilakukan. Produk-produk dari kayu karet ini dapat diarahkan untuk pembuatan mebel, lantai, finger joint dan lain-lain yang mampu dilakukan oleh masyarakat setempat dengan skala kecil dan rumah tangga.

## **6.2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia**

Jumlah rumah tangga usah pertanian karet di Kabupaten Musi Rawas adalah termasuk yang bukan pemilik dan mengusahakan karet (pekerja dan buruh) 62450 rumah tangga. Jumlah rumah tangga di Kecamatan Tuah Negeri adalah 4903 rumah tangga. Rata-rata luas karet yang diusahakan di Kabupaten Musi Rawas adalah 1.64 Ha per Rumah Tangga dan di Kecamatan Tuah Negeri 2.77 Ha per rumah Tangga (Tabel 55).

Tabel 55. Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Karet dan Rata-rata Penguasaan Lahan Karet di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014

No	Kode	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Karet (RT)	Rata-rata Penguasaan Lahan (Ha/RT)
1	030	STL Ulu	4945	1.60
2	031	Selangit	3293	1.64
3	032	Sumber Harta	3552	0.81
4	040	Tugu Mulyo	6062	0.48
5	041	Purwodadi	3319	0.74
6	050	Muara Beliti	2926	1.45
7	051	TPK	1436	2.97
8	060	Jaya Loka	2587	2.70
9	061	Sukakarya	2327	2.04
10	070	Muara Kelingi	6662	1.72
11	071	BTS Ulu	5744	2.02
12	072	Tuah Negeri	4903	2.77
13	080	Muara Lakitan	4932	1.95
14	090	Megang Sakti	9762	1.50
	1605	Musi Rawas	62450	1.64

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 2015 dan Data Sensus Pertanian 2013 (Diolah)

Tabel 56 memuat rincian jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan (RTUP) karet di Kecamatan Tuah Negeri dan rata-rata luas lahan yang diusahakan. Berdasarkan Tabel 6-8, Desa Lubuk Rumbai mempunyai jumlah rumah tangga terbanyak kedua setelah desa Leban Jaya. Rata-rata luas lahan yang diusahakan di Kecamatan Tuah Negeri menurut desa adalah 1.52 Ha per rumah tangga hingga 4.27 Ha per rumah tangga. Desa Leban Jaya memiliki rata-rata pengusahaan paling

---

sempit dan Desa Petuang yang paling luas. Rata-rata luas pengusahaan di Desa Lubuk Rumbai adalah 2.12 ha per rumah tangga.

Tabel 56. Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Karet dan Rata-rata Penguasaan Lahan Karet di Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014

No	Kode	Desa	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Luas Lahan Per Rumah Tangga (Ha/RT)
1	001	AIR BELITI	406	3.13
2	002	SUKA MULYA	191	2.51
3	003	JAYA TUNGGAL	259	2.79
4	004	REMAYU	249	3.00
5	005	PETUNANG	371	4.27
6	006	JAYA BAKTI	441	2.94
7	007	DHARMA SAKTI	373	1.89
8	008	BANPRES	604	3.73
9	009	BAMASKO	509	3.53
10	010	LUBUK RUMBAI	737	2.12
11	011	LEBAN JAYA	763	1.52
	1605072	Tuah Negeri	4903	2.77

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 2015 dan Data Sensus Pertanian 2013 (Diolah)

Secara umum kondisi kebun karet rakyat memiliki jarak tanam dan tidak teratur sehingga kondisi kebun menyerupai hutan, penggunaan bibit non-klon atau bibit karet asalan. Sekapiun menggunakan klon unggul, teknik pembibitan juga tidak sesuai anjuran. Kebanyakan tanaman perkebunan yang ada adalah tanaman yang masih relatif muda dan menghasilkan namun kelihatan tua karena teknik sadap yang tidak sesuai anjuran. Penyadapan yang intensif tanpa disertai dengan asupan pupuk dan pemeliharaan tanaman yang memadai menyebabkan kondisi tanaman cepat menua dan pendek usia produktifnya. Umur tanaman yang seharusnya mencapai 25 – 30 tahun, hanya sampai pada 12 hingga 15 tahun harus diremajakan lagi karena sebab tersebut. Upaya untuk melakukan intensifikasi dan penanaman kembali (*replanting*) masih mengalami persoalan belum ada sumber dana yang tersedia untuk peremajaan. Berdasarkan kondisi ini pemberian percontohan, pelatihan dan pendampingan disertai dengan penyediaan bantuan diperlukan. Pelatihan yang diperlukan mencakup usaha budidaya, manajemen dan perawatan tanaman, penangkaran benih klon unggul, teknik panen dan penanganan pasca panen.

Petani karet di Kecamatan Tuah Negeri masih tegolong usia produktif dan sebagian besar pada kelompok usia 35 hingga 55 tahun. Namun demikian usaha

---

karet bagi kalangan muda semakin menurun. Program pengenalan, pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda sangat diperlukan. Disamping pendidikan bagi generasi muda untuk meningkatkan minat usaha diberbagai bidang usaha karet mulai dari penangkaran, budidaya, pengolahan dan pemasaran serta pemakaian kayu karet untuk berbagai keperluan rumah tangga, hal terpenting dalam pengembangan karet adalah revitalisasi kelompok. Peran kelompok tani dalam pemasaran sangat rendah, termasuk dalam kegiatan yang lainnya. Konsep dan pendekatan kelompok perlu dirubah tidak hanya untuk keperluan pada saat ada kegiatan proyek atau bantuan namun juga kearah pendekatan sebagai penggerak pembangunan termasuk didalamnya pelatihan TOT untuk pengembangan karet pada seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas maupun Provinsi Sumatera Selatan bahkan dalam skala nasional.

Pengembangan kawasan perkebunan karet dalam berbagai bidang memiliki prospek baik dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada usaha karet saat ini mencapai sekitar 14485 atau 52.68% dari jumlah penduduk Tuah Negeri pada tahun 2014. Pada tahun 2020 mendatang dengan dikembangkannya karet mulai dari hulu hingga hilir tingkat serapan tenaga kerja diperkirakan akan meningkat menjadi 21426 orang atau 62.35 persen dari jumlah penduduk di Kecamatan Tuah Negeri. Pengembangan SDM masyarakat dalam berbagai usaha bidang karet akan menggerakkan agribisnis mulai dari hulu hingga hilir

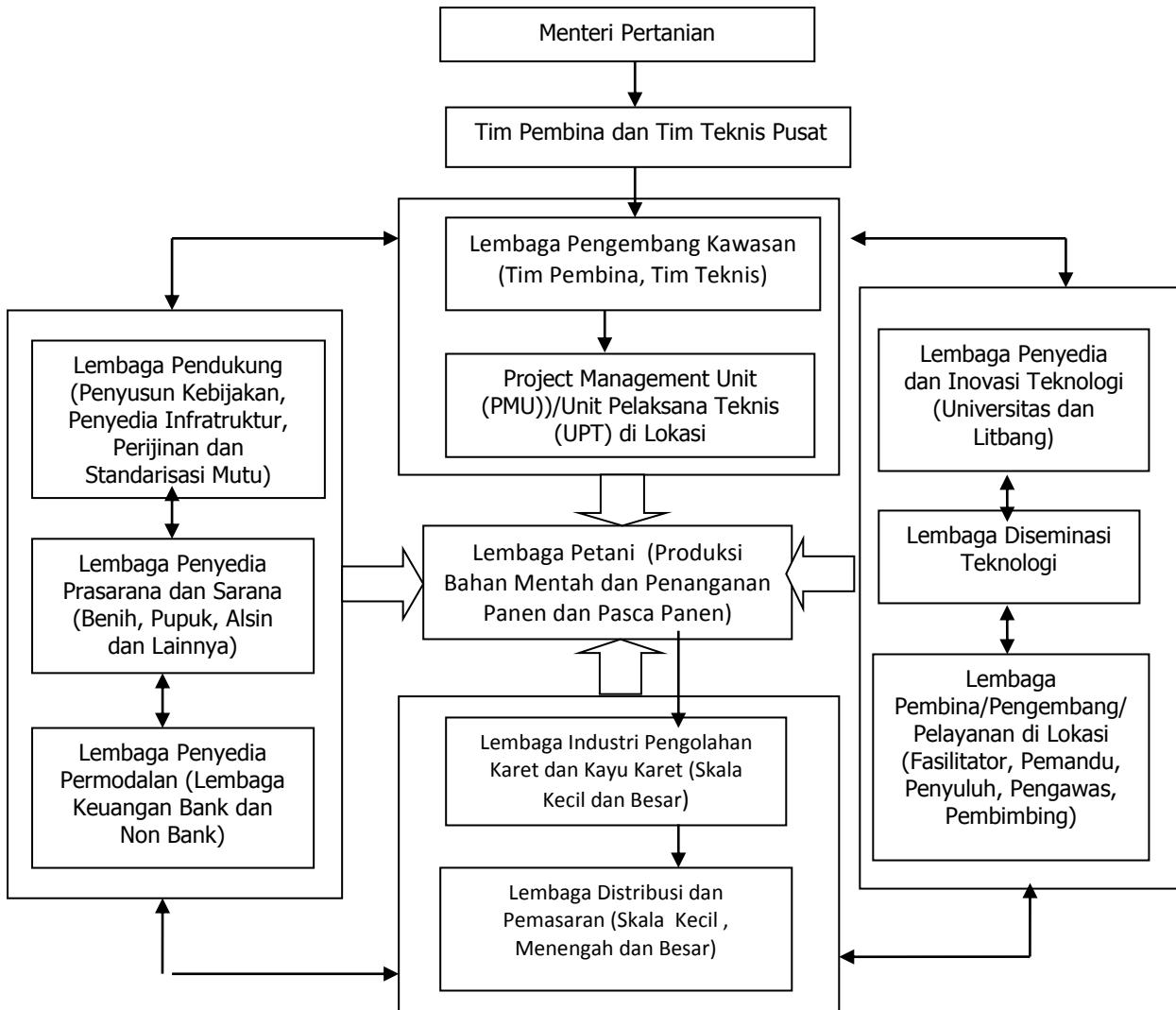
Tabel 57. Perkiraan Pertambahan Serapan Tenaga Kerja Sebagai Akibat Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet (Orang)

No	Kode	Desa	Penyerapan Tenaga Saat ini	Penyerapan Tenaga Kerja Akibat Pengembangan
1	001	AIR BELITI	1218	1624
2	002	SUKA MULYA	764	955
3	003	JAYA TUNGGAL	1036	1295
4	004	REMAYU	747	1245
5	005	PETUNANG	1484	2226
6	006	JAYA BAKTI	882	1764
7	007	DHARMA SAKTI	1119	1865
8	008	BANPRES	1208	2416
9	009	BAMASKO	1527	2036
10	010	LUBUK RUMBAI	2211	2948
11	011	LEBAN JAYA	2289	3052
	1605072	Tuah Negeri	14485	21426

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 2015 dan Data Sensus Pertanian 2013 (Diolah)

### **6.3. Struktur Organisasi dan Kelembagaan Pengembangan Kawasan**

Sesuai dengan Permentan 50/2012 organisasi pengembangan kawasan disusun mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Organisasi baik di tingkat provinsi kabupaten akan terdiri dari dua yaitu Tim Pembina dan Tim Teknis. Gambar 15 menunjukkan arah pengembangan organisasi dan kelembagaan pengembangan kawasan. Lembaga-lembaga yang akan bertindak sebagai Tim Pembina maupun Tim Teknis dan pelaksana kegiatan operasional mulai dari pusat hingga lokasi kawasan disajikan pada Tabel 58.



Gambar 15. Organisasi dan Kelembagaan Pengembangan Kawasan

**Tabel 58. Lembaga-lembaga Yang Akan Bertindak Sebagai Tim Pembina, Tim Teknis dan Pelaksana Operasional di Lokasi Kawasan**

No	Pusat	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas	Lokasi Kawasan
1	Kementerian Pertanian	Dinas Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan Bakorluh BPTP	Dinas Perkebunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan BP4K	UPT Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet  Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Karet
2	Kementerian Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Baristand	Dinas Perindustri dan Perdagangan	PPL dan Tenaga Kontrak Pendamping
3	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM	Pedagang Pengumpul Karet
4	Kementerian Keuangan	Kantor Bea dan Cukai		Pengrajin, IKM Karet dan Kayu Karet
5	Kementerian Kehutanan, Kependudukan, Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	Koperasi dan KUD
6	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	Kantor Kas/Unit Bank
7	Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal			BPR dan BMT
8	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
9	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
10	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Kantor Agraria dan BPN	Kantor Agraria dan BPN	
11	Kementerian Pendidikan Tinggi dan BPPT-LIPI	Balitbangnovda Universitas Sriwijaya		
12	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
13	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
14	Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan	Kantor Bank Indonesia Kantor Bank BUMN, Bank Sumsel dan Swasta	Kantor Bank di Kabupaten	
15	Kementerian BUMN	PTPN VII PT Pusri	Unit PTPN Unit Pergudangan PT PUSRI	
16	Badan Koordinasi Penanaman Modal	BPMD	BPMD	
17	Lembaga Riset Perkebunan Indonesia	Balit Karet Sembawa SPP Sembawa		
18	Kamar Dagang dan Industri	Kadinda Sumsel	Kadinda Musi Rawas	
19	GAPKINDO	Gapindo Sumsel	Perusahaan, Pabrik dan Industri Karet	
20	ASKARINDO	Askarindo Sumsel	Askarindo Musi Rawas	
21	Kemenko Perekonomian	Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api		

Berdasarkan Gambar 15, pada lokasi kawasan yaitu Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri dibentuk UPT Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet. Baik di Tingkat Provinsi akan dibentuk Project Manajemen Unit berupa UPT Provinsi dan UPT di Kabupaten Musi Rawas dan terdapat kantor sekterariat pada masing-masing. Seluruh lembaga yang berada dalam organisasi dan kelembagaan pengembangan mengarahkan dukungan penuh dalam upaya pemberdayaan petani dan lembaga petani (Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani) dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuannya untuk memproduksi BOKAR dan Kayu Karet secara yang memiliki kuantitas dan kualitas kontinyu dan bernilai tambah tinggi.

## **6.4. Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengembangan Kawasan**

### **6.4.1. Prasarana**

Prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan kawasan berbasis komoditas karet adalah terdiri dari: (1) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Peraturan Gubernur dan Bupati atau Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet berikut rencana penganggaran APBD Provinsi dan Kabupaten Kota; (2) Surat Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai Tim Teknis Pengembangan Kawasan dan pengalokasi kantor kesekretariatan dan pengalokasian dan pengelolaan asetnya yang terkait dengannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak; (3) Lahan dan bangunan perkatoran UPT di lokasi berikut show room dan workshop; (3) Jalan usahatani pada lokasi kawasan yang dikembangkan untuk akses kebun petani dan pengangkutan hasil panen karet dan kayu karet, pengangkutan sarana produksi, pengawasan dan monitoring; (4) alat dan mesin untuk penebangan, pengangkutan dan pengolahan lahan petani; (5) alat dan mesin pengolahan kayu karet; (6) alat dan mesin pengolahan hasil panen tanaman pangan; (6) perkandangan ternak, (7) bangunan gudang pupuk dan unit pengolahan pupuk organik berikut alsintan yang dibutuhkan, (8) unit pengolahan pakan ternak; (9) unit kebun penangkaran benih; (10) alat dan mesin penangan panen dan pasca panen untuk meningkatkan kualitas bokar; (11) Prasarana informasi, telekomunikasi, listrik dan air sesuai kebutuhan,

---

(12) Kelembagan petani dan ekonomi yang menangani pengadaan input, pengolahan dan pemasaran hasil baik karet maupun kayu karet baik mentah maupun olahannya; dan (13) penyediaan dan penetapan lahan dan prasarana pada lokasi lokasi model percontohan.

#### **6.4.2. Sarana**

Sarana produksi yang dibutuhkan adalah: (1) Sarana yang dibutuhkan terutama benih karet klon unggul dan entrisnya; (2) benih tanaman sela; (3) pupuk; (4) pestisida; (5) bahan penolong pengolahan getah bokar berkualitas; (6) bahan penolongan pengolahan kayu karet; (6) sarana pemetaan dan penataan kebun petani; (7) alat tulis kantor dan (8) bahan bakar minyak operasional.

### **6.5. Konsumsi, Pengolahan dan Perdagangan Hasil Pengembangan Kawasan**

Di kabupaten Musi Rawas beroperasi 4 unit perusahaan pengolah bokar menjadi crumb rubber. Dari empat perusahaan tersebut telah bekerja sesuai kapasitas terpasang yang dimilikinya oleh karena itu peningkatan produksi memerlukan kerjasama dan kemitraan dari keempat perusahaan tersebut maupun dari perusahaan lain di Provinsi Sumatera Selatan yang secara total masih kekurangan bahan baku sekitar 478 ribu ton. Peningkatan produksi dapat dilakukan melalui program intensifikasi. Berdasarkan data produktivitas karet di Kecamatan Tuah Negeri, produktivitas tertinggi yang dicapai adalah 3.30 ton per Ha yang dicapai di Desa Lubuk Rumbai. Capaian produktivitas tersebut dipakai sebagai patokan produktivitas (produktivitas potensial) yang akan dicapai dalam rangka intensifikasi. Namun demikian secara realitas desa-desa lain tidak akan cepat mampu untuk mencapai produktivitas tersebut sehingga diperkirakan hanya 50 persen dari perbedaan atau senjang antara produktivitas aktual dengan produktivitas potensial tersebut. Tabel 59. memuat rincian peluang peningkatan produktivitas dari pembinaan pengembangan kawasan perkebunan berbasis karet di Kecamatan Tuah Negeri yang menunjukkan bahwa program intensifikasi akan memberikan

peningkatan produktivitas sekitar 21.21 persen dibanding produktivitas aktual yang dicapai pada saat ini.

Tabel 59. Peluang Peningkatan Produktivitas dari Program Intensifikasi di Kecamatan Tuah Negeri

No	Kode	Desa	Produktivitas Aktual (Ton/Ha)	Produktivitas Potensial (Ton/Ha)	Senjang Produktivitas (Ton/Ha)	Peluang Peningkatan 50 % Senjang (%)
1	001	AIR BELITI	1.90	3.30	1.40	21.21
2	002	SUKA MULYA	1.60	3.30	1.70	25.76
3	003	JAYA TUNGGAL	2.60	3.30	0.70	10.61
4	004	REMAYU	1.70	3.30	1.60	24.24
5	005	PETUNANG	2.20	3.30	1.10	16.67
6	006	JAYA LOKA	1.80	3.30	1.50	22.73
7	007	DHARMA SAKTI	2.40	3.30	0.90	13.64
8	008	BANPRES	1.20	3.30	2.10	31.82
9	009	BAMASKO	1.20	3.30	2.10	31.82
10	010	LUBUK RUMBIAI	3.30	3.30	0.00	0.00
11	011	LEBAN JAYA	1.24	3.30	2.06	31.21
	1605072	Tuah Negeri	1.90	3.30	1.40	21.21

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan (2015), diolah

Hasil akhir dari peningkatan produktivitas adalah peningkat produksi. Tabel 60 menunjukkan bahwa program intensifikasi akan meningkatkan produksi sekitar 4380 ton atau menjadi 22116 Ton dari produktivitas saat ini sekitar 17737 Ton. Peningkatan nilai tambah selain peningkatan produktivitas adalah upaya peningkatan mutu hasil karet, pemanfaatan kayu karet dan integrasi tanaman dan ternak. Desa Lubuk Rumbai yang telah mencapai rata-rata produktivitas 3.30 ton per Ha dinilai tidak akan mengalami peningkatan produktivitas dari sisi intensifikasi. Program intensifikasi akan berpengaruh pada umur tanaman mengasilkan dari rata-rata semula sekitar 15 tahun menjadi lebih panjang hingga mendekati umur karet standar 25 – 30 tahun. Upaya peningkatan produksi hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan program peremajaan dan perluasan areal. Peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani hanya dapat dilakukan melalui integrasi tanaman dan ternak dan pemanfaatan kayu karet yang sudah tua dari kegiatan peremajaan tanaman. Disamping itu peningkatan nilai tambah juga dapat dilakukan melalui perbaikan dan perluasan pemasaran hasil, kegiatan penangkaran benih dan peringkatan kualitas SDM yang disertai dengan revitalisasi kelompok tani. Pada desa lainnya kegiatan yang akan menambah hasil dan pendapatan adalah Perbaikan

Budidaya, Peningkatan Mutu Hasil Panen, Peremajaan Tanaman, Pemanfaatan Kayu Karet, Pengembangan SDM Petani, Revitalisasi Kelompok Tani dan perbaikan dan perluasan pemasaran hasil.

Tabel 60. Peluang Peningkatan Produksi dari Program Intensifikasi di Kecamatan Tuah Negeri

No	Kode	Desa	Produksi Saat Ini (Ton)	Peluang Peningkatan Capaian 50% dari senjang (Ton)	Produksi Setelah Intensifikasi (Ton)
1	001	AIR BELITI	992	365	1357
2	002	SUKA MULYA	560	298	858
3	003	JAYA TUNGGAL	3692	497	4189
4	004	REMAYU	1413	665	2078
5	005	PETUNANG	2431	608	3039
6	006	JAYA LOKA	540	225	765
7	007	DHARMA SAKTI	540	101	641
8	008	BANPRES	433	379	812
9	009	BAMASKO	660	578	1238
10	010	LUBUK RUMBIAI	5676	0	5676
11	011	LEBAN JAYA	800	664	1464
	1605072	Tuah Negeri	17737	4380	22116

Program dan kegiatan pengembangan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pemenuhan kebutuhan anggaran bersumber dari APBN Pusat, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Kemitraan dan CSR dari Perusahaan, Dana Pinjaman dari Kredit Bank dan dana swadaya petani. Khusus mengenai dana pinjaman kredit bank membutuhkan jaminan, oleh karenanya disamping program tersebut juga diperlukan program sertifikasi lahan yang dapat dijadikan agunan untuk jaminan pinjaman ke lembangan keuangan atau Bank.

## **6.6. Ekonomi dan Perekonomian Pengembangan Kawasan**

Pengembangan kawasan menghadapi berbagai kendala yang harus dipecahkan. Kendala tersebut diantara masalah industri hilir karet dan masalah produk karet. Pada industri hilir karet masalah yang dihadapi adalah : (1) Masih lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dan industri kecil menengah; (2) Belum terbangunnya struktur klaster (industrial cluster) yang saling mendukung; (3) Ketergantungan ekspor produk setengah jadi; (4) Terbatasnya informasi terutama bagi industri kecil dan menengah dan (5) Motivasi dan kemampuan wirausaha masih rendah.

Produk karet juga memiliki permasalahan yang harus di pecahkan diantara : (1) Kurangnya informasi distribusi dan kebutuhan karet alami sebagai bahan baku industri produk karet; (2) Masih adanya diskriminasi pembebasan PPN 10%; (3) Masih kurangnya dukungan penelitian dan pengembangan yang difokuskan pada pengembangan produk karet; (4) Sulitnya pasokan gas untuk industri sarung tangan yang menyebabkan utilitas kapasitas industri sarung tangan hanya mencapai 40%; (5) Masih dikenakannya BMAD carbon black sebesar 10-17%; (6) Ketatnya persaingan didalam negeri (dengan produk import ) dan dinegara tujuan eksport ; (7) Masih tingginya import sebagian barang-barang karet yang merupakan peluang pengembangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 94/M-Ind/Per/8/2010 Tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan, program utama pengembangan industri karet di Sumatera Selatan hilisasi industri karet alam. Program ini memiliki Sasaran Jangka Panjang (2015-2025) pengembangan industri karet: (a). Berkembangnya kapasitas industri *compound*; (b). Meningkatnya kapasitas industri vulkanisir; (c). Berkembangnya industri barang karet untuk rumah tangga, alat kesehatan dan komponen otomotif; dan (d) Meningkatnya laju pertumbuhan ekspor sekitar 14% per tahun. Strategi pengembangan yang diterapkan adalah (a). Peningkatan pemanfaatan karet alam; dan (b) Peningkatan penguasaan teknologi industri barang karet; dengan pokok rencana aksi jangka panjang : (a). Membangun industri hilir berbasis bahan baku karet; (b). Mengembangkan ristek industri barang jadi karet; dan (c). Meningkatkan komoditi ekspor barang jadi karet.

Sementara itu kegiatan penunjang yang dilakukan adalah : (1) **Pasar : (a)** Memperluas jaringan pemasaran termasuk ekspor; (b). Pemenuhan standar internasional dan nasional untuk memperkuat akses pasar; dan (c). Menggalakkan gerakan penggunaan dan cinta produk dalam negeri; (2) **Kelembagaan :** Pembentukan dan penguatan kelembagaan industri barang karet; (3) **Sumberdaya Manusia :** (a). Peningkatan keahlian dan kemampuan petani dan pelaku industri barang karet; dan (b). Pelatihan Manajemen Mutu; (4) **Infrastruktur :** (a). Memfasilitasi pengembangan kawasan industri; (b).

---

Peningkatan peran litbang dan *network* antar litbang daerah dan pusat dalam kerangka sistem inovasi daerah yang terintegrasi dengan sistem inovasi nasional; (c). Membangun fasilitasi pelabuhan yang memadai; dan (d). Penyediaan listrik dan energi murah bagi pengembangan industri.

Pada periode ini pengembangan industri pendukung adalah : industri *crumb rubber*, industri logam dan mesin, industri kimia karet, industri karet sintetis, industri pestisida. Sedangkan industri terkainya adalah : Industri komponen kendaraan, industri alat kesehatan, industri ban kendaraan, alat olah raga, sarung tangan karet, mainan anak-anak, *belt conveyor*, huller, *rice huller*, alas kaki, meubel, karet gelang, karet busa, serabut berkaret, benang karet. Pengembangan diarahkan pada lokasi : Kab. Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kota Prabumulih, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Lahat, Kab. Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau, **Kab. Musi Rawas.**

Hilirisasi mindustri karet memiliki permasalahan diantaranya : (1) Produk *crumb rubber* lebih dominan dieksport (lebih dari 80 %) dan hanya sebagian kecil yang diserap dalam negeri kurang dari 20 %; (2) masih tingginya impor sebagian barang-barang karet dan bahan penolong industri karet yang merupakan peluang pengembangan; (3) Masih rendahnya daya saing Industri karet hilir di pasar Asia. Berdasarkan potensi yang ada masalah ini dapat dipecahkan melalui: (1) Pengembangan klaster industri hilir karet di dekat lokasi Kawasan Perkebunan dan sumber bahan baku; (2) Pengembangan infrastruktur (seperti : jalan, pelabuhan) di lokasi pengembangan; (3) Peningkatan kemampuan SDM dan (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI BOKAR.

Berdasarkan informasi di atas pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet memiliki dukungan kebijakan dari Kementerian Perindustrian. Pengembangan kegiatan pada lokasi kawasan dapat langsung dikaitan dengan program dari Kementerian Perindustrian tersebut. Pengembangan Kawasan Perkebunan berbasis komoditas karet memiliki keterkaitan erat pula dengan rencana pengembangan Pusat Pertumbuhan Tanjung Api-Api (Kawasan Ekonomi Khusus) dan Muara Enim Sumatera Selatan dengan basis komoditi Industri Hilir karet dan

---

Batubara. Berkaitan dengan program ini disamping menempatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Tim Pengembangan Kawasan juga perlu dilakukan road show dan promosi pada berbagai lembaga terkait di Pusat dan perencanaan kegiatan pengembangan kawasan pada kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan yang diawali dari kegiatan penyusunan masterplan dan rencana aksi.

## **6.7. Analisis Kebutuhan Teknis dan Teknologi Pengembangan Kawasan Pertanian**

Selain upaya penyediaan dan menghadirkan atau memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana, penyediaan informasi pasar dan permodalan dan teknologi sangat dibutuhkan. Teknik dan teknologi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan kawasan sangat perlu didukung oleh sistem infomasi dan manajemen pada pusat pengembangan informasi dan pengembangan karet. Pembentukan Lembaga Pusat Informasi dan Pengembangan Kawasan Karet dan Sistem Manajemen Informasi merupakan yang sangat penting. Disamping itu sertifikasi mutu membutuhkan laboratorium mutu dan hal ini dapat menggunakan laboratorium dari Balit Karet Sembawa maupun Universitas Sriwijaya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Baristand dan laboratorium milik PTPN atau perusahaan yang memiliki laboratorium. Peningkatan mutu dan produktivitas membutuhkan rekomendasi paket teknologi yang juga dapat disediakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Penelitian mengenai uji kandungan unsur hara untuk rekomendasi penggunaan pupuk berimbang, manajemen pengendalian OPT, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan adopsi pengembangan inovasi teknologi juga penting untuk dilakukan dan dapat memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut untuk bermitra dan bekerjasama dalam pengembangan kawasan.

## **6.8. Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pendukung Pengembangan Kawasan**

Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet membutuhkan tenaga-tenaga yang tidak dapat dipenuhi dari Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten. Tambahan tenaga selain dari Tim Pembina dan Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan Bupati, Pengembangan Pusat Informasi, Pengembangan Sistem dan Manajemen dan pendirian project management unit atau UPT membutuhkan tambahan dukungan tenaga baik dari Pusat yang ditempatkan di Provinsi maupun Kabupaten dan tenaga-tenaga tambahan lainnya seperti Pemandu Lapangan, Petugas Sertifikasi, Petugas Pengendalian OPT dan lain-lain yang mencakup kegiatan budidaya tanaman perkebunan, pangan dan ternak, pengolahan dan pemasaran, dsan staf administrasi, sistem informatika dan management data base, keuangan dan personalia.

## **6.9. Kebijakan Dan Kebutuhan Dukungan Peraturan Pendukung Pengembangan Kawasan**

Disamping Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Peraturan Gubernur dan Bupati atau Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet berikut rencana penganggaran APBD Provinsi dan Kabupaten Kota; dan Surat Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai Tim Teknis Pengembangan Kawasan dan pengalokasi kantor kesekretariatan dan pengalokasian dan pengelolaan asetnya yang terkait dengannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak, kebijakan dan peraturan pendukung yang dibutuhkan diantaranya adalah upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investasi, pemberian sertifikasi lahan, bibit mutu, kebun dan hasil olahan dengan biaya ringan dan prosedur mudah, jaminan kemudahan dalam peroleh kredit dan kemudahan dalam ekspor dan pemasaran hasil.

## **6.10. Manajemen Budidaya dan Pengembangan**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet dilakukan secara bertahap. Adapun pentahapannya adalah sebagai berikut :

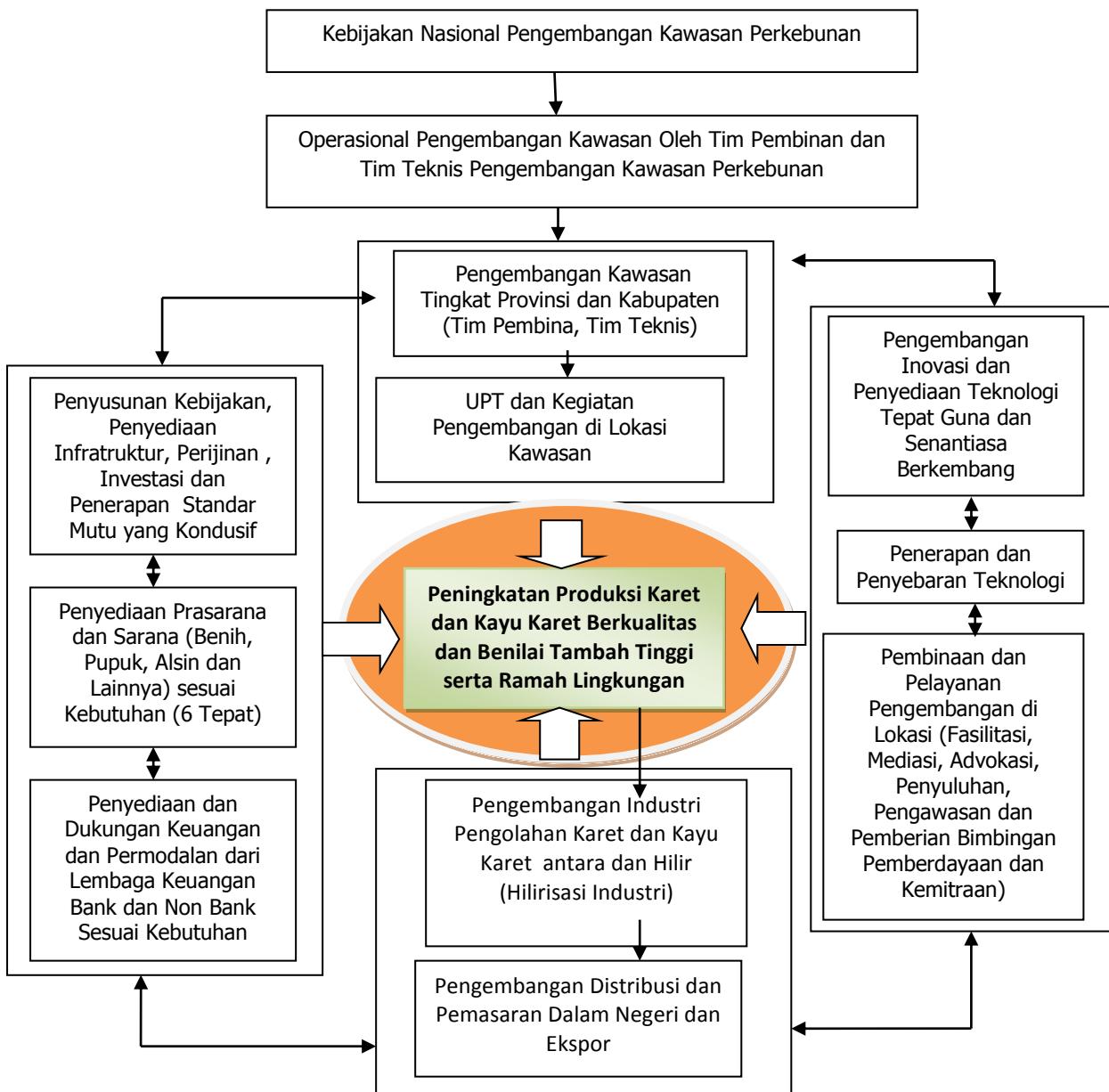
1. Penyempurnaan Masterplan dan Penyusunan Rencana Aksi, yang dilakukan bersamaan dengan penyelesaian Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Peraturan Gubernur dan Bupati atau Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet berikut rencana penganggaran APBD Provinsi dan Kabupaten Kota; dan Surat Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai Tim Teknis Pengembangan Kawasan dan pengalokasi kantor kesekretariatan dan pengalokasian dan pengelolaan asetnya yang terkait dengannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak, kebijakan dan peraturan pendukung yang dibutuhkan diantaranya adalah upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investasi, pemberian sertifikasi lahan, bibit mutu, kebun dan hasil olahan dengan biaya ringan dan prosedur mudah, jaminan kemudahan dalam peroleh kredit dan kemudahan dalam ekspor dan pemasaran hasil (2016)
  2. Persiapan Operasional Perkantoran, Kesekretariatan dan Perekutan Kebutuhan SDM Pendukung Kawasan (2016 – 2019)
  3. Pelaksanaan Model Integrasi Tanaman dan Ternak dan Persiapan Pelatihan Industri Kayu Karet dan Peningkatan Mutu Hasil Panen (2016)
  4. Operasional Kegiatan Pengembangan Kawasan Tahun 1 dan Penyusunan Masterplan dan Rencana Aksi Kabupaten Berikutnya (2017)
  5. Pengembangan Kawasan Tahun 2, Perluasan kawasan di Kecamatan Tuah Negeri dan Persiapan Pengembangan Kawasan Kabupaten Lainnya (2018)
  6. Pengembangan Kawasan Tahun 3, dan Perluasan Pengembangan di Kecamatan Lain di Kabupaten Musi Rawas dan Pengembangan Kawasan Kabupaten lainnya Tahun 1 (2019)
  7. Finalisasi Pengembangan Kawasan Kabupaten Musi Rawas dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Kabupaten Lain Tahun 2 (2020)
-

## **6.11. Pelaku dan Peran Pemangku Kepentingan**

Pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet melibatkan berbagai instansi dari pusat hingga daerah. Berdasarkan pada Gambar 15 dan Tabel 56, pelaku dan peran pemangku kepentingan disajikan pada Gambar 16. Mengacu pada Gambar 16 keterkaitan dan sinkronisasi antar lembaga, program dan kegiatan sangat penting dalam pengembangan kawasan perkebunan berbasis karet.

Seluruh lembaga yang berada dalam organisasi dan kelembagaan pengembangan perlu mengarahkan dukungan penuh dalam upaya pemberdayaan petani dan lembaga petani (Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani) dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuannya untuk memproduksi BOKAR dan Kayu Karet secara yang memiliki kuantitas dan kualitas kontinyu dan bernilai tambah tinggi.

Keberhasilan pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet memerlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kepentingan. Diperlukan koordinasi dan konsolidasi bersama-sama antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan peningkatkan pasokan karet untuk industri dan ekspor, mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah baik pusat maupun daerah, peranan swasta juga sangat diperlukan. Jika masing-masing pihak ini dapat saling mendukung dan selaras dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka pengembangan kawasan karet dapat terwujud dengan baik.



Gambar 16. Peran Pemangku Kepentingan Berdasarkan Pelaku dan Pemangku Kepentingan Gambar 15 dan Tabel 56.

## **6.12. Analisis Model dan Detil Desain Rencana Pengembangan Kawasan**

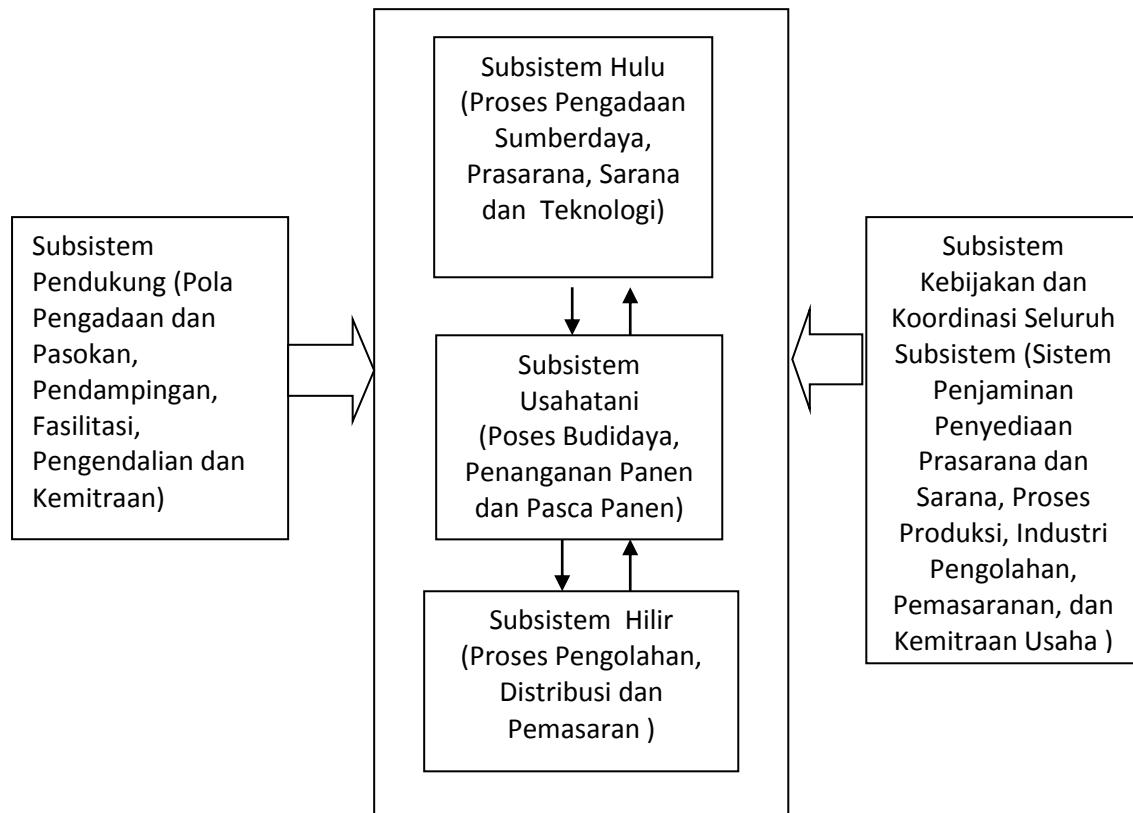
### **6.12.1. Pilihan dan Penetapan Model**

Berdasarkan hasil analisis sub – sub bab sebelumnya pilihan model yang ditetapkan adalah kawasan terintegrasi secara vertikal dan horisontal. Model integrasi vertikal ditunjukkan dengan upaya untuk mengembangkan produksi BOKAR berkualitas dimana penanganan panen dan pasca panen dilakukan di level petani dengan program peremajaan dan rehabilitasi kebun karet menggunakan benih bermutu tinggi. Petani yang dberdayakan melalui kelompok di mitrakan dengan perusahaan-perusahaan karet yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Pengembangan karet dilakukan dalam rangka mendukung program hilirisasi industri karet dan pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Tanjung Api-Api. Integrasi vertikal juga ditunjukkan dengan upaya pemanfaatan kayu karet dimana dalam skala besar dimitrakan dengan perusahaan pengolah kayu karet dan dalam skala industri kecil di lakukan pembinaan pengolahan kayu karet di lokasi kawasan. Integrasi horisontal diupayakan melalui pengembangan tanaman sela dan budidaya ternak. Integrasi juga mengarahkan upaya untuk mengembangkan keterpaduan antar pelaku dan pemangku kepentingan. Kerangka konsep model pengembangan kawasan disajikan pada Gambar 17.

Berdasarkan Gambar 17, pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet dirancang sesuai sistem agribisnis. Pada subsistem hulu pengadaan sumberdaya prarasana (jalan, irigasi dan lainnya) dan sarana produksi (pupuk, benih dan lainnya), permodalan, informasi pasar dan teknologi dihadirkan hingga lokasi kawasan. Proses ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi melalui kapasitas petani dan kelembagaan di lokasi kawasan. Pada subsistem budidaya yang dikembangkan adalah proses budidaya yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi dengan upaya peningkatan produktivitas dan mutu hasil. Pengelolaan usaha tani diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan mutu hasil dan diversifikasi usaha serta kontinuitas produksi dan ramah lingkungan. Pada subsistem pengolahan dan pemasaran diarahkan pembinaannya untuk peningkatan produksi berkualitas tinggi,

---

efisien, mendukung hilirasi industri karet dan peningkatan ekspor dengan sistem distribusi yang lancar.



Gambar 17. Kerangka Model Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet Provinsi Sumatera Selatan

Pengembangan membutuhkan dukungan berupa pengembangan pola pengadaan dan pemasokan sumberdaya prasarana dan sarana, modal, teknologi dan informasi pasar yang mendukung. Pola fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan manajemen usaha baik pada level usaha input, usahatani, pengolahan dan pemasaran yang didukung oleh pola pengendalian dan penjaminan mutu, serta proses hubungan timbal balik merupakan kegiatan penting. Untuk berjalannya hal tersebut pola kemitraan yang tepat menjadi suatu kebutuhan. Pola ini mengarahkan adanya kerjasama lintas sektoral dalam pemerintahan dan antara pelaku agribisnis mulai dari hulu dan hilir baik petani, swasta maupun masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, penuh dedikasi dan bertanggungjawab sesuai tupoksinya masing-masing.

Secara keseluruhan pengembangan mulai dari subsistem hulu hingga hilir dan pendukung tersebut membutuhkan kebijakan dan koordinasi antar subsistem. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh adanya subsistem kebijakan yang berperan aktif untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kebijakan ini merupakan tanggungjawab instansi pemerintah yang didukung oleh pelaku usaha gribisnis lainnya baik petani, swasta maupun masyarakat untuk menciptakan kebijakan sistem penjaminan (kebijakan dan implementasi) dalam penyediaan prasarana dan sarana, proses produksi, proses industri atau pengolahan hasil, dan pemasaran sesuai kebutuhan dan standar prosedur operasional baku. Sebuah penjaminan untuk pola kemitraan usaha yang kondusif juga sangat dibutuhkan. Dalam rangka mencapai keberhasilan rancang bangun model ini harus dilakukan secara bertahap mulai dari skala luasan dan cakupan wilayah yang relatif kecil hingga menjadi masif dan menyebar keseluruh wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan perkebunan berbasis karet di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **6.12.2. Pilihan Komoditas dan Produk Akhir**

Komoditas utama yang dikembangkan adalah karet dengan produk akhir yang akan dihasilkan pada lokasi kawasan budidaya adalah BOKAR berkualitas tinggi dan pada industri yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah produk karet antara (Crumb Rubber dan lainnya) untuk mendukung hilirasi industri karet yang akan menghasilkan produk akhir industri karet siap konsumsi sebagai produk utama. Sebagai produk samping pertamanya adalah kayu karet olahan hasil industri skala kecil dan menengah, produk samping keduanya adalah benih karet berkualitas tinggi yang dapat dipasarkan ke luar daerah dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet di wilayah Provinsi Sumatera Selatan maupun secara nasional.

#### **6.12.3. Pengembangan Sumberdaya Prasarana (Infrastruktur)**

Infrastruktur yang akan dikembangkan terdiri dari infrastruktur fisik dan non fisik. Infrastruktur fisik diantaranya terdiri dari : (1) Lahan dan bangunan perkatoran UPT di lokasi berikut show room dan worhshop; (2) Jalan usahatani pada lokasi

---

kawasan yang dikembangkan untuk akses kebun petani dan pengangkutan hasil panen karet dan kayu karet, pengangkutan sarana produksi, pengawasan dan monitoring; (3) alat dan mesin untuk penebangan, pengangkutan dan pengolahan lahan petani; (4) alat dan mesin pengolahan kayu karet; (5) alat dan mesin pengolahan hasil panen tanaman pangan; (6) unit perkandangan ternak percontohan, (7) bangunan gudang pupuk dan unit pengolahan pupuk organik berikut alsintan yang dibutuhkan; (8) unit pengolahan pakan ternak percontohan; (9) unit kebun penangkaran benih; (10) alat dan mesin penangan panen dan pasca panen untuk meningkatkan kualitas BOKAR; (11) Prasarana informasi, telekomunikasi, listrik dan air sesuai kebutuhan; (12) penyediaan dan penetapan lahan dan prasarana pada lokasi lokasi model percontohan; (13) Fasilitasi pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khsusus; (14). Fasilitasi pembangunan jaringan transportasi dan pelabuhan yang memadai; dan (15). Penyediaan listrik dan energi murah bagi pengembangan industri.

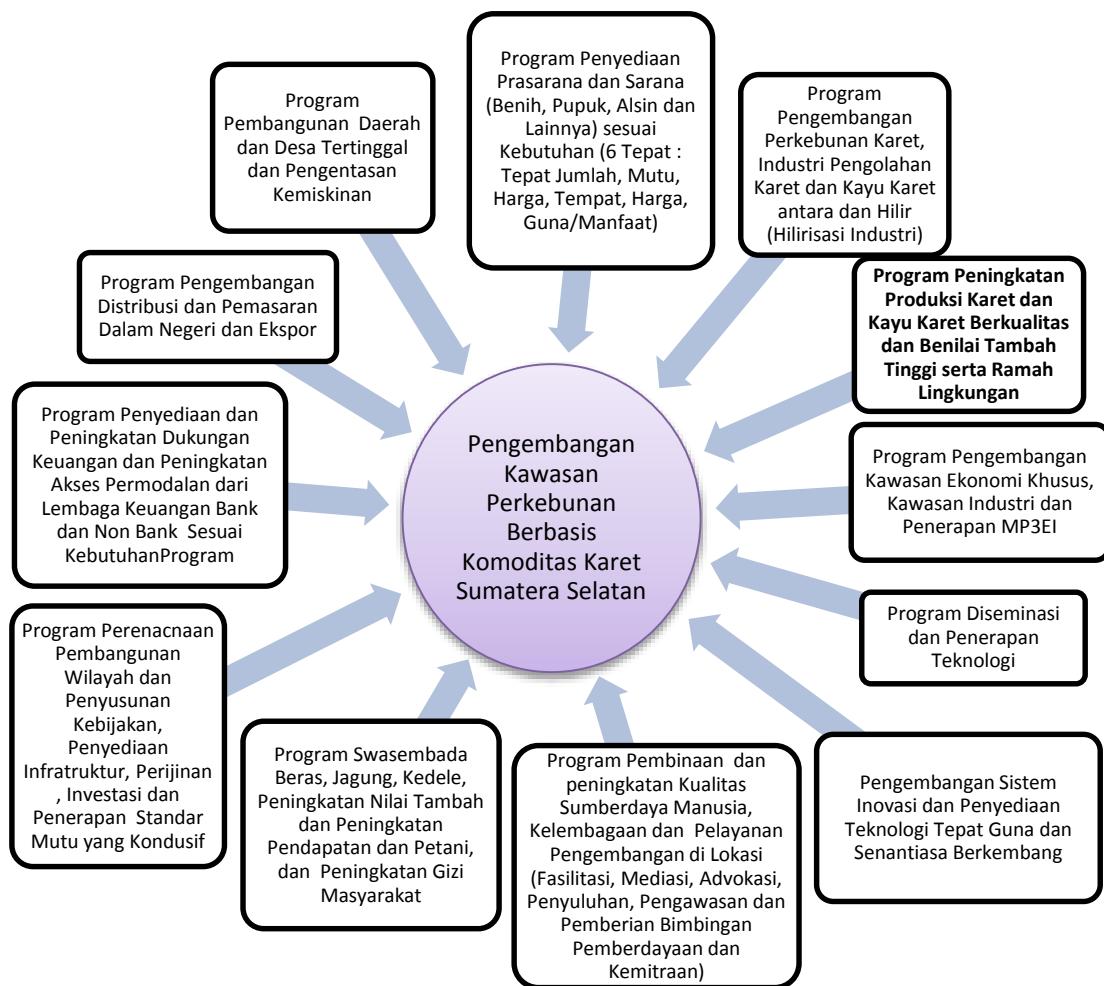
Sementara itu infrastruktur non fisik yang akan dikembangkan diantaranya adalah : (1) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Peraturan Gubernur dan Bupati atau Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet berikut rencana penganggaran APBD Provinsi dan Kabupaten Kota; (2) Surat Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai Tim Teknis Pengembangan Kawasan dan pengalokasi kantor kesekretariatan dan pengalokasian dan pengelolaan asetnya yang terkait dengannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak; (3) Kebijakan dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investasi, pemberian sertifikasi lahan, bibit mutu, kebun dan hasil olahan dengan biaya ringan dan prosedur mudah, jaminan kemudahan dalam peroleh kredit dan kemudahan dalam ekspor dan pemasaran hasil.

#### **6.12.4. Keterkaitan Antar Progam dan Antar Kawasan**

Keberhasilan pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet memerlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kepentingan. Atas dasar hal ini maka terdapat keterkaitan antara berbagai program dalam pembangunan dari berbagai instansi dan lembaga baik

---

pada tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Jika masing-masing pihak ini dapat saling mendukung dan selaras dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka pengembangan kawasan karet dapat terwujud dengan baik. Keterkaitan antar program dan antar kawasan disajikan pada Gambar 18.



Gambar 18. Keterkaitan Antar Program dan Antar Kawasan Dalam Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet

#### **6.12.5. Pengembangan Pasar dan Perdagangan**

Dalam rangka pengembangan pasar dan perdagangan membutuhkan upaya untuk : (1) Memperluas jaringan pemasaran termasuk ekspor; (2). Pemenuhan standar internasional dan nasional untuk memperkuat akses pasar; dan (3).

Menggalakkan gerakan penggunaan dan cinta produk dalam negeri; (4) Pendirian Kelembagaan yang bertindak sebagai Pusat Informasi dan Promosi karet.

#### **6.12.6. Pengembangan dan Penyediaan Sarana Produksi, Bahan Baku dan Bahan Penolong**

Dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu, maka sarana produksi yang dibutuhkan adalah: (1) Sarana yang dibutuhkan terutama benih karet klon unggul dan entrisnya; (2) benih tanaman sela; (3) pupuk; (4) pestisida; (5) bahan penolong pengolahan getah bokar berkualitas; (6) bahan penolong pengolahan kayu karet; (6) sarana pemetaan dan penataan kebun petani; (7) alat tulis kantor dan (8) bahan bakar minyak operasional.

#### **6.12.7. Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia**

Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet membutuhkan tenaga-tenaga yang tidak dapat dipenuhi hanya dari Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten sehingga memerlukan : (1) Penambahan tenaga operasional dan pendukungan pengembangan kawasan baik dari Pusat yang ditempatkan di Provinsi maupun Kabupaten dan tenaga-tenaga tambahan lainnya seperti Pemandu Lapangan, Petugas Sertifikasi, Petugas Pengendalian OPT dan lain-lain yang mencakup kegiatan budidaya tanaman perkebunan, pangan dan ternak, pengolahan dan pemasaran, dsan staf administrasi, sistem informatika dan management data base, keuangan dan personalia; (2) Pengembangan Kelembagan petani dan ekonomi yang menangani pengadaan input, pengolahan dan pemasaran hasil baik karet maupun kayu karet baik mentah maupun olahannya; (3) Pembentukan dan penguatan kelembagaan industri barang karet; (4) Peningkatan keahlian dan kemampuan petani dan pelaku industri barang karet; (5) Pelatihan Manajemen Mutu; (6) Pelatihan pengembangan majamenen dan pengendalian kemitraan usaha; (7) Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis serta organisasi UPT Kawasan Karet.

### **6.12.8. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Dalam rangka pengembangan kawasan pengembangan kawasan maka : (1) peningkatan peran litbang dan *network* antar litbang daerah dan pusat dalam kerangka sistem inovasi daerah yang terintegrasi dengan sistem inovasi nasional sangat perlu dilakukan; (2) hal tersebut harus didukung pula oleh sistem infomasi dan manajemen pada pusat pengembangan informasi dan pengembangan karet; (3) pembentukan Lembaga Pusat Informasi dan Pengembangan Kawasan Karet dan Sistem Manajemen Informasi merupakan yang sangat penting; (4) Fasilitasi dan pemanfaataan laboratorium dari Balit Karet Sembawa maupun Universitas Sriwijaya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Baristand dan laboratorium milik PTPN atau perusahaan yang memiliki laboratorium dalam rangka implemetasi sistem manajemen mutu; (5) penelitian mengenai uji kandungan unsur hara untuk rekomendasi penggunaan pupuk berimbang dan manajemen pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim; (6) Penelitian untuk pengembangan kualitas dan diversifikasi produk dan peningkatan adopsi teknologi, serta pengembangan inovasi teknologi produk yang mencakup produk hulu hingga hilir.

### **6.12.9. Pengembangan Pembiayaan**

Pengembangan kawasan berbasis komoditas karet di Provinsi Sumatera Selatan memerlukan koordinasi dan konsolidasi bersama-sama antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan peningkatkan pasokan karet untuk industri dan ekspor, mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah baik pusat maupun daerah, peranan swasta juga sangat diperlukan.

Pembiayaan dari pemerintah bersumber dari APBN baik Kementerian maupun dari kementerian dan lembaga lainnya, APBD Provinsi dan Kabupaten. Dana dari pemerintah bersifat pengungkit, dan sifatnya terbatas sehingga dana swadaya petani dan swasta memiliki porsi yang diharapkan jauh lebih besar. Bagi kegiatan yang membutuhkan perangkat aturan pendukung dengan skala besar, aspek pembiayaan dibebankan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Swasta. Pembebaran pembiayaan berupa tanggung jawab masing-masing ataupun

---

melalui kerjasama. Sebaliknya bagi kegiatan berskala kecil dan tidak membutuhkan anggaran besar, maka petani dapat melaksanakannya secara swadaya. Disamping melalui anggaran, dalam rangka pembiayaan pengembangan kawasan fasilitasi dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan kredit program juga dilakukan. Hal ini penting untuk mendorong kemampuan petani dan swasta dalam meningkatkan investasi dan adopsi teknologi. Berdasarkan uraian di atas maka sumber pendanaan untuk pengembangan kawasan perkebunan berbasis karet berasal dari : (1) Dana pemerintah baik APBN maupun APBD; (2) Kredit perbankan; (3) Hasil pemanfaatan dan penjualan kayu karet; (4) Swasta dan GAPKINDO; (5) Swadaya petani.

## BAB VII      ROADMAP      DAN      RENCANA      AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN

### 7.1. Strategi Pengembangan

Strategi yang ditempuh dalam pengembangan kawasan perkebunan berbasis karet adalah pengutuhan dan penguatan sistem agribisnis karet. Pengutuhan dimaksudkan agar seluruh komponen subsistem dalam sistem agribisnis ketersediaannya lengkap di lokasi kawasan. Penguatan dimaksudkan agar komponen-komponen dalam subsistem agribisnis diperkuat atau ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu mendorong pertumbuhan kawasan agribisnis. Melalui pengutuhan dan penguatan ini, maka secara keseluruhan sistem agribisnis dapat berjalan dengan terpadu dalam pengembangan kawasan. Pengutuhan dan penguatan dilakukan dalam rangka : (1) Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas karet yang dikembangkan; (2) Meningkatkan aktivitas pasca panen dan kualitas produk karet; (3) Meningkatkan aktivitas pengolahan dan nilai tambah produk karet dan kayu karet; (4) Meningkatkan jaringan pemasaran komoditas komoditas karet dan kayu karet; (5) Meningkatkan pendapatan pelaku usaha komoditas karet; (6) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha dibidang agribisnis dan agroindustri karet; (7) Meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan, pasar input dan *output*, teknologi dan informasi agribisnis karet.

Upaya yang ditempuh adalah meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan karet di tingkat *on-farm* melalui : (1) Penggunaan klon unggul penghasil lateks dan kayu yang mempunyai produktivitas lateks potensial lebih dari 3000 kg/ha/th, dan menghasilkan produktivitas kayu karet lebih dari 300 m<sup>3</sup>/ha/siklus; (2) Percepatan peremajaan karet tua dan tidak produktif terutama pada perkebunan karet rakyat; (3) Diversifikasi usahatani karet melalui integrasi dengan tanaman pangan dan ternak untuk peningkatan pendapatan keluarga tani; (4) Peningkatan efisiensi usaha pada setiap tahap proses produksi untuk menjamin marjin keuntungan dan daya saing yang tinggi; (5) Fasilitasi, mediasi, pendidikan, pelatihan

dam pendampingan dalam penangkaran benih/bibit, teknik budidaya dan panen, pemasaran, kelembagaan dan kemitraan usaha.

Di tingkat *off-farm* (pasca panen, pengolahan dan pemasaran) upaya yang ditempuh untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan pendapatan petani adalah melalui: (1) Peningkatan kualitas bahan olah karet (bokar) yang dihasilkan petani sesuai dengan SNI bokar yang disyaratkan oleh industri pengolahan; (2) Peningkatan efisiensi pemasaran bokar dan penguatan kelembagaan petani untuk mencapai bagian harga yang diterima petani lebih layak; (3) Fasilitasi dan upaya penyediaan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkait dengan rehabilitasi dan peremajaan karet, serta pengembangan usaha bersama dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran; (4) Pengembangan infrastruktur yang menunjang pengembangan produksi dan pengolahan barang jadi karet dan kayu karet; (5) Peningkatan nilai tambah produk melalui pengembangan industri hilir yang ramah lingkungan yang dicerminkan melalui peningkatan daya serap bokar dari petani; (6) Peningkatan pendapatan petani melalui berbagai upaya peningkatan hasil usahatani (perbaikan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran), dan penciptaan usaha industri kecil dan menengah pedesaan.

## **7.2. Program Pengembangan**

Pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet diarahkan pada upaya untuk menciptakan model rehabilitasi dan peremajaan karet rakyat yang diterapkan adalah Model Rehabilitas dan Peremajaan Partisipatif. Berdasarkan rekomendasi program Pusat Penelitian Karet dan Balai Penelitian Sembawa, landasan utama pendekatan partisipatif dalam program rehabilitasi dan peremajaan karet rakyat adalah adanya kebutuhan untuk mengubah paradigma pembangunan karet rakyat yang semula menggunakan pendekatan “proyek berbantuan” menjadi “gerakan swadaya masyarakat” (*self-help community development*) atau “pendekatan dari bawah” (*bottom-up approach*). Prinsip dasar pendekatan self-help development adalah mendorong masyarakat untuk belajar mengatasi masalah mereka sendiri dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan. Berkaitan

---

dengan hal ini model percontohan dan pembinaan secara berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan. Pengembangan yang dilakukan di Desa Lubuk Rumbai dirancang untuk menjadi model percontohan yang selanjutnya akan dilakukan penyebarluasan pada wilayah kecamatan dan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan.

Landasan dari Model Rehabilitasi dan Peremajaan Karet Rakyat yang dikembangkan adalah Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat. Beberapa pendekatan yang dipergunakan dalam penerapan model ini adalah : (1) Pendekatan Wilayah meliputi: perbedaan akses informasi, kesiapan kelembagaan dan ketersediaan sarana pendukung; (2) Pendekatan Individu meliputi: perbedaan pengetahuan, ketrampilan, motivasi dan kemampuan finansial. Pendekatan ini sangat tergantung pada karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi petani. Pada program pembangunan terdahulu, model ini pernah diterapkan pada peremajaan karet rakyat di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan sehingga penerapannya memungkinkan untuk dilakukan dengan berbagai penyesuaian kondisi dan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang ditemukan pada program sebelumnya.

Pelaksanaan program yang dilakukan melibatkan seluruh *stakeholders* yang terlibat di wilayah pengembangan, antara lain petani karet/koperasi petani, GAPKINDO, Dinas Perkebunan, Balai Penelitian, perusahaan kayu karet, Pemerintah Daerah, dan lembaga keuangan/perbankan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada kebun karet rakyat yang kondisinya memang sudah tidak produktif atau tanamannya tua/rusak. Lingkup pelaksanaan meliputi karet rakyat baik karet rakyat swadaya maupun karet rakyat eks proyek PIR dan UPP. Dalam pelaksanaan program ini, petani atau kelompok tani pemilik kebun dilibatkan langsung dalam kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar petani/masyarakat dapat lebih termotivasi, dan meningkatkan pengetahuan serta kemajuan dalam penguasaan sumberdaya dan berusahatani, sekaligus mengikutsertakan petani dalam mengelola usahatannya.

Pelaksanaan kegiatan juga dilakukan tanaman sela (*intercropping*) terintegrasi dengan ternak dan sekaligus memanfaatkan kayu karet hasil tebangan. Untuk itu selain koordinasi lintas SKPD, juga perlu adanya keterpaduan dengan industri pengolahan kayu karet. Hasil penjualan kayu karet tersebut digunakan untuk

---

membayai sebagian dana peremajaan. Pada kondisi dimana pabrik pengolah kayu karet tersedia dan akses transportasi relatif baik, maka hasil penjualan kayu karet dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan utama pada tahun awal rehabilitasi dan peremajaan karet. Sumber pendapatan lainnya adalah dari tanaman sela dan ternak. Berkaitan dengan hal ini jika akses jalan atau tranportasi belum tersedia maka diperlukan upaya untuk membuka jalan akses ke kebun berupa jalan usahatani yang dapat dilalui traktor atau kendaraan roda empat dalam rangka menarik kayu keluar dari kebun dan juga mengangkut bibit, benih dan sarana produksi ke dalam kebun.

Rancangan model rehabilitasi dan peremajaan karet rakyat secara partisipatif yang merupakan program inti dari pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet melibatkan banyak pihak, yaitu petani/koperasi, investor, instansi terkait, lembaga penelitian, perbankan dan Pemda. Agar pelaksanaan peremajaan karet tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, maka untuk pelaksanaan di daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Project Management Unit (PMU) yang beranggotakan semua pihak yang terkait. Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, maka pihak-pihak yang terlibat serta tugas dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Lokasi Operasional Kawasan. Sumber pendanaan untuk peremajaan karet rakyat dapat berasal dari : (1) Dana pemerintah baik APBN maupun APBD; (2) Kredit perbankan; (3) Hasil penjualan kayu karet; (4) Swasta dan GAPKINDO; dan (5) Swadaya petani.

Pengelolaan dana untuk peremajaan khususnya yang bersumber dari kredit perbankan dan hasil penjualan kayu karet disarankan dapat dilakukan oleh Kelompok tani/koperasi. Besarnya dana hasil penjualan kayu karet yang digunakan untuk tambahan biaya peremajaan tergantung pada kesepakatan petani/kelompok tani dengan perusahaan kayu karet. Besarnya kredit yang menjadi beban petani harus diinformasikan kepada petani secara terbuka, karena kredit ini akan menjadi tanggung jawab petani. Untuk mempercepat laju investasi di bidang agribisnis karet, diperlukan beberapa kebijakan pendukung sebagai berikut : (1) Penciptaan iklim investasi yang makin kondusif : (a) Pemberian kemudahan dalam proses perijinan

---

jika diperlukan; (b) Pembebasan pajak (tax holiday) selama tanaman atau pabrik belum berproduksi dan terkait pula dengan pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus; (c) Pemberian rangsangan kepada pengusaha untuk menghasilkan *end product* bernilai tambah tinggi yang non-ban, yang prospek pasarnya di dalam negeri cerah; (d) Adanya kepastian hukum dan keamanan baik untuk usaha maupun lahan bagi perkebunan dan program menyertakan sertifikasi lahan petani; (e) Penghapusan berbagai pungutan dan beban yang memberatkan iklim usaha; (2) Pengembangan sarana dan prasarana berupa jalan, jembatan, pelabuhan, alat transportasi, komunikasi, dan sumber energi (tenaga listrik); (3) Penyediaan dana untuk membiayai pengembangan industri hilir, peremajaan, promosi dan peningkatan kapasitas SDM karet; (4) Pengembangan sistem kemitraan antara petani dan perusahaan, misalnya dengan pola "PIR Plus" atau menyempurnakan model KIMBUN yang telah diterapkan. Melalui pola ini, salah satu disainnya adalah : petani tetap memiliki kebun beserta pohon karetnya, dan ikut sebagai pemegang saham perusahaan yang menjadi mitranya. Dengan cara demikian, maka kepastian bagi perusahaan untuk memperoleh bahan baku dalam jumlah cukup lebih terjamin.

Selama ini pemanfaatan kayu karet di dalam negeri masih mengalami kendala dalam beberapa hal seperti tidak jelasnya kelembagaan yang menangani kayu karet, kurangnya kontinuitas sumber bahan baku karena lokasi bahan baku yang terpencar dengan aksesibilitas yang terbatas terhadap fasilitas angkutan, kualitas kayu yang sangat beragam dan pengiriman produk yang tidak kontinu, ketimpangan harga bahan baku di tingkat pabrik (tinggi) dan produk (rendah), jenis produk yang kurang variatif, adanya pajak ekspor permanen (USD 150/m<sup>3</sup>), serta kurangnya apresiasi pasar domestik terhadap kayu karet. Upaya untuk melakukan pembinaan terhadap industri rumah tangga, kecil dan menengah serta meningkatkan investasi pada pabrik pengolahan kayu karet tentu saja akan sangat tergantung pada seberapa jauh hambatan-hambatan di atas dapat dikurangi. Untuk itu program pengembangan kawasan juga mencakup upaya perbaikan dalam produksi, pengolahan atau industri dan pemasaran kayu karet.

---

### **7.3. Rencana Aksi Pengembangan**

Secara terinci rencana aksi yang akan dilaksanakan dimuat pada Tabel 7-1 dengan rangkuman sebagai berikut :

1. Penyempurnaan Masterplan dan Penyusunan Rencana Aksi, yang dilakukan bersamaan dengan penyelesaian Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Peraturan Gubernur dan Bupati atau Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet berikut rencana penganggaran APBD Provinsi dan Kabupaten Kota; dan Surat Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai Tim Teknis Pengembangan Kawasan dan pengalokasi kantor kesekretariatan dan pengalokasian dan pengelolaan asetnya yang terkait dengannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak, kebijakan dan peraturan pendukung yang dibutuhkan diantaranya adalah upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investasi, pemberian sertifikasi lahan, bibit mutu, kebun dan hasil olahan dengan biaya ringan dan prosedur mudah, jaminan kemudahan dalam peroleh kredit dan kemudahan dalam ekspor dan pemasaran hasil (2016-2017)
  2. Persiapan Operasional Perkantoran, Kesekretariatan dan Perekutan Kebutuhan SDM Pendukung Kawasan (2016 – 2019)
  3. Pelaksanaan Model Integrasi Tanaman dan Ternak dan Persiapan Pelatihan Industri Kayu Karet dan Peningkatan Mutu Hasil Panen (2016)
  4. Operasional Kegiatan Pengembangan Kawasan Tahun 1 dan Penyusunan Masterplan dan Rencana Aksi Kabupaten Berikutnya (2017)
  5. Pengembangan Kawasan Tahun 2, Perluasan kawasan di Kecamatan Tuah Negeri dan Persiapan Pengembangan Kawasan Kabupaten Lainnya (2018)
  6. Pengembangan Kawasan Tahun 3, dan Perluasan Pengembangan di Kecamatan Lain di Kabupaten Musi Rawas dan Pengembangan Kawasan Kabupaten lainnya Tahun 1 (2019)
  7. Finalisasi Pengembangan Kawasan Kabupaten Musi Rawas dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Kabupaten Lain Tahun 2 (2020)
-

Tabel 61. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2020.

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	Sumber Dana	Instansi
A	Subsistem Hulu atau Input							
1	Penyediaan/Pengadaan Benih Karet Klon Unggul Bermutu Tinggi dan Kebun Entris	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Petani	Dirjen Perkebunan, Dinas Perkebunan, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa
2	Pengadaan Sarana Produksi di Luar Benih Karet Klon Unggul bermutu Tinggi (Benih Tanaman Sela, Pupuk, Pestisida)	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Sarana dan Prasarana, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa
3	Pengadaan Ternak dan Input Untuk Ternak	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Petani	Dirjen Peternakan, Dinas Peternakan, Badan Litbang Pertanian
4	Pengembangan Unit Kebun Penangkaran Benih dan Kebun Entris		V	V	V	V	APBN, APBD	Dirjen Perkebunan, Dinas Perkebunan, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa
5	Fasilitasi Pemetaan dan Penataan Kebun Petani	V	V	V	V		APBN, APBD	Dirjen Perkebunan, Dinas Perkebunan, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa
6	Pelatihan dan peningkatan kualitas penangkar benih	V	V	V	V	V	APBN, APBD	Dirjen Perkebunan, Dinas Perkebunan, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa
7	Pengembangan jalan usahatani pada lokasi kawasan yang dikembangkan untuk akses kebun petani dan pengangkutan hasil panen karet dan kayu karet, pengangkutan sarana produksi, pengawasan dan monitoring	V	V				APBN, APBD, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Sarana dan Prasarana, Dinas PU dan Kimprasil, Dinas Perkebunan
8	Pengadaan alat dan mesin untuk penebangan, pengangkutan dan pengolahan lahan petani	V	V	V	V	V	APBN, APBD	Dirjen Perkebunan, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Sarana dan Prasarana, Dinas PU dan Kimprasil, Dinas Perkebunan
9	Pengadaan unit perkandungan ternak percontohan,	V	V				APBN, APBD, Petani	Dirjen Peternakan, Dinas Peternakan, Badan Litbang Pertanian
10	Pengadaan bangunan gudang pupuk dan unit pengolahan pupuk organik berikut alsintan yang dibutuhkan pada lokasi percontohan		V	V			APBN, APBD, PT PUSRI	Dirjen Perkebunan, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Sarana dan Prasarana, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa
11	Pengadaan alat dan mesin penangan panen dan pasca panen untuk meningkatkan kualitas BOKAR	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, GAPKINDO

Tabel 61. (Lanjutan)

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	Sumber Dana	Instansi
B	Subsistem Budidaya atau On Farm							
1	Penambahan tenaga operasional dan pendukung pengembangan kawasan baik dari Pusat yang ditempatkan di Provinsi maupun Kabupaten dan tenaga-tenaga tambahan lainnya	V	V	V	V		APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Pemprov Provinsi Sumatera Selatan
2	Peningkatan keahlian dan kemampuan petani dalam budidaya, panen dan pasca panen	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO
3	Pelatihan Manajemen Mutu Budidaya Pertanian dan Penanganan BOKAR;	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa GAPKINDO, Baristand, Badan Standarisasi Nasional
4	Pelatihan majamenen usaha, kewirausahaan dan pengendalian kemitraan usaha bagi petani dan kelompok tani	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO
5	Bimbingan dan penerapan model <i>self help development</i> untuk petani dan pemandu lapangan	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Universitas
C	Subsistem Hilir atau Pengolahan dan Pemasaran							
1	Pembentukan dan penguatan kelembagaan industri barang karet;	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Universitas
2	Peningkatan keahlian dan kemampuan pelaku industri barang karet dan kayu karet;	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Universitas

Tabel 61. (Lanjutan)

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	Sumber Dana	Instansi
3	Pelatihan Manajemen Mutu Karet dan Kayu Karet Olahan;	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Universitas
4	Pelatihan pengembangan majamenen dan pengendalian kemitraan usaha bagi pelaku industry	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Universitas
5	Perluasan jaringan pemasaran termasuk ekspor;	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dirjen Perdagangan dalam dan Luar Negeri, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Universitas
6	Peningkatan kapasitas pemenuhan standar internasional dan nasional untuk memperkuat akses pasar domestik dan internasional;	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Badan Standarisasi Nasional, Universitas
7	Pengadaan alat dan mesin pengolahan kayu karet	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Universitas
8	Pengadaan alat dan mesin pengolahan hasil panen tanaman pangan pada lokasi percontohan	V	V				APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Universitas
9	Peningkatan efisiensi pemasaran bokar dan penguatan kelembagaan petani untuk mencapai bagian harga yang diterima petani lebih layak	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, Petani	Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Universitas

Tabel 61. (Lanjutan)

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	Sumber Dana	Instansi
D	Subsistem Pendukung							
1	Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis serta organisasi UPT Kawasan Karet.	V					APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Pemprov Sumatera Selatan dan Pemkab Musi Rawas
2	Pembentukan Lembaga Pusat Informasi dan Pengembangan Kawasan Karet		V				APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Pemprov Sumatera Selatan dan Pemkab Musi Rawas
3	Pengembangan sistem informasi dan manajemen pada pusat pengembangan informasi dan pengembangan karet		V				APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Pemprov Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas
4	Kampanye/gerakan penggunaan dan cinta produk dalam negeri	V	V	V	V	V	APBN, APBD	Kementerian Perdagangan, Pemprov Provinsi Sumatera Selatan dan Pemkab Musi Rawas
5	Pengadaan Prasarana informasi, telekomunikasi, listrik dan air sesuai kebutuhan di untuk operasional Kesekretariatan, perkatoran dan UPT	V	V				APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Musi Rawas
6	Fasilitasi pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;	V	V	V	V	V	APBN, APBD, BUMN, Swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian PU dan Kimprasil, Swasta, Kementerian Keuangan dan BUMN
7	Fasilitasi pembangunan jaringan transportasi dan pelabuhan yang memadai;	V	V	V	V	V	APBN, APBD, BUMN, Swasta	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU dan Kimprasil, Swasta, Kementerian Keuangan dan BUMN
8	Fasilitasi Penyediaan listrik dan energi murah bagi pengembangan industri.	V	V	V	V	V	APBN, APBD, BUMN, Swasta	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU dan Kimprasil, Swasta, Kementerian Keuangan dan BUMN, PLN
9	Survey, pemetaan lahan dan kebun petani dan rangka sertifikasi lahan	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Petani	Kementerian Agraria dan Tata Ruang,, Pemprov Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas

Tabel 61. (Lanjutan)

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	Sumber Dana	Instansi
10	Penyediaan dan penetapan lahan dan prasarana pada lokasi lokasi model percontohan	V					APBN, APBD, Petani	Kementerian Pertanian, Pemprov Provinsi Sumatera Selatan dan Pemkab Musi Rawas
11	Pengadaan alat tulis kantor, bahan bakar minyak dan input operasional lainnya	V	V	V	V	V	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Musi Rawas
12	Peningkatan peran litbang dan <i>network</i> antar litbang daerah dan pusat dalam kerangka sistem inovasi daerah yang terintegrasi dengan sistem inovasi nasional	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta	Badan Litbang Balitbangnovda, Baristand, GAPKINDO
13	Fasilitasi dan pemanfaatan laboratorium dari dalam rangka implemetasi sistem manajemen mutu	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta, BUMN	Balit Karet Sembawa maupun Universitas Sriwijaya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatra Selatan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Baristand dan laboratorium milik PTPN atau perusahaan yang memiliki laboratorium
14	Penelitian mengenai uji kandungan unsur hara untuk rekomendasi penggunaan pupuk berimbang dan manajemen pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta	Badan Litbang Balitbangnovda, Baristand, GAPKINDO
15	Penelitian untuk pengembangan kualitas dan diversifikasi produk dan peningkatan adopsi teknologi, serta pengembangan inovasi teknologi produk yang mencakup produk hulu hingga hilir	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Swasta	Badan Litbang Balitbangnovda, Baristand, GAPKINDO
16	Pendaatan Petani dan Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan	V	V				APBD	Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten
17	Penyempurnaan Masterplan Oleh Provinsi dan Penajaman Rencana Aksi Oleh Kabupaten Musi Rawas	V					APBD	Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten
18	Fasilitasi dan upaya penyediaan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkait dengan rehabilitasi dan peremajaan karet, serta pengembangan usaha bersama dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran	V	V	V	V	V	APBN, APBD, Perbankan, Swasta	Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dirjen Perdagangan dalam dan Luar Negeri, Dinas Perdagangan, Kemenkop UKM, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Universitas

Tabel 61. (Lanjutan)

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	Sumber Dana	Instansi
19	Penyusunan Masterplan dan Rencana Aksi Kabupaten Berikutnya		V				APBN, APBD	Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten
20	Perluasan kawasan di Kecamatan Tuah Negeri dan Persiapan Pengembangan Kawasan Kabupaten Lainnya			V			APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten
21	Persiapan Pengembangan Kawasan Kabupaten Lainnya			V			APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten
22	Perluasan Pengembangan di Kecamatan Lain di Kabupaten Musi Rawas dan Operasional Pengembangan Kawasan Kabupaten				V	V	APBN, APBD	Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten
23	Finalisasi Pengembangan Kawasan Kabupaten Musi Rawas dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Kabupaten Lain					V	APBN, APBD	Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten
24	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan	V	V	V	V	V		Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten
E	Subsistem Kebijakan							
1	Penerbitan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Peraturan Gubernur dan Bupati atau Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet berikut rencana penganggaran APBD Provinsi dan Kabupaten Kota	V					APBD	Pemprov Sumatera Selatan dan Kabupaten
2	Surat Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai Tim Teknis Pengembangan Kawasan dan pengalokasi kantor kesekretariatan dan pengalokasian dan pengelolaan asetnya yang terkait dengannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak	V					APBD	Pemprov Sumatera Selatan dan Kabupaten
3	Penyusunan Kebijakan dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investasi, pemberian sertifikasi lahan, bibit mutu, kebun dan hasil olahan dengan biaya ringan dan prosedur mudah, jaminan kemudahan dalam peroleh kredit dan kemudahan dalam ekspor dan pemasaran hasil	V	V				APBN, APBD, Swasta, BUMN	Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Dirjen Perkebunan, Dirjen IKAH Perindustrian, Dirjen Perdagangan dalam dan Luar Negeri, Dinas Perdagangan, Kemenkop UKM, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Badan Litbang Pertanian, Balit Karet Sembawa, GAPKINDO, Universitas

Tabel 61 menjadi dasar penyusunan rencana aksi Pengembangan Kawasan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten pada level operasional Kabupaten dan Dinas Perkebunan Provinsi untuk operasional level provinsi. Volume kegiatan mengikuti formulasi hasil analisis pada Bab VI dengan nilai kebutuhan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.

## **BAB VIII            KESIMPULAN DAN SARAN**

### **8.1. Kesimpulan**

Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet Provinsi Sumatera Selatan merupakan model kawasan terintegrasi secara vertikal dan horisontal. Model integrasi vertikal ditunjukkan dengan upaya untuk mengembangkan produksi BOKAR berkualitas dimana penanganan panen dan pasca panen dilakukan di level petani dengan program peremajaan dan rehabilitasi kebun karet menggunakan benih bermutu tinggi. Petani yang dberdayakan melalui kelompok di mitrakan dengan perusahaan-perusahaan karet yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Pengembangan karet dilakukan dalam rangka mendukung program hilirisasi industri karet dan pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Tanjung Api-Api. Integrasi vertikal juga ditunjukkan dengan upaya pemanfaatan kayu karet dimana dalam skala besar dimitrakan dengan perusahaan pengolah kayu karet dan dalam skala industri kecil di lakukan pembinaan pengolahan kayu karet di lokasi kawasan. Integrasi horisontal diupayakan melalui pengembangan tanaman sela dan budidaya ternak. Integrasi juga mengarahkan upaya untuk mengembangkan keterpaduan antar pelaku dan pemangku kepentingan.

Produk akhir kawasan adalah BOKAR berkualitas tinggi dan kayu karet. Dalam rangka mencapai sasaran produksi tersebut Strategi yang ditempuh dalam pengembangan kawasan perkebunan berbasis karet adalah pengutuhan dan penguatan sistem agribisnis karet. Pengutuhan dimaksudkan agar seluruh komponen subsistem dalam sistem agribisnis ketersediaannya lengkap di lokasi kawasan. Penguatan dimaksudkan agar komponen-komponen dalam subsistem agribisnis diperkuat atau ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu mendorong pertumbuhan kawasan agribisnis. Melalui pengutuhan dan penguatan ini, maka secara keseluruhan sistem agribisnis dapat berjalan dengan terpadu dalam pengembangan kawasan. Pengutuhan dan penguatan dilakukan dalam rangka : (1) Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas karet yang dikembangkan; (2) Meningkatkan aktivitas pasca panen dan kualitas produk karet;

---

(3) Meningkatkan aktivitas pengolahan dan nilai tambah produk karet dan kayu karet; (4) Meningkatkan jaringan pemasaran komoditas komoditas karet dan kayu karet; (5) Meningkatkan pendapatan pelaku usaha komoditas karet; (6) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha dibidang agribisnis dan agroindustri karet; (7) Meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan, pasar input dan *output*, teknologi dan informasi agribisnis karet.

Pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet diarahkan pada upaya untuk menciptakan model rehabilitasi dan peremajaan karet rakyat yang diterapkan adalah Model Rehabilitasi dan Peremajaan Partisipatif. Berdasarkan rekomendasi program Pusat Penelitian Karet dan Balai Penelitian Sembawa, landasan utama pendekatan partisipatif dalam program rehabilitasi dan peremajaan karet rakyat adalah adanya kebutuhan untuk mengubah paradigma pembangunan karet rakyat yang semula menggunakan pendekatan “proyek berbantuan” menjadi “gerakan swadaya masyarakat” (*self-help community development*) atau “pendekatan dari bawah” (*bottom-up approach*). Prinsip dasar pendekatan self-help development adalah mendorong masyarakat untuk belajar mengatasi masalah mereka sendiri dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan.

Landasan dari Model Rehabilitasi dan Peremajaan Karet Rakyat yang dikembangkan adalah Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan pendekatan penerapan: (1) Pendekatan Wilayah meliputi: perbedaan akses informasi, kesiapan kelembagaan dan ketersediaan sarana pendukung; (2) Pendekatan Individu meliputi: perbedaan pengetahuan, ketrampilan, motivasi dan kemampuan finansial. Pendekatan ini sangat tergantung pada karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi petani. Model ini pernah diterapkan pada peremajaan karet rakyat di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, sehingga penerapannya memungkinkan untuk dilakukan dengan berbagai penyesuaian kondisi dan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang ditemukan pada program sebelumnya.

---

Secara umum rangkuman roadmap dan rencana aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan Masterplan dan Penyusunan Rencana Aksi, yang dilakukan bersamaan dengan penyelesaian Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Peraturan Gubernur dan Bupati atau Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas Karet berikut rencana penganggaran APBD Provinsi dan Kabupaten Kota; dan Surat Keputusan Gubernur dan Bupati mengenai Tim Teknis Pengembangan Kawasan dan pengalokasi kantor kesekretariatan dan pengalokasian dan pengelolaan asetnya yang terkait dengannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak, kebijakan dan peraturan pendukung yang dibutuhkan diantaranya adalah upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investasi, pemberian sertifikasi lahan, bibit mutu, kebun dan hasil olahan dengan biaya ringan dan prosedur mudah, jaminan kemudahan dalam peroleh kredit dan kemudahan dalam ekspor dan pemasaran hasil (2016-2017)
  2. Persiapan Operasional Perkantoran, Kesekretariatan dan Perekutan Kebutuhan SDM Pendukung Kawasan (2016 – 2019)
  3. Pelaksanaan Model Integrasi Tanaman dan Ternak dan Persiapan Pelatihan Industri Kayu Karet dan Peningkatan Mutu Hasil Panen (2016)
  4. Operasional Kegiatan Pengembangan Kawasan Tahun 1 dan Penyusunan Masterplan dan Rencana Aksi Kabupaten Berikutnya (2017)
  5. Pengembangan Kawasan Tahun 2, Perluasan kawasan di Kecamatan Tuah Negeri dan Persiapan Pengembangan Kawasan Kabupaten Lainnya (2018)
  6. Pengembangan Kawasan Tahun 3, dan Perluasan Pengembangan di Kecamatan Lain di Kabupaten Musi Rawas dan Pengembangan Kawasan Kabupaten lainnya Tahun 1 (2019)
  7. Finalisasi Pengembangan Kawasan Kabupaten Musi Rawas dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Kabupaten Lain Tahun 2 (2020)
-

## **8.2. Saran**

Rancangan model rehabilitasi dan peremajaan karet rakyat secara partisipatif yang merupakan program inti dari pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet melibatkan banyak pihak, yaitu petani/koperasi, investor, instansi terkait, lembaga penelitian, perbankan dan Pemda. Agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, maka untuk pelaksanaan di daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Project Management Unit (PMU) yang beranggotakan semua pihak yang terkait. Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, maka pihak-pihak yang terlibat serta tugas dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Lokasi Operasional Kawasan. Sumber pendanaan untuk peremajaan karet rakyat dapat berasal dari : (1) Dana pemerintah baik APBN maupun APBD; (2) Kredit perbankan; (3) Hasil penjualan kayu karet; (4) Swasta dan GAPKINDO; dan (5) Swadaya petani.

Seluruh lembaga yang berada dalam organisasi dan kelembagaan pengembangan perlu mengarahkan dukungan penuh dalam upaya pemberdayaan petani dan lembaga petani (Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani) dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuannya untuk memproduksi BOKAR dan Kayu Karet secara yang memiliki kuantitas dan kualitas kontinyu dan bernilai tambah tinggi. Keberhasilan pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas karet memerlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kepentingan. Diperlukan koordinasi dan konsolidasi bersama-sama antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan peningkatkan pasokan karet untuk industri dan ekspor, mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah baik pusat maupun daerah, peranan swasta juga sangat diperlukan. Jika masing-masing pihak ini dapat saling mendukung dan selaras dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka pengembangan kawasan karet dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan dokumen ini selanjutnya Dinas Perkebunan Kabupaten dan instansi terkait menyusun rencana akksi kegiatan operasional level Kabupaten dan

---

Dinas Perkebunan Provinsi berserta instansi terkait menyusun rencana aksi untuk landasan kegiatan operasional level provinsi. Volume kegiatan mengikuti formulasi hasil analisis pada Bab VI dengan nilai kebutuhan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Agribisnis. 1998. Rencana Induk (Master Plan) Badan Agribisnis Dalam Repelita VII. Badan Agribisnis, Departemen Pertanian. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1998a. Peluang Investasi Agribisnis. Badan Agribisnis. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1999. Analisis Kebutuhan Pada Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU) Menurut Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Badan Agribisnis, Departemen Pertanian. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1999a. Agribusiness Investment Opportunity. Badan Agribisnis. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2006. Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan: Membangun Model Pengelolaan dan Pengembangan Keterkaitan Program. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional BAPPENAS. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006a. Panduan Pembangunan Klaster Industri Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Berdaya Saing Tinggi. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. Kajian Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Memaksimalkan Potensi Daya Saing Daerah. Laporan Akhir. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. BAPPENAS. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. BAPPENAS. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. Model Pengelolaan dan Pengembangan Keterkaitan Program Dalam Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. BAPPENAS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas. 2014. Musi Rawas Dalam Angka 2013. Musi Rawas.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2015. Sumatera Selatan Dalam Angka 2014. Palembang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2011-2015. Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Sumatera Selatan 2010 - 2014. Palembang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2014. Sensus Pertanian 2013 : Hasil Pencacahan Lengkap. Palembang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2014. Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pertanian: Analisis Survei Pendapatan Petani 2013. Palembang.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2014. Potensi Pembangunan Pertanian Sumatera Selatan : Analisis Analisis Sensus Pertanian 2013. Palembang.
- Bank Indonesia. 2015. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2015. Palembang.
- Beirlein, G James, Dchneeberger, C Kenneth and Osburn, D Donald. 1986. Principles of Agribusiness Management. Prentice Hall Englewood Cliffs. New Jersey.
- Blakely, E.J. 2002. *Planning Local Economic Development*. Sage Publication. London.
- Bregman EM, Feses EJ. 2003. *Industrial and Regional Cluster Concept and Competitive Applications*. The Web Book of Regional Science.
- Center For Agro Economic Research. 1990. Comparative Advantage and Protection Structures of The Livestock and Feedstuff Subsectors in Indonesia. Editors F. Kasryno dan P. Simatupang. Agency for Agricultural Research and Development.
- Daryanto, A. 2003. Teknik Pengkajian Sumberdaya Dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal dan Regional. Makalah Diklat Manajemen Pembangunan Ekonomi dan Usaha Daerah, Jakarta, 28 April – 3 Mei 2003. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 1999. Strategi Pembangunan Jangka Menengah (1999 – 2004) Industri Kecil dan Menengah. Buku I dan II. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jakarta.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 1999a. Strategi Pembangunan Jangka Menengah (1999 – 2004) Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jakarta.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. 2011-2015. Statistik Perkebunan Sumatera Selatan 2010-2014. Palembang.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. 2011-2015. Laporan Tahunan 2010-2014. Palembang.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. 2013. Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018. Palembang.
- Dinc, M. 2002. *Regional and Local Economic Analysis Tools*. The World Bank. Washington DC.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2002. Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional Dan Daerah (Agropolitan). Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah [www.penataanruang.net/taru/nspm/6.pdf](http://www.penataanruang.net/taru/nspm/6.pdf)
- Downey, WD and Erickson, SP. 1989. Manajemen Agribisnis Edisi Kedua (Bahasa Indonesia). Erlangga. Jakarta.
- Gumbira Sa'id, E., 2006. Modul Globalisasi dan Tantangan Peningkatan Daya Saing Industri Pangan Dan Pertanian Melalui Kinerja Mutu. Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hamel, G. dan Prahalad, CK. 1990. *The Core Competence of the Corporation*. Harvard Business School Press. Boston. Review: May-June.
-

- Hamel, G. dan Prahalad, CK.. 1994. *Competing for the Future*. Harvard Business School Press. Boston.
- Hartarto, A. 2004. *Strategi Clustering dalam Undustrialisasi Indonesia*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Hartoyo, S., D. Rachmina dan A. Fariyanti. 1997. Pemantapan Konsep Dasar Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan. Kerjasama antara Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dengan Biro Perencanaan Departemen Pertanian. Bogor.
- \_\_\_\_\_. 1999. Studi Potensi Wilayah Pedesaan Propinsi Jawa Barat dan Bengkulu. Kerjasama antara Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dengan Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Japan International Cooperation Agency.2003. *Studi Mengenai Peningkatan Kapasitas Kluster Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia*. Laporan Perkembangan. KRI International Corp. Tokyo.
- Juzar, A. 2006. *Model Strategi Pengembangan Klaster Agroindustri Unggulan Menggunakan Kompetensi inti di Daerah Kabupaten dan Kota Bogor*. Disertasi Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2015. Cetakan1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014. Kementerian Pertanian, Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Pertanian.2015. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019. Jakarta.
- Koizumi, H. 2003. *Strengthening Capacity of SME Clusters: Master Concept andStrategy for SME Cluster Development from Lessons Learn*.JICA Study Team.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2014. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2033.
- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 2013. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati 2013-2033. .
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Palembang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833).
-

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106).

Peraturan Pemerintan No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260).

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5296).

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press. New York

\_\_\_\_\_. 1993. *Keunggulan Bersaing : Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. (Edisi Indonesia). Penerbit Erlangga. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1996. Competitive Advantage, Agglomeration Economies and Regional Policy. *International Regional Science Review*, 19, 85-90.

\_\_\_\_\_. 1998. "Clusters and the New Economics of Competition." *Harvard Business Review*: 77-90.

\_\_\_\_\_. dan S. Stern. 1999. The Challenge to America's Prosperity : Findings from the Innovation Index. Council of Competitiveness. Washington, D.C.

\_\_\_\_\_. 2000. "Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy." *Economic Development Quarterly* 14 (1): 15-34.

\_\_\_\_\_. 2003. "The Economic Performance of Regions." *Regional Studies* 37 (6/7): 549-578.

\_\_\_\_\_. 2007. *StrategiBersaing, Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing* (Edisi Indonesia). Karisma Publishing Group. Tangerang.

Pusat Studi Asia Pasifik. Tanpa Tahun. Laporan Akhir Rancangbangun Sistem Informasi Geografis untuk Menunjang SPAKU (Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan).Biro Perencanaan Departemen Pertanian Jakarta dengan Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Rosenfeld, S.A. 2002. "Creating Smart Systems : A guide to cluster strategies in less favoured regions", Regional Technology Strategies, North Carolina.

Setiyanto, A. 2010.Konsepsi Model Pembangunan Ekonomi Wilayah Daerah Perbatasan Perbatasan Negara.Rountable Discussion. Lembaga Pertahanan Nasional 4 Desember 2010. Lembaga Pertanahan Nasional. Jakarta.

---

- Setiyanto, A., B. Irawan dan B. Prasetyo. 2011. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan dan Wilayah Sentra Pengembangannya Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan Pertanian. Kumpulan Materi Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian 2011. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Jakarta
- Setiyanto, A., R. S. Rivai, J. Situmorang, M. Azis, Y.S. Saputra dan J. Triyono. 2012. Kajian Pengembangan Komoditas Strategis Berbasis Kawasan. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Siebert, H. 2000. The Paradigm of Locational Competition. Kiel Discussion Papers 367.
- Siregar, M., A. Setiyanto, Y. Supriyatna dan E. Ariningsih. 2003. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan dan Wilayah Sentra Pengembangannya. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Solvell, O, Lindqvist, G and Ketels, C. 2003. The Cluster Initiative Greenbook. Ivory Tower AB. Stockholm. [www.cluster-research.org](http://www.cluster-research.org)
- Sunarno. 2004. Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah. Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta.
- Suprapto, A. 1999. Pengembangan Komoditas Pertanian Ungguan Dalam Upaya Memasuki Pasar Global. Makalah Disampaikan pada Lokakarya Nasional dan Musyawarah Nasional V Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (POPMASEP) IMASEP - FP USU MEDAN.
- Winoto, Joyo. 1995. Perwilayahan Komoditas Pertanian Berdasarkan Aksesibilitas Lokasi Produksi. Paper disampaikan pada Pelatihan Perwilayahan Komoditas Pertanian Berdasarkan Ketersediaan Tenaga Kerja dan Aksesibilitas. Biro Perencanaan Pertanian. Departemen Pertanian RI. Denpasar-Bali. 28 Agustus – 2 September 1995.
- \_\_\_\_\_. 1996. Pengembangan Agroecological Zones dalam Perspektif Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Paper Disampaikan Pada Pelatihan Apresiasi Metodologi Delinilasi Agroecological Zones. Bogor, 8 – 17 Januari 1996.
- \_\_\_\_\_. 1997. Pedoman Analisis Pewilayahan Komoditas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Wirabrata, H. 2000. Pengembangan Klaster Industri Antara Teori dan Praktek. Departemen Perindustrian. Jakarta.
- Yoshimura, T. 2004. *Sustainable Local Development and Revitalization: Case of One Villae One Product Movement: Its Principles and Implications*. United Nations Centre for Regional Development (UNCRD). [<http://www.uncrd.or.jp>].
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170).